SALINAN

WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
4. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Wali Kota serta target pembangunan nasional.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat Daerah.
9. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.

Pasal 2

RPJMD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 3

(1) RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I yang memuat pendahuluan;
    b. bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
    c. bab III yang memuat Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
    d. bab IV yang memuat program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
    e. bab V yang memuat penutup.
(2) Uraian RPJMD tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/nonalam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan rencana strategis perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 6 Oktober 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/W.II/2025)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
SEKRETARIAT DAERAH

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang Visi, Misi, dan agenda Wali Kota terpilih dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 27 November 2024, Kota Tomohon melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2030 sebagai bagian dari Pikada serentak. Berdasarkan hasil Pilkada, maka ditetapkan pasangan Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I. Kom. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periode 2025-2030 serta telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program

prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Tomohon periode 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penyusunan dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan beberapa pendekatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMD Kota Tomohon, yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Kota Tomohon berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perumusan RPJMD Kota Tomohon juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,

tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

RPJMD Kota Tomohon menjadi dokumen strategis, sebab merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Tomohon 2025-2045 periode / tahap pertama.
3. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
4. Pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Sebagai arah pembangunan daerah diantaranya dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi lewat pengembangan sektor-sektor strategis, dan untuk meningkatkan pelayanan publik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Provinsi Sulawesi Utara;
28. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 62);
30. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan Pembangunan nasional dan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan RPJMD Kota Tomohon berpedoman pada RPJP Nasional 2025-2045, RPJM Nasional 2025-2029, RTRW Nasional 2008-2028, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029, RPJPD Kota Tomohon 2025-2029, serta RTRW Kota Tomohon 2013-2033.

Agar arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tomohon selaras dan sejalan dengan kebijakan Pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap Pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi Pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Sumber Bappenas, 2017)

1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.2. Keterhubungan RPJMD Kota Tomohon dan RPJPD Kota Tomohon

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, dan arah kebijakan Pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam program

pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun.

1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kota Tomohon dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara

RPJMD Kota Tomohon mempedomani RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren. Mempedomani RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.4. Keterhubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 memperhatikan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW Kota Tomohon sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Tomohon.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat

indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Keterhubungan RPJMD dengan RTRW sebagaimana digambarkan dalam Gambar berikut:

Gambar 1.2. Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW

Sumber: Permendagri 86 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutu han pendanaan dan sumber dana. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3. Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Tomohon dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sumber: Permendagri 86 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kota Tomohon setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterhubungan RPJMD dengan RKPD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 1.4. Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Tomohon dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029

Sumber: Permendagri 86 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS

KLHS RPJMD dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, dimana didalamnya subtansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) berbasis jasa ekosistem terhadap TPB, maka KLHS RPJMD dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) serta mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi KLHS diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola yang diperkirakan terjadi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

1.3.8. Keterhubungan RPJMD dengan RIPJPID

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029 ini adalah memberikan arah pembangunan Kota Tomohon periode 5 (lima) tahun ke depan bagi para pemangku kepentingan yang sehingga pembangunan efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang terpadu dengan tujuan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Tomohon.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kota Tomohon, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif serta memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disajikan beserta target setiap tahun.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir

untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Posisi Geografis

Kota Tomohon tumbuh dan berkembang pada jalur sirkulasi utama antara Kota Manado dengan daerah-daerah lainnya di Kabupaten Minahasa. Situasi ini menjadikan posisi Kota Tomohon sangat strategis dalam aksesibiltas sekaligus dalam menciptakan kelancaran akses sirkulasi dalam wilayah. Menuju Kota Tomohon dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi darat dari Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi dengan jarak tempuh sekitar 22 km atau ± 35 menit lamanya sedangkan waktu tempuh dari pelabuhan Bitung dapat ditempuh melalui jalur darat melalui Tondano ataupun melintasi Manado dengan waktu ± 45-60 menit. Jarak Kota Tomohon dengan beberapa Kabupaten/Kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: a) Tomohon-Bitung berjarak ± 60 km; b) Tomohon-Manado berjarak ± 22 km; c) Tomohon-Tondano berjarak ± 15 km; d) Tomohon–Langowan berjarak ± 33 km; dan e) Tomohon–Bandara Sam Ratulangi berjarak ± 34 km.

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang batas Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, letak geografis Kota Tomohon berada pada 1°24’18,479” Lintang Utara dan 124°43’52,457” Bujur Timur, 1°14’33,154” Lintang Utara 124°54’34,191” Bujur Timur. Kota Tomohon memiliki luas wilayah sebesar 169,10 km² atau 16,910 Ha yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tomohon

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Persentase (%)
		Km²	Ha	
1	Tomohon Barat	**40,71**	**4071,34**	**24,08**
2	Tomohon Selatan	**35,31**	**3531,29**	**20,88**
3	Tomohon Tengah	**15,94**	**1593,55**	**9,42**
4	Tomohon Timur	**18,52**	**1852,31**	**10,95**

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Persentase (%)
		Km²	Ha	
5	Tomohon Utara	**58,61**	**5861,50**	**34,66**
	Kota Tomohon	**16.909,99**	**169,09**	**100,00**

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024

Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari 5 Kecamatan dan 44 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Pemerintahan Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
b. Sebelah Timur: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
c. Sebelah Selatan: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa; dan
d. Sebelah Barat: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tomohon

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024

Kota Tomohon memiliki sebagian besar wilayah yang terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit yang diselingi lembah dan membentuk

dataran. Berdasarkan hasil analisis *Digital Elevation Models* Nasional (DEMNAS) diperoleh ketinggian pada 900-1000 meter diatas permukaan laut merupakan area terluas yakni 63,11 km² atau sekitar 37,32% dari luas Kota Tomohon. Klasifikasi ketinggian wilayah Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan sebarannya ditunjukkan dalam Gambar 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Ketinggian Kota Tomohon

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	0-500	17,49	0,17	0,10
2	500-700	1688,24	16,88	9,98
3	700-800	3471,88	34,72	20,53
4	800-900	4874,49	48,74	28,83
5	900-1000	6311,26	63,11	37,32
6	1000-1500	546,64	5,47	3,23
Kota Tomohon		**16909,99**	**169,09**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kota Tomohon

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024

Kondisi topografi Kota Tomohon ditinjau berdasarkan klasifikasi kelerengan terdiri atas 5 (lima) kelas yakni datar, landai, agak curam, curam dan sangat curam. Kelas datar dengan kemiringan lereng 0-8% merupakan area terluas yakni 74,05 km² atau sekitar 43,79% dari luas wilayah Kota Tomohon. Sedangkan kelas sangat curam yang memiliki kemiringan lereng >40% merupakan area terkecil dengan luas 0,66 km² atau sekitar 0,39%. Klasifikasi kelerengan Kota Tomohon dapat dilihat

pada Tabel 2.3 dan sebarannya ditunjukkan dalam Gambar 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3. Kelerengan Kota Tomohon

No	Kelas Kemiringan Lereng	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
1	Datar (0-8%)	7405,43	74,05	43,79
2	Landai (8-15%)	4898,16	48,98	28,97
3	Agak Curam (15-25%)	3363,19	33,63	19,89
4	Curam (25-40%)	1176,75	11,77	6,96
5	Sangat Curam (>40%)	66,48	0,66	0,39
Kota Tomohon		**16909,99**	**169,09**	**100**

Sumber: *Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024*

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kota Tomohon

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024

Pulau Sulawesi atau dikenal dengan Celebes terletak di bagian tengah wilayah kepulauan Indonesia dan memiliki bentuk yang unik menyerupai huruf K dengan empat semenanjung, yang mengarah ke timur, timur laut, tenggara dan selatan. Pulau Sulawesi berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau dikenal dengan Borneo di sebelah barat, Filipina di sebelah utara, Pulau Flores di sebelah selatan, Pulau Timor di sebelah tenggara dan Pulau Maluku di sebelah timur. Sulawesi dan sekitarnya merupakan daerah yang kompleks karena merupakan tempat pertemuan tiga lempeng besar yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat dan lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan-tenggara serta lempeng yang lebih kecil

yaitu lempeng Filipina. Proses tumbukan keempat lempeng tersebut menyebabkan Pulau Sulawesi memiliki empat buah lengan dengan proses tektonik yang berbeda-beda membentuk satu kesatuan mosaik geologi. Pulau ini seakan dirobek oleh berbagai sesar seperti sesar Palu-Koro, sesar Poso, sesar Matano, sesar Lawanopo, sesar Walanae, sesar Gorontalo, sesar Batui, sesar Tolo, sesar Makassar dan sesar lainnya, dimana berbagai jenis batuan bercampur sehingga posisi stratigrafinya menjadi sangat rumit. Selain itu Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada bagian utara pulau Sulawesi terdapat palung Sulawesi Utara yang terbentuk oleh subduksi kerak samudera dari laut Sulawesi (Sompotan F. Amstrong, 2012 :1-2). Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) bahwa struktur geologi di Kota Tomohon terdiri dari formasi yaitu Batuan Vulkanik seluas ± 169,06 Km^2.

Penutup lahan menurut SNI 7645:2010 adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut.

Berdasarkan peta dasar skala 1:25.000 yang telah disetujui oleh Badan Informasi Geospasial pada tahun 2022, bahwa penutup lahan di Kota Tomohon terdiri dari 13 (tiga belas) jenis tutupan, dimana tutupan terbesar adalah perkebunan seluas ± 50,42 Km^2 dan terkecil adalah tempat penimbunan dan pembuangan sampah seluas 0,01 Km^2. Klasifikasi tutupan lahan Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan sebarannya ditunjukkan dalam Gambar 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Tutupan Lahan Kota Tomohon

No	Penutup Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)
1	Bangunan bukan permukiman	23,76	0,24	0,14
2	Bangunan Permukiman/ campuran	1458,97	14,59	8,63
3	Danau telaga alami	52,33	0,52	0,31
4	Hutan	4783,12	47,83	28,29

No	Penutup Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)
5	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	23,38	0,23	0,14
6	Kolam air tawar	4,21	0,04	0,02
7	Lahan terbuka Alami lainnya	272,53	2,73	1,61
8	Perkebunan	5041,53	50,42	29,81
9	Sawah	560,16	5,60	3,31
10	Semak Belukar (Belukar)	2070,16	20,70	12,24
11	Sungai	16,09	0,16	0,10
12	Tegalan/Ladang	2601,39	26,01	15,38
13	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	2,38	0,02	0,01
Kota Tomohon		**16909,99**	**169,09**	**100**

Sumber: *Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024*

Gambar 2.4 Peta Tutupan Lahan Kota Tomohon

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024

B. Peran Ekonomi

Kota Tomohon memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pertanian, khususnya hortikultura, memberikan kontribusi signifikan, dengan banyak hasil panen diekspor ke daerah lain. Selain itu, Tomohon juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan memiliki potensi di sektor

pertambangan (galian C dan pemanfaatan panas bumi). Tomohon dikenal sebagai "Kota bunga" dan memiliki potensi besar dalam produksi hortikultura, seperti sayuran dan bunga. Sektor pertanian ini menyumbang cukup besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tomohon.

C. Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur Kota Tomohon pada umumnya dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 86,97% atau sepanjang 372,42 km. Pemerintah Kota Tomohon berkomitmen dalam mendukung aksesibilitas jalan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal-tujuan dengan aman dan nyaman. Dengan adanya TIFF yang saat ini diselenggarakan setiap tahun berefek positif terhadap jaminan akan meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.

Capaian indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat terealisasi sebesar 91,59% (65.403 km) atau dalam kondisi baik. Sedangkan capaian luas daerah irigasi kota dalam kondisi baik sebesar 84,85% atau dalam keadaan baik.

D. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Kota Tomohon memberikan dukungan sepenuhnya terhadap investasi, pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif, UMKM dan pariwisata, yang menjadikan Kota Tomohon sebagai salah satu wilayah strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Kota Tomohon tumbuh dan berkembang pada jalur sirkulasi utama antara Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Situasi ini menjadikan posisi Kota Tomohon sangat strategis dalam aksesibiltas sekaligus dalam menciptakan kelancaran akses sirkulasi dalam wilayah.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Tomohon memiliki sejumlah sumber daya alam yang bisa menjadi potensi produk unggulan daerah bisa dikembangkan untuk menjadi pengungkit bagi perekonomian daerah. Produk

unggulan daerah tersebut terbagi pada sejumlah sektor. Melihat pertumbuhan PDRB Kota Tomohon, maka struktur perekonomian Kota Tomohon selama lima tahun didominasi oleh sektor Konstruksi (21,34%), sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,98%) serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (11%). Sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur PDRB Kota Tomohon. Melihat Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon, maka ada 2 sektor yang menjadi unggulan, yaitu 1)sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan 2)Sektor Jasa Lainnya. Untuk sektor pertanian terdapat sejumlah komoditas yang menjadi produk unggulan yaitu Bunga Krisan dan Hortikultura (sayur-sayuran).

Tabel 2.5. Produksi Produk Unggulan Pertanian Kota Tomohon

No	Komoditas	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Krisan	Tangkai	980.000	6.035.000	6.077.500
2	Labu Siam	Kuintal	239.470	138.600	134.820
3	Petsai	Kuintal	58.960	64.205	66.760
4	Wortel	Kuintal	85.350	79.342	67.800

Sumber: BPS Tomohon, 2025

Kota Tomohon memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka produk yang dapat ditetapkan sebagai unggulan daerah merupakan produk yang dapat diperbaharui. Produk unggulan daerah yang dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Kota Tomohon memiliki daerah pertambangan galian C di Kelurahan Kinilow dan energi panas bumi di Lahendong. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah dikarenakan produk yang tidak dapat diperbaharui.

Untuk sektor pertanian terdapat sejumlah komoditas yang menjadi produk unggulan yaitu produk tanaman hias Bunga Krisan. Nama krisan mengadopsi dari bahasa daerah yakni krisan kulo artinya krisan putih dan krisan riri artinya krisan kuning,

telah diakui keunggulannya secara nasional dan dikenal oleh masyarakat dunia. Kulo (putih) bermakna kejujuran dan kesetiaan sedangkan Riri (kuning) bermakna kegembiraan, keceriaan, dan optimisme.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, maka untuk di kembangkan secara legal satu varitas harus di daftarkan dan terdaftar. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Tomohon diwajibkan mengembangkan varietas itu untuk di produksi oleh petani Tomohon menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang berperan strategis dalam gelar tehnologi pengembangan bunga krisan di kawasan timur Indonesia melalui budidaya pascapanen dan pengekspor varitas bunga krisan. Pemerintah Kota Tomohon telah mendaftarkan varitas Bunga Krisan, kulo dan riri pada Kementerian Pertanian RI (Kementan RI). Varitas Kulo terdaftar dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2276/kpts/SL-120/VIII/2012, sedangkan varitas Riri didaftarkan lewat SK Menteri Pertanian Nomor 2277/KPTS/SL-120/VIII/2012.

Sehingga produk unggulan daerah dipilih pada sektor agraris atau pertanian dalam arti luas. Pengembangan produk unggulan daerah juga didukung dengan ketersediaan luasan wilayah pertanian dan daerah tujuan wisata.

Pengembangan produk unggulan daerah yang didukung dengan penguatan sektor pariwisata bertujuan untuk mendorong peningkatan nilai tambah perekonomian. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2024, Kota Tomohon menjadi salah satu dari tujuh *Key Tourism Area* (KTA) Manado-Likupang dengan 24 daerah tujuan wisata. Adapun karakter dan tema pengembangan KTA Tomohon sebagai berikut:

Tabel 2.6. Karakteristik dan Tema Pengembangan KTA Kota Tomohon

Key Tourism Area	Karakteristik	Tema Pengembangan KTA
Tomohon	• Kota bunga dengan festival bunga yang mendunia	*The High Land Flower in North Sulawesi*

Key Tourism Area	Karakteristik	Tema Pengembangan KTA
	• Ragam atraksi wisata alam dataran tinggi berhawa sejuk • Kota rohani bersejarah • Amenitas bertumbuh pesat • Dekat dengan Kota Manado	

Sumber: Perpres Nomor 16 Tahun 2024

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Tomohon selain Bunga Krisan, Hortikultura (sayur-mayur) dan pariwisata yang akan menggerakkan perekonomian Kota Tomohon, tentunya produk-produk unggulan lainnya sebagaimana dibahas dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kota Tomohon.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam laporan KLHS, daya dukung Kota Tomohon akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kota Tomohon. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air dan pangan di wilayah Kota Tomohon dengan pendekatan jasa ekosistem.

Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup di Kota Tomohon mempertimbangkan peta wilayah perencanaan, peta wilayah fungsional dan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Tomohon. Perencanaan pengembangan wilayah terpadu antara bagian hulu dan bagian hilir penting untuk dilakukan karena dalam jangka panjang apabila terjadi kerusakan atau tidak terjadinya keterpaduan dalam perencanaan di daerah hulu maka akan berdampak juga pada bagian hilir.

Ambang batas Jasa Lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kota Tomohon yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup

(DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UUPPLH No.32/2009). Penetapan status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kota Tomohon menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air.

i. Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Data yang digunakan dalam perhitungan Daya dukung pangan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten/kota. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Kota Tomohon adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan energi bahan pangan di wilayah tersebut. Total energi pangan merupakan total produksi bahan pangan di tiap kabupaten/kota yang dikonversikan menjadi satuan energi atau kilo kalori (kkal). Energi untuk tiap jenis bahan pangan masing-masing berbeda. Untuk dapat menghitung ketersediaan pangan, data yang diperlukan adalah total produksi pangan untuk masing-masing jenis bahan pangan.

Tabel 2.7 Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Pangan Kota Tomohon

KECAMATAN	Ketersedian (m3/Tahun)	Kebutuhan (m3/Tahun)	Selisih (m3/Tahun)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Status Daya Dukung	
					Belum Melampaui	Melampaui
Tomohon Barat	2.302.241.205,92	12.804.765.750,00	-10.502.524.544,08	2437	3.405,10	978,05
Tomohon Selatan	1.811.873.730,55	19.678.391.000,00	-17.866.517.269,45	1911	2.307,87	1.160,40
Tomohon Tengah	900.461.340,16	14.703.860.750,00	-13.803.399.409,85	981	879,66	771,94
Tomohon Timur	759.005.923,64	8.702.877.500,00	-7.943.871.576,36	790	754,84	643,98
Tomohon Utara	3.137.759.103,54	20.203.388.750,00	-17.065.629.646,46	3325	4.836,97	1.167,63
Kota Tomohon	**8.911.341.303,81**	**76.093.283.750,00**	**-67.181.942.446,19**	**9444**	**12.184,44**	**4.722,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

ii. Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air kabupaten/kota perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Data yang diperlukan adalah debit wilayah sungai tahunan. Total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air wilayah sungai dan total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air kabupaten/kota.

Tabel 2.8 Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air Kota Tomohon

KECAMATAN	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Selisih (m3/Tahun)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Status D3TLH Air	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
Tomohon Barat	48.164.276,73	28.381.208,50	19.783.068,23	245.271	3.528,41	854,74
Tomohon Selatan	40.821.444,26	19.376.380,32	21.445.063,95	273.247	3.258,91	209,36
Tomohon Tengah	21.870.104,32	6.304.995,81	15.565.108,51	198.944	1.585,37	66,23
Tomohon Timur	16.581.505,88	5.313.380,05	11.268.125,84	141.550	1.354,23	44,60
Tomohon Utara	68.948.712,40	19.269.165,17	49.679.547,23	601.205	5.065,24	939,36

Sumber: KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

iii. Jasa Eksositem

a. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan.

Tabel 2.9. Jasa Lingkungan Penyedia Air Kota Tomohon

KECAMATAN	INDEKS JASA EKOSISTEM (Ha)				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tomohon Barat	439,81	2.368,85	1.544,48	14,90	15,10
Tomohon Selatan	38,61	2.132,84	1.238,91	9,34	48,57
Tomohon Tengah	63,98	679,67	897,97	1,50	8,48
Tomohon Timur	151,41	848,36	399,06		
Tomohon Utara	1.319,27	2.168,63	2.497,17	4,41	15,12
Kota Tomohon	**2.013,09**	**8.198,35**	**6.577,59**	**30,15**	**87,27**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon , 2025

Grafik 2.1. Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Berdasarkan tabel, grafik, dan peta di atas, dapat dideskripsikan bahwa IJE penyedia Air Kota Tomohon adalah sangat rendah hingga sedang, walaupun ada beberapa lokasi yang mempunyai IJE tinggi, yang merupakan penutup lahan jenis badan air (danau). Hal ini bisa saja terjadi akibat bentuklahan gunung api yang menjadi bentuklahan moyoritas di kota tomohon yang mempunyai sifat permeable dan mudah meloloskan air ke masuk dalam tanah, sehingga sedikit air yang tertahan di permukaan.

Gambar 2.5. Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Penyedia

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

b. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Jasa lingkungan memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Secara umum, kota Tomohon mempunyai IJE Penyedia pangan yang tinggi. 72% dari luas wilayah Kota Tomohon mempunyai IJE pangan yang Tinggi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa lahan-lahan pertanian di Kota Tomohon masih sangat mendominasi, serta produktivitasnya cukup tinggi.

Tabel 2.10. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Tomohon

KECAMATAN	INDEKS JASA EKOSISTEM (Ha)				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tomohon Barat	0,00	264,70	6,95	3.782,12	329,38
Tomohon Selatan	0,00	459,37	1.105,90	1.801,27	101,74
Tomohon Tengah	0,00	295,39	635,72	688,25	32,25
Tomohon Timur	0,00	126,77	164,96	1.103,22	3,88
Tomohon Utara	0,00	618,61	323,52	4.882,83	179,64
Kota Tomohon	0,00	**1.764,83**	**2.237,05**	**12.257,69**	**646,88**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Grafik 2.2. Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Gambar 2.6. Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

c. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan. ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Tabel 2.11. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Kota

KECAMATAN	INDEKS JASA EKOSISTEM (Ha)				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tomohon Barat	244,19	3.243,57	712,25	181,42	1,72
Tomohon Selatan	459,37	2.942,78	9,34	56,78	
Tomohon Tengah	295,39	1.127,67	1,73	226,81	
Tomohon Timur	126,77	1.081,64		190,42	
Tomohon Utara	595,29	3.491,62	129,83	1.787,08	0,77
Kota Tomohon	**1.721,00**	**11.887,28**	**853,15**	**2.442,51**	**2,50**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Grafik 2.3. Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Gambar 2.7. Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, kota Tomohon secara umum mempunyai IJE Tata Air yang rendah, dengan cakupan wilayah hingga 11.887 Ha atau hampir 70% dari luas wilayah. Sementara itu, jenis pemanfaatan lahan yang mempunyai jasa lingkungan sangat rendah ada pada permukiman. Hal ini dapat disebabkan karena permukiman mempunyai potensi limbah domestic yang besar, serta banyak permukaan yang bersifat impermeable, sehingga meningkatkan potensi aliran permukaan serta banjir perkotaan.

d. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Tabel 2.12. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kota Tomohon

KECAMATAN	INDEKS JASA EKOSISTEM (Ha)				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tomohon Barat	0,23	296,87	3.898,05	188,00	
Tomohon Selatan	0,63	512,97	2.888,54	57,91	8,21
Tomohon Tengah	1,54	307,77	1.113,98	198,66	29,65
Tomohon Timur	45,39	83,44	1.079,58	188,25	2,17
Tomohon Utara	228,13	445,14	3.540,34	1.782,18	8,80
Kota Tomohon	**275,93**	**1.646,19**	**12.520,49**	**2.415,00**	**48,83**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Grafik 2.4. Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Kota Tomohon mempunyai IJE Pengatur iklim dengan tingkat sedang yang mendominasi seluruh wilayah yakni 74% dari luas wilayah, atau seluas 12.520 Ha. Hal ini bisa gambarkan melalui kondisi penutup lahan di mana hutan yang sudah tidak lebih dari 14% dari luas wilayah. Hutan mempunyai fungsi ekologis yang sangat besar bagi kontrol iklim, baik iklim mikro di bawah tegakan hutan itu sendiri, maupun iklim regional dalam sistem fungsional suatu wilayah, bahkan secara global mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam meregulasi kondisi iklim.

Gambar 2.8. Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Sumber: *Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025*

e. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Longsor

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Tabel 2.13. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Longsor Kota

KECAMATAN	INDEKS JASA EKOSISTEM (Ha)				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tomohon Barat	0,23	766,04	3.397,55	189,33	30,00
Tomohon Selatan	0,63	570,28	2.816,13	15,11	66,12
Tomohon Tengah	1,54	532,94	874,88	232,35	9,88
Tomohon Timur	45,39	795,21	365,76	192,48	
Tomohon Utara	226,07	2.932,24	1.041,91	1.786,18	18,20
Kota Tomohon	**273,86**	**5.596,70**	**8.496,23**	**2.415,45**	**124,20**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Grafik 2.5. Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Longsor

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Bencana longsor mempunyai dampak yang luas biasa terhadap kegiatan manusia. Penyebab longsor sangat bisa meliputi beberapa faktor, bisa karena faktor internal/genetic, maupun faktor eksternal. Kota Tomohon mempunyai IJE Mitigasi Longsor yang sedang hingga rendah yang cukup mendominasi. Bagian bentuklahan yang cenderung datar-landai di dalam pusat kota mempunyai IJE sedang, sedangkan bagian luar kota cenderung rendah. Hal ini karena bentuklahan genetik gunung api di kota Tomohon mempunyai karakter tanah yang tebal serta kemiringan lereng yang curam.

Gambar 2.9. Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Longsor

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

f. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Banjir

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari banjir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi datar.

Tabel 2.14. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Banjir Kota Tomohon

KECAMATAN	INDEKS JASA EKOSISTEM (Ha)				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tomohon Barat	62,20	2.130,17	2.017,68	159,72	13,38
Tomohon Selatan		1.818,11	1.593,37	3,75	53,03
Tomohon Tengah	178,20	1.049,84	196,74	188,68	38,13
Tomohon Timur	653,20	398,10	157,11	188,25	2,17
Tomohon Utara	1.676,69	2.271,11	269,11	1.764,55	23,14
Kota Tomohon	**2.570,30**	**7.667,34**	**4.234,01**	**2.304,95**	**129,85**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon,2025

Grafik 2.6. Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Banjir

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

IJE mitigasi banjir kota tomohon sangat rendah hingga rendah, dan mencakup 61% luas wilayah, atau seluas 10.237 ha. Hal ini disebabkan oleh kombinasi bentuk lahan, jenis vegetasi alami dan

penutup lahan yang tidak bisa mengatur dengan baik limpasan permukaan.

Gambar 2.10 Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Banjir

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

g. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Lahan

Ekosistem yang memiliki kemampuan untuk "membersihkan" pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurniah air secara alami (self purification) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Tabel 2.15. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

KECAMATAN	INDEKS JASA EKOSISTEM (Ha)				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tomohon Barat	244,19	3.243,57	712,25	181,42	1,72
Tomohon Selatan	459,37	2.942,78	9,34	56,78	
Tomohon Tengah	295,39	1.127,67	1,73	226,81	
Tomohon Timur	126,77	1.081,64		190,42	
Tomohon Utara	595,29	3.491,62	129,83	1.787,08	0,77
Kota Tomohon	**1.721,00**	**11.887,28**	**853,15**	**2.442,51**	**2,50**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Grafik 2.7. Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, kota Tomohon secara umum mempunyai IJE Pengaturan Pemurnian Air yang rendah, dengan cakupan wilayah hingga 11.887 Ha atau hampir 70% dari luas wilayah. Sementara itu, jenis pemanfaatan lahan yang mempunyai jasa lingkungan sangat rendah ada pada permukiman. Hal ini dapat disebabkan karena permukiman mempunyai potensi limbah domestik yang besar, serta banyak permukaan yang bersifat impermeable, sehingga meningkatkan potensi aliran permukaan serta banjir perkotaan.

Gambar 2.11 Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tomohon, 2025

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan

Untuk memastikan kemandirian menuju kedaulatan pangan didukung dengan ketahanan energi dan air. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Grafik 2.8. Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tomohon

Sumber: Badan Pangan Nasional

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tomohon dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 capaian IKP sebesar 83,92, meningkat dibandingkan tahun 2020 (79,44).

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kecukupan gizi penduduk adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

atau yang dikenal dengan istilah *Prevalence Of Undernourishment* (PoU). Capaian PoU di Kota Tomohon dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021, PoU sebesar 5,43 atau 5.499 jiwa, menurun di tahun 2022 sebesar 3,24% atau 3.311 jiwa, dan tahun 2023 PoU sebesar 3,75% atau sekitar 3.865 jiwa.

Tabel 2.16. *Prevalence Of Undernourishment* (PoU) Kota Tomohon

Tahun	PoU	Jumlah Jiwa
2021	5,43%	5.499
2022	3,24%	3.311
2023	3,75%	3.865
2024	4,15%	4.180

Sumber: Badan Pangan Nasional

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Jumlah Penduduk Miskin (JPM) memiliki pengaruh terhadap Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan. Jumlah penduduk miskin (JPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

Konsumsi Listrik per kapita

Dari sisi ketersediaan energi listrik, rasio elektrifikasi di Kota Tomohon pada tahun 2024 sebesar 99,93%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Tomohon sudah teraliri listrik. Sedangkan untuk konsumsi listrik per kapita sebesar 1742 kwh/kapita.

Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak merupakan salah satu indikator utama dalam pemenuhan layanan dasar dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Untuk cakupan air bersih di Kota Tomohon, pada tahun 2022 sebesar 49,44%, meningkat tahun 2023 sebesar 49,92% dan tahun 2024 sebesar 50,58%.

Grafik 2.9. Capaian Cakupan Air Bersih Kota Tomohon

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2025

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Grafik 2.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tomohon Tahun 2022-2024

Sumber: DLH Kota Tomohon, 2025

Berdasarkan capaian IKA, IKU dan ITL Tahun 2022-2024, memberi dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kota Tomohon yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 sebesar 67,72 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), meningkat lebih baik di atas capaian tahun 2023 sebesar 63,12. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian adalah meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan, namun pada capaian kualitas air masih belum optimal. IKLH Kota Tomohon dari tahun ke tahun menunjukkan trend membaik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun capaian tersebut masih berada pada ambang batas klasifikasi cukup baik dengan klasifikasi kurang baik sehingga harus dijaga agar capaian IKLH tidak semakin buruk.

Akses Sanitasi

Akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator kunci pembangunan layanan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan produktivitas ekonomi daerah. Pemantauan capaian persentase sambungan rumah tangga (SR) yang memiliki akses sanitasi layak di Kota Tomohon memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan hak dasar penduduk terhadap fasilitas sanitasi yang memadai.

Grafik 2.11. Capaian Sanitasi Layak Kota Tomohon

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2025

Selama periode 2022-2024 capaian sanitasi layak di Kota Tomohon pada tahun 2022 sebesar 98,77, kemudian tahun 2023 sebesar

98,22, dan tahun 2024 sebesar 95,82. Untuk akses sanitasi aman baru tersedia data pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,4%.

Proporsi Timbulan Sampah Tertangani / Terolah di Fasilitas TPA

Pengelolaan sampah di Kota Tomohon menghadapi tantangan signifikan seiring dengan peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon menunjukkan bahwa produksi sampah pada tahun 2024 mencapai 18.747,13 ton, dengan volume sampah yang tertangani di fasilitas TPA hanya sebesar 72,04% dari total produksi.

Tabel 2.17. Persentase Timbulan Tertangani/Terolah di Fasilitas TPA

Tahun	Perkiraan Produksi Sampah	Timbulan Sampah Tertangani/Terolah Di Fasilitas TPA	Persentase (%)
2020	16.596,85	13.505	81,3
2021	18.669,2	13.760,5	74,24
2022	18.510,43	13.870	74,93
2023	18.747,13	13.687,5	73,01
2024	18.747,13	13.505	72,04

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon, 2025

Untuk persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah pada tahun 2024 sebesar 71,79%. Pengelolaan sampah di Kota Tomohon dalam 3 tahun mengalami penurun. Hal ini disebabkan diantaranya keterbatasan armada / sarana prasarana yang perlu untuk direvitalisasi serta terbatasnya para petugas kebersihan.

Grafik 2.12. Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Tomohon

Sumber: https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/capaian

2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara tropis yang memiliki banyak potensi ancaman bencana yang disebabkan kondisi alamnya, termasuk Kota Tomohon. Kondisi geografis. Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Kota Tomohon yang berada di daerah pertemuan 3 bagian utama lempengan kerak bumi yakni Lempengan Eurasia, Lempengan Pasifik, dan Lempengan Phillipine yang menyebabkan Kota Tomohon rentan terhadap berbagai potensi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah dan longsor dan banjir.

Indeks Risiko Bencana

Dalam 4 tahun terakhir, Kota Tomohon merupakan salah satu daerah dengan Indeks Resiko Bencana kategori sedang di Provinsi Sulawesi Utara, yang secara agregat mengalami penurunan resiko setiap tahunnya.

Grafik 2.13 Trend Indeks Resiko Bencana Kota Tomohon

Sumber: *https://inarisk.bnpb.go.id/irbi*

Berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) sebaran rawan bencana di Kota Tomohon yaitu Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Kawasan Rawan Bencana Kerentanan Gerakan Tanah dan Longsor, Kawasan Rawan Bencana Gunung Api, dan Kawasan Rawan Bencana Banjir.

Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah

administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Berdasarkan data dari BNPB, pada tahun 2024 Kota Tomohon belum melakukan penilaian.

2.1.1.7. Demografi

Dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting. Diperlukan komponen penduduk yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kota Tomohon Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Tomohon tahun 2024 sebanyak 103.812 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah di Kecamatan

Tomohon Utara (28,53%), sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Tomohon Timur (10,86%). Adapun sebaran penduduk berdasarkan kecamatan disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Sebaran Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tomohon Selatan	24.082	24.920	25.046	25.903	26.310
Tomohon Tengah	18.772	18.860	18.955	18.878	18.938
Tomohon Timur	11.428	11.420	11.415	11.158	11.248
Tomohon Barat	16.941	17.048	17.160	17.479	17.622
Tomohon Utara	28.644	28.605	28.575	29.306	29.694
Kota Tomohon	**100.587**	**100.853**	**101.151**	**102.724**	**103.812**

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu mengalami peningkatan sebesar 151,4% jika dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2021-2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk			
	2021	2022	2023	2024
Tomohon Selatan	1,59	1,59	2,09	1,39
Tomohon Tengah	1,59	1,59	0,19	-0,10
Tomohon Timur	1,04	1,04	0,68	0,56
Tomohon Barat	1,75	1,75	1,52	0,82
Tomohon Utara	0,98	0,98	1,36	0,73
Kota Tomohon	**0,35**	**0,32**	**0,89**	**0,88**

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Kepadatan penduduk pada tahun 2024 sebanyak 615 jiwa/km^2 dimana Kecamatan Tomohon Tengah dengan kepadatan penduduk terbanyak yaitu sebesar 2.013 jiwa/km^2.

Grafik 2.14. Kepadatan Penduduk Kota Tomohon

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Rasio Penduduk

Komposisi penduduk Kota Tomohon menurut jenis kelamin selama menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki–laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan tetapi tidak signifikan.

Tabel 2.20 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tomohon per Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2020-2023

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tomohon Selatan	102,1	102	102	102,64	102,5
Tomohon Tengah	97,2	97	97	98,74	98,7
Tomohon Timur	109	101	101	101,08	104,5
Tomohon Barat	105,7	106	106	104,12	103,9
Tomohon Utara	103,8	104	104	104,55	100,9
Kota Tomohon	**102,1**	**102**	**102**	**102,53**	**102,4**

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2024

Dari sisi *sex ratio*, jumlah penduduk laki-laki di Kota Tomohon lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Dari sisi *sex ratio* ini sangat jelas bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus dioptimalkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan keluarga untuk pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2024 yang mencapai 68.17% (69.044 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif

sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan.

Grafik 2.15. Piramida Penduduk Kota Tomohon

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2024

Proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah fertilitas, mortalitas dan migrasi berada pada tingkat tertentu. Dengan Proyeksi penduduk maka kita dapat memperhitungkan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Tujuan penyusunan proyeksi penduduk adalah untuk menyajikan data kependudukan yang berisi gambaran keadaan jumlah, struktur dan komposisi penduduk pada waktu mendatang; dan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Proyeksi Penduduk

Berdasarkan RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045, maka proyeksi jumlah penduduk di Kota Tomohon pada tahun 2025 sebanyak 104.820 jiwa dan pada tahun 2030 meningkat menjadi 108.720 jiwa.

Tabel 2.21 Proyeksi Penduduk Kota Tomohon

Jenis Kelamin	Tahun 2025	Tahun 2030
Laki-laki	52.830	54.600
Perempuan	51.990	54.120

Jenis Kelamin	Tahun 2025	Tahun 2030
Total	104.820	108.720
Rasio	101,62	100,87

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045

Melihat rasio yang ada maka jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan meskipun jumlahnya tidak signifikan berbeda.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan kegiatan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan peningkatan kapasitas produktif, kesempatan kerja, daya beli, dan peran pemerintah terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang disertai oleh pemerataan dan menurunnya tingkat kemiskinan. Perkembangan PDRB merupakan ukuran yang digunakan dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.22 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon Tahun 2021-2024

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,87	13,91	14,02	14,34
Pertambangan dan Penggalian	9,16	9,84	9,16	9,03
Industri Pengolahan	6,47	6,58	6,53	6,51
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,22	0,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,39	0,36	0,37
Konstruksi	21,5	20,52	20,36	19,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,87	11,11	11,51	11,76
Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,47	5,91	6,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,84	1,9	1,99	2,05
Informasi dan Komunikasi	3,8	3,85	3,86	3,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	1,99	1,82	1,77
Real Estate	3,86	3,75	3,67	3,7
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,06

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,86	6,52	6,33	6,45
Jasa Pendidikan	2,85	2,94	3,05	3,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,57	8,61	8,68	8,62
Jasa lainnya	2,25	2,34	2,47	2,6
PDRB	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Struktur perekonomian Kota Tomohon selama empat tahun didominasi oleh sektor Konstruksi, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.

Grafik 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 5,17 persen. Tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,74 persen. Secara umum perekonomian di Kota Tomohon dipengaruhi oleh produksi komoditas barang dan jasa. Selain itu ada berbagai program Pemerintah yang dilaksanakan di tahun 2023 sebagai upaya untuk mendorong percepatan pemulihan dan membangkitkan perekonomian Masyarakat pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang cepat ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya meningkatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang memiliki peran besar (*leading sectors*) pada perekonomian Kota Tomohon tahun 2023.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). PDRB Pengeluaran menggambarkan

aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Dalam kurun 5 tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kota Tomohon terus berfluktuasi . Tetapi persentase penduduk miskin masih berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional.

Grafik 2.17. Angka Kemiskinan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
Provinsi	7,66	7,62	7,77	7,28	7,38	7,25
Tomohon	5,62	5,6	5,69	5,26	5,6	5,38

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

PDRB per Kapita

Secara total, PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku di tahun 2024 sebesar 56.563.000 rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 52.853.000 juta rupiah.

Grafik 2.18. PDRB per Kapita ADHB Kota Tomohon (Ribu Rupiah)

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Kondisi perekonomian Kota Tomohon periode 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu tumbuh 6,76 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon mengalami penurunan sebesar 0,41 persen, penurunan tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Perekonomian Kota Tomohon mulai membaik pada tahun tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen pada tahun 2021 dan 5,17 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini dipicu salah satunya dari membaiknya daya beli masyarakat pasca pandemi.

Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS untuk ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa jumlah Angkatan kerja di Kota Tomohon pada tahun 2023 sebanyak 46.835 jiwa, dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.364 jiwa.

Grafik 2.19. Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2024

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tomohon cukup tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di tingkat Nasional.

Grafik 2.20. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara

	2020	2021	2022	2023	2024
Tomohon	8,99	8,84	8,11	8,52	7,79
Provinsi	7,37	7,06	6,61	6,1	5,85

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Kualitas Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kekuatan SDM suatu wilayah. Kota Tomohon dikenal sebagai Kota pusat Pendidikan, sehingga diharapkan memiliki keunggulan bukan hanya dalam hal kuantitas tetapi juga kualitas. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development*).

Rasio Gini

Pemerataan pendapatan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*Inclusive Economics Growth*). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang didiringi oleh pemerataan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan merupakan masalah utama dalam pembangunan. Gini rasio merupakan salah indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Grafik 2.21. Gini Rasio Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2024

Selama tahun 2021 – 20243 gini rasio Kota Tomohon berfluktuasi dan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Gini rasio Kota Tomohon 0,3541 pada tahun 2021 menjadi 0,34 pada tahun 20243. Kinerja gini rasio Kota Tomohon juga lebih baik dibandingkan provinsi Sulawesi Utara. Secara rata-rata pada periode 2021 – 2024 capaian gini rasio Kota Tomohon sebesar 0,334 lebih rendah dibanding provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,368. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Tomohon masuk dalam kategori rendah.

Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi umum kesejahteraan indikator Kota Tomohon dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan. Setelah dilaksanakan sensus penduduk tahun 2020, maka BPS menggunakan metode baru dalam perhitungan IPM, indikator umur harapan hidup menggunakan hasil Long Form SP2020.

Grafik 2.22. Capaian IPM Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2021 - 2024

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Capaian indikator-indikator IPM Kota Tomohon dalam 5 tahun terakhir cukup tinggi, sudah berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Utara bahkan di atas rata-rata Nasional.

Tabel 2.23 Perkembangan Indikator IPM Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

INDIKATOR		2021	2022	2023	2024	Rata-rata
AHH (tahun)	Tomohon	74,60	74,93	75,28	75,57	74,87
	Provinsi	74,03	74,52	75,04	75,68	74,82
HLS (tahun)	Tomohon	14,21	14,23	14,24	14,38	14,22
	Provinsi	12,94	12,95	12,96	12,97	12,925
RLS (tahun)	Tomohon	10,74	10,75	10,99	11,03	10,80
	Provinsi	9,62	9,68	9,77	9,84	9,64
Pengeluaran (Ribu Rp.)	Tomohon	11.851	12.268	12.488	13.045	12.088
	Provinsi	10.882	11.179	11.497	11.998	11.087

Sumber: Data olahan, 2025

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indikator-indikator pembentuk IPM Kota Tomohon mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Umur Harapan Hidup

Dalam kurun 4 tahun terakhir, umur harapan hidup Kota Tomohon terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 UHH sebesar 75,57 tahun meningkat dari tahun 2021 sebesar 74,6 tahun atau meningkat rata-rata 2,5% per tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

Grafik 2.23. Umur Harapan Hidup di Kota Tomohon

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Penyakit Tidak Menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Prevalensi Stunting

Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Pencegahan dan

penurunan stunting terus dilakukan Pemerintah Kota Tomohon dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing-masing kelompok sasasaran.

Adapun capaian prevalansi stunting di Kota Tomohon dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan, bahkan sudah berada di bawah target Nasional. Pada tahun 2024 prevalansi stunting sebesar 10,8%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,5%, dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 13,77%. Capaian prevalansi stunting ini merupakan yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 2.24 Prevalensi Stunting di Kota Tomohon

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya.

Grafik 2.25. Angka Kematian Ibu di Kota Tomohon

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2025)

Sedangkan secara absolut jumlah kematian ibu diperlihatkan dalam grafik berikut

Grafik 2.26. Jumlah Kematian Ibu di Kota Tomohon

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2025)

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Grafik 2.27. Angka Kematian Bayi di Kota Tomohon

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2025)

Sedangkan secara absolut jumlah kematian bayi diperlihatkan dalam grafik berikut

Grafik 2.28. Jumlah Kematian Bayi di Kota Tomohon

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2025)

Kondisi tatakelola pelayanan AIDS, Tuberkulosis, Malaria (ATM)

Capaian Program ATM Kota Tomohon tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.24 Capaian Program ATM Kota Tomohon

Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2022	2023	2024
Orang terduga menderita TBC yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita TBC yang mendapatkan pelayanan	407	878	3929
Penderita TBC	Orang	Jumlah orang dengan TBC	416	464	449
Penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah orang menderita TBC yang mendapatkan pelayanan	416	464	449
Penderita HIV (ODHIV)	Orang	Jumlah penderita HIV (ODHIV)	78	67	89
Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	78	67	89
Orang beresiko terjangkit malaria		Jumlah Orang beresiko terjangkit malaria	101.000	101.000	101.000

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2025)

Capaian indikator ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak terlebih dari GF dan Pemerintah Pusat (DAK) yang memberikan anggaran untuk proses dan pelaksanaan kegiatan, Pencapaian indikator penyakit AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria di kota Tomohon seringkali menghadapi berbagai permasalahan

dan kendala yang kompleks. Penyakit-penyakit ini, yang dikenal sebagai tiga penyakit menular utama, memerlukan pendekatan holistik dan multi-sektoral untuk pengendaliannya.

Berikut adalah Permasalahan dan Kendala Pencapaian Indikator Penyakit AIDS, TB, dan Malaria Pemerintah kota Tomohon dan fasilitas kesehatan terus berupaya mencapai target indikator kesehatan terkait AIDS, TB, dan Malaria, namun perjalanan ini tidaklah mudah. Berbagai faktor saling berkaitan, menciptakan hambatan yang signifikan yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu kendala paling mendasar adalah keterbatasan sumber daya. Ini mencakup:

- Anggaran yang tidak memadai seringkali menghambat pengadaan, reagen diagnostik, dan peralatan medis, Program pencegahan dan penyuluhan serta promosi kesehatan pun jadi terhambat.

Tabel 2.25 Pagu dan Realisasi Anggaran ATM

ANGGARAN ATM DINAS KESEHATAN							
No	Sub Kegiatan ATM	2023		2024		2025	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	DINKES	REALISASI
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24,975,000	21,280,000	127,705,300	126,526,800	85,725,000	-
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	66,500,000	-
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1,566,100	1,566,100	-	-	42,825,000	-
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2,493,600	2,493,600	-	-	10,920,000	-
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2,962,900	2,962,900	-	-	600,000	-

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon (2025)

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam penganggaran terkait ATM adalah kemampuan Pendapatan.

- Tenaga Kesehatan: Kekurangan tenaga ahli laboratorium yang terlatih khusus dalam penanganan AIDS, TB, dan Malaria sangat terasa, terutama di puskesmas atau fasilitas kesehatan primer. Beban kerja yang tinggi dapat menurunkan kualitas pelayanan.
- Infrastruktur: Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk laboratorium dengan peralatan diagnostik yang akurat, masih menjadi tantangan.

2. Tantangan Diagnostik dan Pengobatan

Proses diagnostik dan pengobatan juga memiliki kendala tersendiri:

- Akses ke Layanan Diagnostik: Banyak warga masih enggan mengakses layanan diagnostik. Ini menyebabkan keterlambatan dalam penemuan kasus dan penularan yang lebih luas.
- Resistensi Obat: Terutama pada TB, munculnya kasus TB resisten obat (MDR-TB dan XDR-TB) menjadi ancaman serius. Pengobatannya jauh lebih kompleks, memakan waktu lebih lama, dan membutuhkan regimen obat yang lebih mahal dengan efek samping yang lebih berat.
- Kepatuhan Pengobatan: Untuk AIDS dan TB, kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat secara teratur selama jangka waktu yang panjang seringkali rendah. Faktor-faktor seperti efek samping obat, stigma, kurangnya dukungan keluarga, atau kesulitan ekonomi dapat menyebabkan putus obat, yang berakibat pada kegagalan pengobatan dan berkembangnya resistensi.

3. Masalah Sosial dan Perilaku

   Faktor sosial dan perilaku memegang peranan penting:

   - Stigma dan Diskriminasi: Stigma yang melekat pada AIDS dan TB membuat banyak penderita enggan untuk mencari pengobatan atau bahkan mengakui status kesehatannya. Ketakutan akan diskriminasi di lingkungan kerja atau sosial dapat menghambat upaya penemuan kasus aktif.
   - Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran: Masyarakat masih banyak yang kurang memahami cara penularan, gejala, pencegahan, dan pentingnya pengobatan dini untuk ketiga penyakit ini. Hal ini berdampak pada perilaku berisiko dan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis.
   - Mobilitas Penduduk: Arus urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi di perkotaan menyulitkan pelacakan kontak, pemantauan kasus, dan kesinambungan pengobatan, terutama untuk penyakit seperti TB.
   - Gaya Hidup dan Lingkungan: Gaya hidup tertentu dan kondisi lingkungan yang padat penduduk, sanitasi buruk, atau kurangnya ventilasi di pemukiman kumuh dapat meningkatkan risiko penularan TB. Demikian pula,

lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk dapat memperburuk kasus Malaria.

4. Koordinasi dan Sistem Kesehatan

Dari sisi koordinasi dan sistem kesehatan:

- Integrasi Layanan: Kurangnya integrasi layanan AIDS, TB, dan Malaria dengan layanan kesehatan primer lainnya seringkali menyebabkan penemuan kasus yang terpecah-pecah dan penanganan yang tidak komprehensif.
- Sistem Pencatatan dan Pelaporan: Sistem pencatatan dan pelaporan data yang belum optimal dapat menyebabkan data yang tidak akurat atau tidak mutakhir, sehingga menyulitkan evaluasi program dan perencanaan intervensi yang tepat sasaran.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Pengendalian penyakit ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dengan pendidikan, sosial, perumahan, dan sektor lain untuk mengatasi akar permasalahan.

Mengatasi permasalahan dan kendala ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah Kota Tomohon, dukungan masyarakat, serta kerja sama erat antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, untuk mencapai target di Tahun 2030, tanpa upaya terpadu dan berkelanjutan, pencapaian indikator kunci untuk AIDS, TB, dan Malaria akan terus menjadi tantangan signifikan.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas dan Merata

Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dalam kurun 5 tahun, rata-rata lama sekolah di Kota Tomohon terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 mencapai angka 11,0399 tahun artinya minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin

meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Tomohon bersekolah di tingkat SMA kelas 2.

Grafik 2.29. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tomohon

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Upaya peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Tomohon perlu dilakukan dengan upaya menekan angka putus sekolah, keikutsertaan dalam pendidikan kesetaraan dan pemberian bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir angka harapan lama sekolah di Kota Tomohon terus meningkat. Pada tahun 2024 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon sebesar 14,38 tahun yang berarti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selam 14,38 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma II.

Grafik 2.30. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tomohon

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2024

Angka Literasi dan Numerasi

Capaian kemampuan literasi peserta didik untuk SD Umum dan SMP Umum dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dan berada dalam kategori Sedang.

Grafik 2.31 Capaian Kemampuan Literasi Peserta Didik SD dan SMP Umum Kota Tomohon

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud RI, 2025

Capaian kemampuan numerasi peserta didik SD dan SMP masih berada dalam kategori Rendah (SD) dan Sedang (SMP) meskipun dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Grafik 2.32 Capaian Kemampuan Numerasi Peserta Didik SD dan SMP Umum Kota Tomohon

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud RI, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah membina dan mengembangkan perpustakaan. Dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tomohon dalam 2 tahun terakhir menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2023 sebesar 67,23 dan tahun 2024 menjadi 57,91. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu indikator keterukuran yaitu Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan.

Tabel 2.26 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tomohon

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
2023 (67,23)	0,4444	1	0,2472	0,0143	1	1	1
2024 (57,91)	0,5347	0,1797	0,3396	1	1	-	1

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Utara,2025

Indeks Masyarakat Digital

Capaian Indeks Masyarakat Digital Kota Tomohon dalam 3 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2022 sebesar 45,63 (Kategori Cukup), turun pada tahun 2023 menjadi sebesar 43,37

(Kategori Cukup) dan meningkat kembali tahun 2024 sebesar 45,11 (Kategori Cukup).

Tabel 2.27 Indeks Masyarakat Digital Kota Tomohon

Tahun	Nilai IMDI	Kategori IMDI	Pilar Infrastruktur & EKosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2022	45,63	Cukup	44,29	65,68	34,34	38,03
2023	43,37	Cukup	55,03	60,84	24,82	31,92
2024	45,11	Cukup	57,52	57,82	25,29	43,16

Sumber: https://imdi.sdmdigital.id/home

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Pada tahun 2024 capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baru sebesar 47,5% sedangkan untuk cakupan kepesertaan jaminan kesehatan daerah sebesar 98%. Dalam mewujudkan integrasi program-program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh perlu ditingkatkan melalui satu data tunggal yang terverifikasi dan tervalidasi secara berkala.

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial di Kota Tomohon didominasi oleh program jaminan / asuransi kecelakaan kerja (23,83%), diikuti oleh jaminan / asuransi kematian (23,23%), dan jaminan pensiunan / veteran (15,95%).

Grafik 2.33 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jaminan Sosial Tahun 2024 di Kota Tomohon

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, 2024

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Mayoritas masyarakat Tomohon adalah suku Tombulu yang merupakan sub-etnis dari suku Minahasa, tetapi terdapat pula suku Tontemboan yang mendiami ujung Utara kota Tomohon, tepatnya di wilayah Tinoor yang terdiri dari Desa Tinoor Satu dan Tinoor Dua. Penduduk di Tomohon beragama Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, dan Budha. Sejumlah besar rumah ibadah dapat ditemui di seluruh wilayah Kota Tomohon.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur untuk menilai dan memantau kerukunan umat beragama di Indonesia. IKUB juga digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Pengukuran IKUB baru sampai di tingkat Provinsi sehingga capaian IKUB Kota Tomohon menggunakan pendekatan capaaian IKUB Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.28 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,39	73,09	76,02	76,47

https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/

Capaian IKUB dalam 2 tahun terakhir berada dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan kehidupan umat beragama di Provinsi

Sulawesi Utara terjaga dengan baik yang terlihat dari aspek toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan daerah. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Tomohon terukur lewat IPK Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data kementerian Kebudayaan IPK Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 55,39 tahun 2024. Pengukuran IPK baru sampai di tingkat Provinsi. Perkembangan IPK Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.29 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,09	49,84	54,97	55,39	-

Sumber: ipk.kemendikbud.go.id

Pada tahun 2024, jumlah kelompok budaya yang aktif sebanyak 46 kelompok yang terdiri dari 14 sanggar seni musik dan 32 sanggar seni tari. Kelompok yang tidak aktif sebanyak 4 sanggar (1 sanggar seni musik dan 3 sanggar seni tari) atau sebanyak 92% kelompok masyarakat berpartisipasi terhadap pengembangan kebudayaan.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Perlindungan Anak

Pada tahun 2024, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan IPKA kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Kota Tomohon memiliki capaian persentase tertinggi pada IPA (70,49), IPHA (68,74) dan

IPKA (82,29). Kota Tomohon juga memiliki persentase tertinggi pada ketiga Klaster penyusun IPA yaitu Klaster I (Hak ipil dan Kebebasan) (57,84), Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) (91,37), dan Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) (88,01).

Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah menjadi tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. IKK memiliki rentang nilai indeks antara 0 -100. IKK dengan nilai kurang atau di bawah 50 berarti "kurang responsif gender dan hak anak", nilai antara 50 – 75 berarti "cukup responsif gender dan hak anak", dan nilai di atas 75 berarti "responsif gender dan hak anak". IKK Kota Tomohon terukur lewat capaian IKK Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai IKK di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan, baik dengan metadata lama maupun metadata baru. Dengan metadata lama, nilai IKK meningkat sebesar 0,09 poin, dari 77,14 persen pada tahun 2022 menjadi 77,23 persen pada tahun 2023. Sementara itu, dengan metadata baru, peningkatannya mencapai 0,21 poin, dari 77,97 persen (2022) menjadi 78,18 persen (2023). Pada tahun 2023, nilai IKK Provinsi Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKK nasional.Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 mencerminkan kualitas keluarga dalam kategori 'Responsif Gender dan Hak Anak'. Capaian untuk Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Tomohon tahun 2024 sebesar 69,51.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG mempunyai nilai antara 0 hingga 1, semakin besar nilai IKG berarti ketimpangan gender semakin besar. Capain IKG di Kota Tomohon merupakan salah satu yang terendah di Kabupaten / Kota

se Sulawesi Utara, bahkan berada di bawah rata-rata Provinsi. Pada tahun 2022 IKG sebesar 0,215, di tahun 2023 sebesar 0,155, dan di tahun 2024 sebesar 0,170.

Grafik 2.34. Indeks Ketimpangan Gender Kota Tomohon

Sumber: https://www.kemenpppa.go.id/

Indeks Pembangunan Gender

Sedangkan untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Kota Tomohon yang tertinggi di antara Kabupaten /Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2022 IPG sebesar 99, di tahun 2023 sebesar 99,32, dan di tahun 2024 sebesar 99,56.

Grafik 2.35 Pembangunan Gender Kota Tomohon

Sumber: https://www.kemenpppa.go.id/

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Tujuan IPP memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, merefleksikan capaian pembangunan pemuda, mengukur dan mengevaluasi potensi pemuda. IPP Kota Tomohon terukur lewat capaian IPP Provinsi Sulawesi Utara dengan tingkat IPP pada tahun

2024 sebesar 56,33. Skor ini meningkat dibandingkan dengan IPP tahun 2023, dengan rincian capaian domain pendidikan sebesar 70%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%, sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45%, dan domain partisipasi dan kepimimpinan sebesar 43,33%. Pengukuran IPK baru sampai di tingkat Provinsi.

Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda	50,17	52	53	53,33	56,33

Sumber: kemenpora.go.id

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing SDM

Pembangunan kualitas SDM merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan indeks pembangunan manusia Kota Tomohon sebesar 80,06, berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional. Berbagai pencapaian positif lainnya telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2024 sebesar 11,03 tahun (RLS) dan 14,38 tahun (HLS). Capaian Usia harapan hidup terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2024 mencapai 75,57 tahun.

Angka Ketergantungan

Melihat komposisi jumlah penduduk, maka jumlah penduduk produktif di Kota Tomohon, yaitu penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun (BPS) sebanyak 69.044 jiwa (68,17%), sedangkan sisanya adalah usia tidak produktif, yaitu penduduk di bawah 15 tahun dan diatas 64 tahun (versi BPS) sebanyak 33.302 jiwa (31,83%). Pada tahun 2024 capaian Angka Ketergantungan sebesar 47,33.

Tabel 2.31 Angka Ketergantungan Kota Tomohon

Kelompok Usia	Tahun 2025	Tahun 2030*
0 – 14 tahun	23.020	23.060
15 – 64 tahun	69.044	70.730
> 65 tahun	10.282	11.070
Angka ketergantungan	48,19	49,88

**RPJPD Kota Tomohon 2025-2045*

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Angka ketergantungan diproyeksikan meningkat pada tahun 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk non produktif yaitu kelompok usia 0 – 14 tahun dan lansia (> 65 tahun) mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memiliki peran krusial dalam transformasi struktur ekonomi daerah menuju orientasi nilai tambah dan hilirisasi komoditas unggulan. Peran sektor ini secara nominal dalam 3 tahun mengalami peningkatan sebesar 15,44%, meskipun kontribusi terhadap total PDRB belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Tabel 2.32 Rasio dan Nilai PDRB Industri Pengolahan Kota Tomohon

Tahun 2022-204

Tahun	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Milyar)	Total PDRB (Milyar)	Rasio (%)
2022	331,48	5.034,35	6,51
2023	355,84	5.447,69	6,53
2024	382,67	5.879,93	6,51

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Data ini mengindikasikan bahwa industrialisasi berbasis potensi lokal belum terkelola secara optimal. Keterbatasan skala usaha, infrastruktur industri, dan teknologi menjadi tantangan. Untuk itu, pengembangan sentra industri kecil dan menengah, fasilitasi sertifikasi halal, dan branding produk lokal berbasis kawasan menjadi strategi prioritas.

Rasio PDRB Akomodasi Dan Makan Minum

Sebagai kota tujuan wisata di Provinsi Sulawesi Utara, maka geliat sektor akomodasi dan makan minum menjadi salah satu penggerak perekonomian di Kota Tomohon.

Tabel 2.33 Rasio dan Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Tomohon Tahun 2022-2024

Tahun	Nilai PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Milyar)	Total PDRB (Milyar)	Rasio (%)
2022	95,55	5.034,35	1,89
2023	108,62	5.447,69	1,99
2024	120,76	5.879,93	2,05

Sumber: BPS Kota Tomohon, 2025

Peran sektor ini secara nominal dalam 3 tahun mengalami peningkatan sebesar 26,38%, meskipun kontribusi terhadap total PDRB belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja. Potensi penduduk untuk bekerja akan tinggi jika jumlah angkatan kerja juga tinggi. Semakin tingginya jumlah angkatan kerja, semakin rendah jumlah bukan angkatan kerja. Dalam 3 tahun terakhir, TPAK Kota Tomohon terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mencapai 57,90, meningkat menjadi 63,41 di tahun 2022 dan menjadi 63,64 di tahun 2023.

Indeks Inovasi Daerah

Dalam kaitannya dengan pembangunan, maka inovasi dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan. Capaian Indeks Inovasi Daerah berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebesar 8,64 (Kurang Inovatif), meningkat menjadi 46,80 (Inovatif) di tahun 2023, dan di tahun 2024 capaian sebesar 34,71 (Kurang Inovatif). Budaya berinovasi harus terus dikembangkan di Kota Tomohon.

Grafik 2.36 Indeks Inovasi Daerah Kota Tomohon

Sumber: Bapelitbangda Kota Tomohon

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Kota Tomohon berkomitmen dalam mengembangkan ekonomi hijau. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan pertanian organik. Peluang pertanian organik berkembang di Kota Tomohon didukung oleh adanya perhatian Pemerintah Kota Tomohon menjadikan Kota Tomohon sebagai Pusat Pengembangan Pertanian Organik di Sulawesi Utara, masih luasnya lahan pertanian yang dapat dikonversi menjadi lahan Pertanian Organik, serta adanya kecenderungan meningkatnya permintaan produk pertanian organik dari waktu ke waktu.

Tantangan dalam pengembangan Pertanian organik di Kota Tomohon adalah adanya dua gunung vulkanik (gunung Lokon dan gunung Mahawu) yang berpotensi merusak tanaman dan lahan pertanian, belum adanya pewilayahan khusus untuk pengembangan pertanian organik dan banyak petani hanya menyewa lahan kebun sementara areal pertanian organik yang ada dikelilingi areal pertanian konvensional, tidak tersedianya pupuk dan pestisida organik pada waktu dibutuhkan, dan belum adanya jaminan pasar setelah produk dipanen baik jumlah maupun harga.

Dengan terus memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Kota Tomohon optimis dapat mencapai target-target lingkungan yang telah ditetapkan dalam

pengembangan ekonomi hijau. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan momentum ini dan terus berinovasi dalam menghadapi dinamika lingkungan global yang terus berubah.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Perkembangan kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui dari ketersediaan website milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tomohon telah memiliki website resmi yang dapat diakses pada alamat https://www.tomohon.go.id/. Selain website, media penyebarluasan informasi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan adanya media sosial yaitu facebook, twitter, instagram dan youtube. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2024 sebesar 82,35%. Sedangkan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota pada tahun 2024 sebesar 80,05%.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah. Pembangunan teknologi informasi dan Komunikasi terukur lewat capaian IP-TIK Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,69	5,93	5,87	5,95	-

Sumber: kemenpora.go.id

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), adalah salah satu komponen kunci dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran. Ini menunjukkan seberapa besar nilai tambah baru dalam suatu perekonomian yang diinvestasikan kembali, bukan dikonsumsi. Adapun perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Tomohon Tahun 2020-2024 sebagaimana berikut.

Tabel 2.35 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah)

Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.728,24	1.815,55	1.876,59	1.883,97	784,34
Net Ekspor Barang dan Jasa	(831,59)	(910,17)	(872,78)	(793,54)	(1980,98)

Sumber : Tomohon Dalam Angka Kota Tomohon Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2020-2030 adanya tren Peningkatan. Dari tahun 2020 hingga 2023, Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Tomohon menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun laju peningkatannya cenderung melambat. Pada 2021, PMTB meningkat cukup signifikan sebesar 5,05% dari tahun sebelumnya, yang kemungkinan merupakan indikasi pemulihan ekonomi setelah dampak awal pandemi COVID-19 pada 2020. Peningkatan berlanjut pada 2022 (+3,36%) dan 2023 (+0,40%), menunjukkan adanya investasi yang terus berlanjut di Kota Tomohon, baik dari pemerintah (pembangunan infrastruktur) maupun sektor swasta (pembangunan gedung, pengadaan mesin, dll.). Laju pertumbuhan yang melambat pada 2023 bisa jadi karena beberapa proyek besar telah selesai atau adanya pergeseran prioritas investasi. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan yang sangat drastis pada PMTB, yaitu sebesar -58,37% dari tahun 2023. Angka PMTB turun menjadi 784,34 juta rupiah, jauh di bawah level tahun-tahun sebelumnya.

Ekspor Barang dan Jasa

Beberapa komoditas pertanian Kota Tomohon mampu menjadi produk unggulan dalam potensi ekspor di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data realisasi ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024, salah satu yang menjadi andalan ekspor Kota Tomohon adalah Gula aren, dimana pada tahun 2024 tujuan ekspornya adalah negara Bulgaria (9 ton) setara dengan 21.030 USD dan Malaysia (12 ton) setara dengan 27.695 USD.

2.1.3.6. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah adalah salah satu komponen penting dalam penilaian kinerja pembangunan daerah. Indeks ini mengukur seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang penting bagi masyarakat. Capaian indikator indeks infrastruktur berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebesar 77,26%, tahun 2022 sebesar 78,57%, tahun 2023 sebesar 77,87% dan tahun 2024 sebesar 76,04%. Capaian indikator indeks infrastruktur berada dalam kategori Baik.

Grafik 2.37. Indeks Infrastruktur Kota Tomohon

Sumber: https://www.kemenpppa.go.id/

Persentase Rumah Tangga dengan Hunian Layak

Capaian Rumah Tangga dengan Hunian Layak digambarakan dalam tabel berikut:

Tabel 2.36 Kondisi Rumah di Kota Tomohon

Tahun	Jumlah Rumah	Jumlah RTLH	Persentase RTLH	Jumlah RLH	Persentase RLH
2022	22.368	729	3,26	21.639	96,74
2023	22.726	784	3,45	21.942	96,55
2024	25.075	1.114	4,44	23.961	95,56

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tomohon, 2025

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Rasio ini mengukur proporsi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Dalam 5 tahun terakhir, capaian Rasio Pajak Daerah Kota Tomohon terhadap PDRB berfluktuasi.

Tabel 2.37 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Tomohon Tahun 2020-204

	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	21.066,99	25.482,01	28.842,47	28.947,26	32.408,63
PDRB	4.371.177,86	4.586.612,44	5.034.345,22	5.447.693,18	5.879.933,99
Rasio	0,48%	0,56%	0,57%	0,53%	0,55%

Sumber: BPS Kota Tomohon

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Capaian IPP Kota Tomohon dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 3,77 (B) dan

meningkat menjadi 4,1 (A-) di tahun 2023 dan tahun 2024 turun menjadi 3,5 (B).

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam kaitannya dengan transformasi digital, maka capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Tomohon dalam 3 tahun juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 indeks SPBE sebesar 1,76, meningkat di tahun 2022 menjadi 3, dan pada tahun 2024 indeks SPBE Kota Tomohon meningkat sebesar 3,03.

Grafik 2.38 Indeks SPBE Kota Tomohon

Sumber: Diskominfo Kota Tomohon

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum digunakan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *roadmap* reformasi birokrasi, selain itu untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meninglatkan kualitas reformasi hukum di Pemerintahan Daerah. Hasil Indeks Reformasi Hukum Kota Tomohon pada tahun 2024 sebesar 67,04 dengan kategori B (Cukup Baik).

Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). IPKD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Sejak tahun 2021 – 2023 IPKD terus

meningkat tetapi pada tahun 2024 menurun. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan diantaranya tindak lanjut terkait TGR, dalam hal perizinan belum memiliki aturan RDTR, dan belum seluruhnya aset tanag Pemerintah Kota Tomohon tersertifikasi.

Grafik 2.39 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Kota Tomohon

Sumber: Inspektorat Kota Tomohon

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi Pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, serta bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik berkualitas. Capaian IRB setiap tahunnya meningkat hingga capain tahun 2024 sebesar 70,62. Ini berarti Pemerintah Kota Tomohon terus berbenah dalam menata birokrasi dan pelayanan publik.

Grafik 2.40 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tomohon

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tomohon

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Persentase Penegakan Perda

Dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah, Pemerintah Kota Tomohon lewat Satuan Polisi Pamong Praja dan Instasi / Aparat Penegak Hulum hingga staleholder terkait melaksanakan koordinasi dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Persentase Penegakan Perda di Kota Tomohon dalam 3 tahun terakhir sebesar 100%.

Implementasi aksi HAM

Implementasi aksi HAM sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, khususnya 4 (empat) kelompok sasaran Aksi HAM yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Hasil capaian pelaksanaan aksi HAM di Kota Tomohon pada tahun 2024 sebesar 75,5.

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi (IDI) adalah alat ukur untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI dihitung berdasarkan tiga aspek, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. IDI Kota Tomohon terukur lewat capaian IDI Provinsi Sulawesi Utara. Indikator IDI baru terukur di tingkat Provinsi. Pada tahun 2023 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke 25 di Indonesia yakni dengan nilai IDI 76,27. Dibandingkan dengan nilai IDI tahun 2022, tahun 2023 mengalami penurunan. Di tahun 2022, Provinsi Sulawesi Utara mendapat nilai sebesar 78,22 dengan berada pada urutan ke 22 di Indonesia dan masuk pada kategori “sedang” (nilai indeks 60 – 80), dan untuk tahun 2023 ini masih tetap berada pada kategori “sedang”.

Tabel 2.38 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	79	80,41	78,22	76,27	-

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2025

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan, baik domestik maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga mengukur produktivitas dan kemajuan daerah. Dalam 3 tahun terakhir, capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Tomohon terus meningkat. IDSD diukur lewat faktor-faktor penentu daya saing seperti lingkungan yang kondusif, SDM kompetitif, efisiensi pasar, serta ekosistem inovasi.

Grafik 2.41 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Tomohon

Pada tahun 2024, indeks daya saing daerah Kota Tomohon berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,53, bahakan di atas rata-rata Nasional sebesar 3,43.

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pendidikan

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pendidikan di Kota Tomohon sangat tinggi, bahkan untuk jenjang Pendidikan

kesetaraan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 2,16% tahun 2022 menjadi 47,61% di tahun 2023 dan meningkat menjadi 61,29 di tahun 2024. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut menjadi modal bagi pembangunan daerah. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Adapun gambaranumum kondisi daerah terkait urusan pendidikan dapat dilihat berdasarkan indikator – indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.39 Indikator Capaian Urusan Pendidikan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	57,93%	99,66%	61,39%	81,07%	86,13%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,89%	99,75%	91,29%	96,10%	91,50%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	114,78%	91,61%	109,18%	98,07%	84,96%
4	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,69%	2,33%	2,16%	47,61%	61,29%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun pada Tahun 2024 yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian sebesar 86,13%, dimana dari 2.682 orang penduduk usia 5-6 tahun yang ada di Kota Tomohon terdapat sebanyak 2.310 orang yang berpartisipasi dalam PAUD di Kota Tomohon. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2023, dimana Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun pada Tahun 2023 yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian sebesar 81.07%.

Capaian pendidikan di Kota Tomohon baik meskipun ada beberapa capaian yang belum optimal diantaranya capaian pada Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, hal ini dapat disebabkan kurangnya informasi terhadap pendidikan kesetaraan yang sebenarnya menjadi salah satu indikator dalam pelayanan dasar di bidang pendidikan.

b. Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tomohon telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, dan merata. Berikut adalah data terkait capaian indikator kinerja urusan kesehatan Kota Tomohon selama kurun waktu tahun 2019 – 2024.

Tabel 2.40 Indikator Capaian Urusan Kesehatan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup	71,93	74,60	74,93	75,28	75,57
2	Persentase Balita Gizi Buruk	0	0	0	0	0
3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	-	0,13	0,4	0,16	0,59
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	-	14,2	21,1	15,9	12,7
5	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	14,2	21,8	15,6	10,6
6	Angka kematian ibu	-	142,24	0	213	150

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	per 100,000 kelahiran hidup					
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	33,673	33,809	34,241	185,91
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	98,3	102,4	98,53	96,18
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	0	0	0	0	0
10	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	-	106,7	98,7	100	91,1
11	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100
12	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100
13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,48%	0.47%	0.48%	0.47%	4,71%
14	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	33,33%	100%	66.67%	100%	100%
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,67%	100.07%	100.73%	100%	98%
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,57%	100%	102.44%	100%	96,18%

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,30%	100%	107.33%	100%	100%
18	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,41%	92.44%	100%	100%	100%
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,74%	97.69%	103.22%	100%	100%
20	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	207,97%	52.37%	5.85%	63,63%	82%
21	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,92%	98.05%	98.53%	79,54%	97,68%
22	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	163,47%	59.18%	72.13%	100%	80,9%
23	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	226,41%	78.04%	87.03%	100%	88,6%
24	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	105,42%	100%	102.08%	100%	102,1%
25	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	80.34%	100%	148,35%

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
26	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	215.83%	108,48	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon, 2024

**Hasil Long Form SP 2020 (BPS)*

Rangkuman dari beberapa indikator kesehatan yang telah dikemukakan diatas diformulasikan dalam bentuk Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat Angka harapan hidup Kota Tomohon terus mengalami peningkatan selama periode 2021 – 2024. AHH pada tahun 2021 mencapai 74,60 terus mengalami peningkatan secara konsisten dan mencapai 75,57 pada tahun 2024. Artinya, setiap bayi yang baru lahir hidup pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 75,57 tahun.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi dan penyediaan dan pemerataan pelayanan dasar di seluruh wilayah.

Tabel 2.41 Indikator Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	0	0	0	0	0

No.	URAIAN	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota					
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0	0	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3,18%	69.14%	82.30%	60,48%	63,64%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota	50,94%	33.10%	49.44%	49,92%	70%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0%	95.38%	95.82%	99,70%	94,12%
6	Rasio kepatuhan IMB/PBG Kota	96,21%	100%	100%	100%	12%
7	Tingkat kematangan Jalan Kota	83,33%	85.40%	85.72%	86,56%	72,89%
8	Rasio tenaga operator / teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	25.00%	21.13%	28,26%	45,45%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	100%	100%	100%	83,33%
10	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	453,82	472,66	452,66	456,54	372,46
11	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	33%	33.10%	49.44%	49,92%	50,58

Sumber: Dinas PUPR Kota Tomohon, 2024

Kota Tomohon menunjukkan kinerja yang kuat dalam beberapa indikator kunci terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode 2021-2024. Data menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam melindungi masyarakat dari bencana alam

dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar. Secara umum terjadi peningkatan masing-masing indikator. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi meningkat signifikan dari 33,10% di tahun 2021 menjadi 50,58% di tahun 2024. Ini adalah kemajuan yang substansial dalam penyediaan air bersih bagi penduduk dan akan terus ditingkatkan untuk penyediaan air bersih di Kota Tomohon.

Namun, terdapat penurunan pada Tingkat kematangan Jalan Kota dari 85,40% di tahun 2021 menjadi 72,89% di tahun 2024. Penurunan ini mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan atau pembangunan infrastruktur jalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan fluktuasi, namun berakhir dengan peningkatan yang baik. Dari 25,00% di 2021, angka ini mencapai 45,45% di 2024, menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sector pekerjaan umum. Sementara itu, Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi menunjukkan kinerja yang baik di awal periode dengan 100% pada 2021-2023, namun sedikit menurun menjadi 83,33% di tahun 2024. Meskipun masih tinggi, penurunan ini memerlukan evaluasi untuk memastikan standar keselamatan konstruksi tetap terjaga.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Kawasan pemukiman mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pembangunan. Perkembangan ini perlu diringi dengan pengaturan dan standar kualitasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dari perumahan dan kawasan pemukiman tersebut. Kegiatan penerbitan izin pembangunan, izin pengembangan perumahan dan juga penerbitan sertifikat kepemilikan menjadikan bagian dari urusan daerah. Selain itu, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pembangunan daerah juga menjadi urusan yang wajib tidak bisa

diabaikan. Capaian indikator Kawasan perumahan dan permukiman Kota Tomohon selama periode 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.42 Indikator Capaian Urusan Perumahan dan Permukiman Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	0	0	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	0	0	0	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100%	77,81%	77,81%	0	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,98%	3,21%	3,33%	4,29%	4,4%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	0.39%	8.49%	0.45%	61.1%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tomohon, 2024

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: Pada saat masa pasca bencana; Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota. Untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dalam rangka mendukung: Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. Selang Tahun 2021-2024 tidak ada bencana yang yang terjadi di Kota Tomohon dengan ketentuan yang ada. Begitu juga dengan relokasi dalam rangka Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. Sehingga Indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota dan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagimasyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota selang Tahun 2021-2024 adalah 0.

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dihitung dengan membagi Jumlah unit rumah kumuh dengan Jumlah total unit rumah kumuh. Adapun jumlah Total rumah kumuh di Kota Tomohon Tahun 2024 sebanyak 49 Rumah dan Jumlah Total Rumah Kumuh sebanyak 1114 unit. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dihitung dengan membagi Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dengan Jumlah unit rumah kota. Tahun 2024 Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 360 unit.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya itu, Polisi Pamong Praja juga harus menegakkan Keputusan dari Kepala Daerah. Pembangunan Kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Kemudian, Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi, menjadikannya sebagai kondisi potensial terhadap

ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Tabel 2.43 Indikator Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	40%	18.75%	6.15%	31,25%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,7 %	76,149	76,149	100%	142,13 %
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	76,149	97,806	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	100%	100%	100%	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit setelah terima laporan	15 menit setelah terima laporan	15 menit setelah terima laporan	15 menit setelah terima laporan	15 menit setelah terima laporan
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Kota Tomohon, 2024

Pemerintah Kota Tomohon telah menunjukkan berbagai capaian penting dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat selama periode 2021 hingga 2024. Data indikator ini menggambarkan komitmen dan efektivitas upaya yang telah dilakukan. Dalam hal penanganan

gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), Kota Tomohon patut diapresiasi atas konsistensinya. Sejak tahun 2021 hingga 2024, 100% dari gangguan Trantibum yang terjadi berhasil diselesaikan. Capaian sempurna ini menegaskan kesigapan apparat dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat.

Adapun pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terlihat adanya dinamika dengan peningkatan signifikan di akhir periode. Dari 18,75% di tahun 2021 yang kemudian sempat menurun menjadi 6,15% di tahun 2022, terjadi lonjakan impresif menjadi 31,25% di tahun 2023, dan akhirnya mencapai 100% di tahun 2024. Peningkatan drastis ini mencerminkan upaya serius dalam menegakkan regulasi daerah, yang berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur.

Sektor perlindungan masyarakat terhadap bencana juga menunjukkan performa yang beragam:

- Layanan informasi rawan bencana: Jumlah warga yang menerima layanan ini menunjukkan tren positif. Setelah konsisten di angka 76,149% pada tahun 2021 dan 2022, angka ini meningkat menjadi 100% di tahun 2023, dan bahkan melampaui target dengan mencapai 142,13% di tahun 2024. Angka yang melebihi 100% ini mungkin mengindikasikan jangkauan yang lebih luas dari target awal atau adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
- Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: Terjadi peningkatan dari 76,149% di tahun 2021 menjadi 97,806% di tahun 2022, dan mencapai 100% di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini menurun drastis menjadi 0,94%. Penurunan tajam ini memerlukan tinjauan lebih lanjut untuk memahami penyebabnya danmemastikan efektivitas program di masa mendatang.
- Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana: Layanan ini menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada awal periode. Sebanyak 101,020% warga menerima layanan ini di tahun 2021, lalu konsisten di 100% pada tahun 2022 dan 2023. Namun, di tahun 2024, angka ini

tercatat 0%. Ini bisa menandakan tidak adanya kejadian bencana yang memerlukan layanan evakuasi, atau mungkin ada perubahan dalam metodologi pencatatan.

- Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana: Senada dengan jumlah warga, persentase pelayanan ini mencapai 100% dari 2021 hingga 2023. Ini terjadi karena tidak ada penanganan terhadap warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Adapun Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana sebanyak 1 orang.

Secara keseluruhan, Kota Tomohon telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian penyelesaian gangguan Trantibum yang sempurna dan peningkatan signifikan dalam penegakan Perda/Perkada. Meskipun ada beberapa indikator perlindungan masyarakat terkait bencana yang menunjukkan fluktuasi di tahun 2024 yang perlu ditelusuri lebih lanjut, kesigapan dalam penanganan kebakaran tetap konsisten dan sangat efektif.

f. Sosial

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat.

Tabel 2.44 Indikator Capaian Urusan Sosial

Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	setelah tanggap darurat bencana daerah kota					

Sumber: Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, 2024

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) diukur dengan membagi Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. Tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 368, dimana semuanya dapat ditangani.

Untuk Tahun 2024, Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota sebanyak 59 orang. Dari semua populasi ini Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran, sehingga indicator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota adalah 100%.

g. Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan

utama yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, dimana TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.45 Indikator Capaian Urusan Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja	50.911	50.248	55.871	51.199	51.747
2	Tingkat Pengangguran terbuka	8,99	8,84	8,11	8,52	7,79
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	63,64	57,90	63,41	63,64	63,73
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,35	0,60	0,23	0,066	0,54
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	100	97,87	96,51	100	96,9
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	88	88	88	89	95
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	0	1.65	3.52	2.82	3.5

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Daerah kota Tomohon

Kondisi ketenagakerjaan dapa dilihat pada Tabel , dari waktu ke waktu terjadi peningkatan TPAK yang berarti bahwa jumlah pasokan tenaga kerja semakin meningkat di Kota Tomohon tetapi menjadi perhatian agar Upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha harus terus dilakukan agar tingkat pengangguran dapat semakin ditekan guna mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu ditingkatkan juga kualitas dan kompetensi dari tenaga kerja. Persentase tenaga kerja bersertifikat masih sangat minim

sehingga dibutuhkan kebijakan Pemerintah untuk membantu dalam hal peningkatan kompetensi tenga kerja.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan permpuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu indikator pada urusan pemberdayaan perempuan ini adalah dilihat dari tingkat partisipasi kaum perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya peningkatan upaya yang sistematis dan terencana sangat dibutuhkan agar kaum perempuan mampu meningkatkan kontribusinya dalam keluarga maupun masyarakat luas, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan peran mereka dalam pembangunan.

Tabel 2.46 Indikator Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0	75	76	56,57	46,77
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,08	0,03	0,03	24,69	0,005

Sumber: Dinas P3A Daerah Kota Tomohon

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD, Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota, dan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang semakin menurun di tahun 2024.

i. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar. Pada hakekatnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan diserahkan kepada masyarakat. Peran pemerintah lebih banyak dalam hal regulator sehingga tidak ada monopoli oleh pihak manapun untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menghindari rawan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, dalam rangka mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan pemerintah setempat. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak dan panen.

Tabel 2.47 Indikator Capaian Urusan Pangan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama	(Kg/jiwa/thn)	24.561.850	64.656.970	56.369.840	54.009.515
2	Ketersediaan energi	(kkal/kap/hari)	5651	6061	5993	2416
3	Ketersediaan protein	(gram/kap/hari)	119,84	157,24	159,24	159,24
4	Skor pola pangan harapan	%	82	90,7	92,5	89,9
5	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan					
	- Konsumsi energi	(kkal/kap/hari)	2183	2218	2335,2	2335,2
	- Konsumsi protein	(gram/kap/hari)	71,7	70,5	76,3	76,3
6	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen					
	- Harga beras	(Kg/Rp)	10.960	11.007	12.761	13.682

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
7	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen	%	1,22	2,57	4,65	1,09
8	Cadangan Beras Pemerintah Kota	Ton	3,5	3,5	11,8	35,5
9	Presentase ketersediaan pangan (tersediany a cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	%	317,19%	658,56%	575,45 %	556,534

Sumber: Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn) di Kota Tomohon memperlihatkan adanya fluktuasi dari tahun 2021-2024 tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Namun demikian upaya peningkatan kualitas dan keragaman pangan harus terus dilakukan, agar kualitas pangan masyarakat semakin meningkat. Untuk itu diperlukan kebijakan lewat regulasi yang mengatur ketahanan pangan daerah.

j. Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Tomohon, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Tomohon yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat. Indikator capaian urusan pertanahan selang Tahun 2020-2024 di Kota Tomohon sebagaimana dalam Tabel berikut.

Tabel 2.48 Indikator Capaian Urusan Pertanahan Kota Tomohon
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	0	0	0	0
4	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*	0	0	0	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	0	0	0	0

Sumber: LPPD Kota Tomohon 2021-2024

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan capaiannya 100%. Capaian ini diperoleh dari Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 50.786 Ha, dibandingkan dengan seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 50.786.

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum capaiannya 0%. Hal ini karena Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah 0. Adapun Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah 0 atau tidak ada data menyangkut SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Wali kota, SK Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah

Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek, SK Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee, serta Dokumen Izin membuka tanah. Capaian Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal adalah 0. Hal ini karena tidak ada data Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Capaian indikator Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee adalah 0%. Tidak tercapainya indikator ini karena Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0. Untuk indikator Tersedianya tanah untuk masyarakat capaiannya adalah 0%. Hal ini karena Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah adalah 0, sedangkan Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan tidak ada. Capaian untuk indikator Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar 0%. Hal ini karena tidak ada Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani, begitu juga dengan Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan tidak ada atau 0.

k. Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Berdasarkan capaian IKA, IKU dan ITL Tahun 2021-2023, memberi dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kota Tomohon yang tercermin dari capaian nilai Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 63,12 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), meningkat lebih baik di atas capaian tahun 2022 sebesar 62,35. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian adalah meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan, namun pada capaian kualitas air masih belum optimal. IKLH Kota Tomohon dari tahun ke tahun menunjukkan trend membaik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun capaian tersebut masih berada pada ambang batas klasifikasi cukup baik dengan klasifikasi kurang baik sehingga harus dijaga agar capaian IKLH tidak semakin buruk.

Tabel 2.49 Indikator Capaian Urusan Lingkungan Hidup Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air (Kriteria)	Kriteria	50	45	45	43,75	55,71
2	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Skor	86,67	89,65	90,32	92,64	95,76
3	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Skor	22,57	42,64	40,4	40,8	42,66
4	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penaggungjawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah (%)	%	100	100	100	100	100
5	Timbunan sampah yang dihasilkan (ton)	ton/tahun	16.596	18.669,20	18.510,40	18.747,13	18.747,13
6	Timbunan sampah yang ditangani (ton)	ton/tahun	13.505	13.760,5	13.870	13.687	13.505
7	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	63,25	72,34%	74,93%	73,01%	74,87

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,69	62,57	62,35	63,12	67,72
9	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	81,81	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon

Untuk indikator pengelolaan sampah di wilayah Kota, tidak terlepas dari persampahan. Masalah persampahan yang cukup sulit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin akan muncul akibat penimbunan sampah tersebut. Capaian pengelolaan sampah di wilayah Kota Tomohon Tahun 2024 sebesar 72.03%.

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan perekaman KTPel di Kota Tomohon terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024 cakupan kepemilikan KTPel di Kota Tomohon mencapai 97,13%. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan. Penerbitan akta

kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Tomohon terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024 cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Tomohon mencapai 98,94%. Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan. Cakupan kepemilikan Akta Kematian di Kota Tomohon mencapai 100%. Selengkapnya tabel menunjukkan capaian kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon:

Tabel 2.50 Indikator Capaian Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2020-2024 Kota Tomohon

Indikator Kinerja	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP Elektronik	97,54	96,72	95,52	97,01	97,29
Rasio kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98	98,44	98,26	98,87	98,94
Persentase anak usia 1 – 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	57,97	88,66	73,24	77,27	77,5
Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,78	98,44	98,62	98,87	98,95

Indikator Kinerja	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	75	70.45	70.45	70.45	70.45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon

m. Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam hal pertumbuhan penduduk Thomas Robert Malthus telah menulis dalam sebuah buku yang berjudul *An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society*. Pokok tesis Malthus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampui pertumbuhan persediaan makanan. Thomas Malthus menyebutkan bahwa, penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung bertumbuh secara "deret hitung" (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya). Dengan demikian perkembangan penduduk akan lebih cepat di banding dengan persediaan makanan. Untuk itu, pengendalian penduduk perlu dilakukan secara merata di semua wilayah Indonesia termasuk di Kota Tomohon. Hal ini, merupakan langkah penting yang harus dilakukan agar tercipta keseimbangan antara manusia dan alam sekitarnya.

Tabel 2.51 Indikator Capaian Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,07%	2,07%	2,05%	2,05%	2%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	88,21 %	53,32%	67,71%	53,21%	64%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,67 %	24,83%	21,05%	20,65%	22,78 %

Sumber: Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon, 2024

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana, dan pengendalian angka kelahiran. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

n. Perhubungan

Sektor perhubungan memilki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,karena transportasi merupakan urat nadi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistim transportasi yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Tabel 2.52 Indikator Capaian Urusan Perhubungan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IK1 (angkutan jalan)	0,26	0,26	0,5	NA	0,5
2	IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)	0	0	0	0	0
3	Rasio konektivitas Kota	0,52	0,26	0,5	0,5	0,5
4	V/C Ratio di Jalan Kota	NA	NA	NA	0,76	0,76
5	Ruas jalan Raya Tomohon	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
6	Ruas Jalan Babe Palar (KTL)	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
7	Ruas Jalan raya Tomohon-Tondano	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
8	Ruas Jalan Polres Tomohon	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
9	Jumlah arus penumpang angkutan umum	35.600	87.600	73.000	62.050	57.600

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

Indikator rasio konektivitas kota menunjukkan peningkatan yang stabil dan konsisten. Pada tahun 2021, rasio konektivitas tercatat 0,26. Angka ini kemudian melonjak menjadi 0,50 di tahun 2022 dan berhasil dipertahankan pada angka yang sama di tahun 2023 dan 2024. Capaian 0,50 selama tiga tahun berturut-turut ini mengindikasikan adanya perbaikan infrastruktur dan jaringan transportasi yang mampu meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di dalam kota. Stabilitas pada angka 0,50 ini mungkin

menunjukkan bahwa Kota Tomohon telah mencapai tingkat konektivitas yang ditargetkan. Untuk indikator V/C Ratio (Volume to Capacity Ratio) di jalan kota, data mulai tersedia pada tahun 2023 dan menunjukkan kondisi lalu lintas yang relatif terkendali. V/C Ratio di tahun 2023 tercatat 0,76, dan angka ini berhasil dipertahankan di tahun 2024. Nilai V/C Ratio sebesar 0,76 umumnya mengindikasikan bahwa kondisi lalu lintas masih berada pada tingkat pelayanan yang baik hingga sedang, di mana volume kendaraan belum mencapai kapasitas maksimal jalan. Ini berarti arus lalu lintas masih bergerak lancar dengan hambatan minimal, meskipun mungkin sudah ada beberapa penundaan kecil pada jam-jam sibuk. Konsistensi angka ini menunjukkan efektivitas pengelolaan lalu lintas dan kapasitas jalan yang memadai dalam menghadapi volume kendaraan.

Secara keseluruhan, realisasi indikator urusan perhubungan Kota Tomohon dari 2021 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang positif, khususnya dalam peningkatan dan pemeliharaan konektivitas serta pengelolaan lalu lintas yang efektif.

o. Komunikasi dan Informatika

Peranan Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan pada berbagai aspek kehidupan dewasa ini. Seiring dengan perkembangannya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk dan tujuan yang beragam maka dituntut penyediaan informasi yang tepat, cepat dan akurat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang baik diperlukan suatu alat bantu dalam mengelola data dan informasi agar dapat lebih efektif dan efisien.

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Laporan *World Economic Forum* (2015) mengindikasikan kenaikan 10% akses internet berkorelasi dengan penambahan 1,2% pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital hingga kawasan pedesaan, merupakan wujud keyakinan bahwa TIK menjadi instrumen yang dapat meningkatkan

kesejahteraan. Terutama untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai program pemerintah.

Dalam era keterbukaan dewasa ini, urusan Komunikasi dan Informatika dituntut untuk mampu meningkatkan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam rangka mewujdkan *Good Governance* atau Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat di wilayah Kota Tomohon.

Tabel 2.53 Indikator Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon Tahun 2021-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	61,74%	67,65%	11,76%	12,35%	15%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	12,5%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	100%	85,53%	85,53%	80,05%	85%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Perkembangan kinerja layanan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2019-2024 di kota Tomohon secara umum memperlihatkan peningkatan di semua aspek indikator. Upaya memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital hingga masih harus terus dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

p. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan Koperasi dan UKM dinilai mampu mendukung pencapaian tiga tujuan pembangu9nan ekonomi, yaitu

pertumbuhan ekonomi, kualitas pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

Tabel 2.54 Indikator Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator					
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	278	278	280	279	279
2	Persentase koperasi aktif	51.43	51.43	51.78	51.25	100
3	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT	10.48	5.59	5.51	7.69	100
4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	9.010	13.281	13.281	8.135	8.405
5	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	5,39%	3,24%	2,53%	3,94%	100
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	13,09%	7,24%	1,77%	2,88%	20,77

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon

Jumlah Koperasi yang berkualitas di Kota Tomohon Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Begitu Juga dengan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha. Tahun 2024, dari 12 Koperasi yang ada, koperasi yang meningkat kualitas berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ada 12 Koperasi. Untuk Usaha mikro yang menjadi wirausaha sebanyak 1746 dari jumlah usaha mikro keseluruhan sebanyak 8405. Indikator ini menjadi pendekatan untuk perhitungan rasio wirausaha.

q. Penanaman Modal

Secara umum di Indonesia upaya peningkatan penaman modal, setidaknya dihadapkan dengan beberapa masalah utama yang menghambat yaitu: pertama, regulasi. Terlalu banyak aturan yang tumpang tindih kewenangan dan seringkali berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan masalah perizinan yang rumit hingga pendaftaran dan syarat yang dijadikan izin. Selanjutnya terkait isu-isu perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha, dan masalah ketiga, adalah urusan perizinan lahan di daerah. Sedangkan masalah keempat terkait dengan kualitas SDM dan regulasi tenaga kerja dan masalah infrastruktur.

Tabel 2.55 Indikator Capaian Urusan Penanaman Modal Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kota (Rp)	Juta Rp	243,675	224,011	272,601	78,805	565,536
2	Jumlah investasi tahun n-1 di kota (Rp)	Juta Rp	85,062	85,062	309,074	272,601	351,407
3	Persentase peningkatan investasi di Kota (%)	%	-65,09	263,35	-11,80	28,91	260,93

Sumber: DPMPTSP Kota Tomohon, 2024

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Tomohon menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Tomohon. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung.

r. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dengan tujuan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan ini, diarahkan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, serta menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Tabel 2.56 Indikator Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,24%	7.72%	8.83%	8,52%	16,64
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12,88%	17.63%	17.63%	18,58%	78,5
Peningkatan prestasi olahraga	57	17	32	45	50,74

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon, 2024

s. Statistik

Mengingat pentingnya peranan data, yang akan menjadi basis informasi, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksana kegiatan pembangunan, untuk itu ketersediaan data statistik sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi bagi perencanaan pembangunan, maupun evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketersediaan data yang akurat memberikan dasar dan arahan dalam merumuskan kegiatan dan program pembangunan.

Perkembangan indikator urusan statistik secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan daerah, hal ini tercermin dari tersedianya buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB setiap tahunnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang harus segera diupayakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.57 Indikator Capaian Urusan Statistik Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Statistik Pembangunan Daerah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Buku “PDRB “	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Persentase Organisasi Perangkat	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

t. Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan Kota berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksinya sistem jaringan di Kota Tomohon, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah. Indikator capaian untuk urusan persandian adalah Tingkat keamanan informasi pemerintah.

Tabel 2.58 Indikator Capaian Urusan Persandian Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100	0	0	0	0

Indikator tingkat keamanan informasi pemerintah belum memiliki data yang tersedia (NA - Not Available) untuk tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, nilai yang tercatat adalah 0. Capaian 0% ini disebabkan oleh Jumlah nilai per area keamanan informasi = 0 dan Jumlah area penilaian = 0. Hal ini disebabkan karena tidak ada informasi atau data yang menyangkut Persentase

kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan, Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah, Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah, dan Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.

u. Kebudayaan

Kebudayaan harus menjadi akar pembangunan di segala bidang dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat dipengaruhi globalisasi revolusi industri 4.0. Untuk itu, kebudayaan diharapkan lebih memainkan perannya di masa depan untuk menunjukkan jati diri dalam pembangunan.

Perkembangan indikator kinerja layanan urusan kebudayaan selama tahun 2019-2023 memperlihatkan kondisi yang cenderung stagnan kecuali untuk jumlah group kesenian. Hal ini tentunya perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang agar kebudayaan lokal dapat menjadi aset yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tabel 2.59 Indikator Capaian Urusan Kebudayaan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian dan budaya	Grup	25	25	35	37	37
2	Jumlah gedung kesenian	Unit	0	0	0	0	0
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	Covid	Covid	4	4	7
4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	0	0	1	1	1
5	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	1	1	1	1	1
6	Terlestarikannya cagar budaya	%	19,23	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

v. Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik dilingkungan formal maupun non formal.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah diantaranya dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Indikator ini menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan fluktuasi. Jumlah koleksi buku mengalami penimgkatan setiap tahunnya. Kebutuhan dan minat membaca masyarakat harus terus ditingkatkan sehingga budaya membaca terwujud dalam upaya mencerdaskan masyarakat kota Tomohon.

Tabel 2.60 Indikator Capaian Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun	orang		367	2.170	990	1152
2	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum Daerah	buku	23.407	23.506	24.011	24.011	24.011
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	rasio	0,0017	0,0017	0,0017	0,0016	0,0016
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku		11.838	11.841	11.841	11.841
5	Jumlah pustakawan	orang	1	1	1	1	2
6	Jumlah Perpustakaan	unit	173	173	173	173	174
7	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	5	5	9,30	42	64,7
8	Jumlah arsiparis	Orang	0	0	4	3	3
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	-	-	67,23	57,91
10	Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	22	69,5	72	75	79,14
10	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	44	353.5	41.4325	63,44	69,35
11	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	Unit	1.519	1.665,16	1.947	3215,5	66,67

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tomohon, 2024

Upaya peningkatan SDM pengelola arsip dan pengembangan teknologi pendukungnya perlu segera dilakukan agar sistem kearsipan dapat dilakukan dengan lebih baik dan aman.

w. Perikanan

Kota Tomohon mengandalkan budidaya ikan air tawar. Berikut merupakan perkembangan urusan perikanan di Kota Tomohon.

Tabel 2.61 Indikator Capaian Urusan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2021-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan (budidaya dan tangkap)	ton	361,96	304,9	337,909	359,214	376,24
2	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	kg/org/kapita	40,4	40,4	40,6	42,5	35,4

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

x. Pariwisata

Pariwisata menjadi sektor unggulan di Kota Tomohon dalam menunjang visi Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia. Pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi covid-19 dengan adanya kebijakan pebatasan sosial berskala besar sangat berimbas pada pariwisata Kota Tomohon. Kunjungan wisatawan khususnya mancanagera turun drastis. Demikian juga PAD dari sektor pariwisata menurun. Seiringnya pulihnya ekonomi pasca pandemi covid-19, tempat-tempat wisata dan jumah kunjungan mulai meningkat. Kegiatan kepariwisataan di Kota Tomohon perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan ODTW serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para

wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan length of stay wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat. Adapun capaian Tahun 2020-2024 untuk urusan Kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.62 Indikator Capaian Urusan Pariwisata Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-99,36%	0,9%	3,8%	2,23%	4,06%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	-49,31%	0,24%	0,09%	0,16%	0,48%
3	Tingkat hunian akomodasi	12,74 %	12,74 %	7,08 %	16,41 %	20,6
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,03	84.506	95.546	2,01	2,05%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,52	9,773	10,604	11,491	12,7%
6	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	0.70	0.70	0.78	0.79	0.80%
7	Rata-rata Lama Tinggal wisatawan	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5%

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

y. Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Sebagai salah satu penggerak perekonomian Kota Tomohon, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting. Dalam kurun 5 tahun terakhir, sektor pertanian berada dalam posisi ke-2 penyumbang terbesar dalam komponen PDRB Kota Tomohon.

Tabel 2.63 Indikator Capaian Urusan Pertanian Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	%	14,06	13,87	13,91	14,02	14,34
2	Produktivitas Padi Per Hektar (kw/ha)	kw/ha	60	60	60	63	60
3	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	%	27	25	22	60	27

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

Berikut merupakan capaian kinerja urusan pertanian berdasarkan komoditi pangan dan bunga krisan.

Tabel 2.64 Indikator Capaian Produksi Pertanian Berdasarkan Komoditi Kota Tomohon Tahun 2021-2024

No	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
1	Padi				
A	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	9.865	8.404,8	8.233	7.329
B	Luas Panen	1.645	1.400,8	1.371	1.221
C	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton)	600	600	600	600
2	Jagung				
A	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	65.920	33.382	37.926	38.516
B	Luas Panen	9.417	4.768,8	5.418	5.502
C	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton)	700	700	700	700
3	Kacang Tanah				
A	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	71	39,24	82,08	70,38
B	Luas Panen	39	22	45,6	39,1
C	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton)	182	180	180	180
4	Kedelai				
A	Jumlah produksi pertanian pangan	60	NA	NA	NA

No	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
	per hektar per tahun				
B	Luas Panen	50	NA	NA	NA
C	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton)	120	NA	NA	NA
5	Ubi Kayu				
A	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	673	621,6	532,8	528
B	Luas Panen	56	52	44,4	44
C	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton)	120	120	120	120
6	Ubi Jalar				
A	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	1.114	621	1.133,8	957
B	Luas Panen	94	51	94	79
C	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton)	118	121	120	120
7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	80	81	82	83.33
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	25%	22%	25%	27%
9	Produksi krisan (tangkai)	980.000	6.035.000	6.077.500	5.999.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

z. Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian urusan energi dan sumberdaya mineral di Kota Tomohon Tahun 2024 diukur dengan indikator Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota dihitung dengan membandingkan Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dengan Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi.

Tabel 2.65 Indikator Capaian Urusan Energi dan SDM Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1	1	1	1	1
2	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1	1	1	1	1
3	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%

aa. Perdagangan

Urusan perdagangan diukur dengan indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan, Persentase kinerja realisasi pupuk dan Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Capaian Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.59 Indikator Capaian Urusan Perdagangan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	31	31	31	40	43
2	Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	40	40	40	40	43
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	50,74%	77,50%	77,50%	100	20

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
4	Realisasi	2.263.333	1.056.000	1.137	724,28	380
5	RDKK	12.655.363	1.583.000	1.573	3.980,57	1.559
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	17,88%	66,71%	72,28%	18,19%	27,8%
7	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	184	194	203	216	66
8	jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	2576	2576	2576	2576	36561
9	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	7,14%	7,53%	7,88%	8,38%	85,73%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon

bb. Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Capaian indikator urusan Perindustrian Tahun 2021-2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.66 Indikator Capaian Urusan Perindustrian Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	12,3	12.2	2.96	2,586	17,9
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	100	100	100	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	100	271.43	16.39	12,38	4,8

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
	jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	12,38	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	0	0	0	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	95	95	90	80

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon

cc. Perencanaan dan Keuangan

Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Perencanaan dan Keuangan diukur dengan Indikator Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan, Rasio PAD, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), dan Opini Laporan Keuangan.

Tabel 2.68 Indikator Capaian Urusan Perencanaan dan Keuangan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	URAIAN	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	19,77%	17.57%	18.67%	22,019	22,015
2	Rasio PAD	5,32%	1,87%	1,95%	7,39%	8,08%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3,011
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3,27

No	URAIAN	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	14,57%	29.85%	84,08	84,01	84
6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pada indikator Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Dimulai dari 17.57% di tahun 2021, rasio ini naik menjadi 18.67% di tahun 2022, kemudian melonjak signifikan ke 22.019% di tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 22.015% di tahun 2024. Peningkatan ini bisa mengindikasikan pertumbuhan jumlah pegawai non-guru dan tenaga kesehatan, atau peningkatan tunjangan/gaji mereka. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan performa yang sangat positif, terutama di dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio PAD hanya 1.87%, sedikit meningkat menjadi 1.95% di tahun 2022. Namun, terjadi lonjakan drastis di tahun 2023 menjadi 7.39%, dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 8.08%. Kenaikan signifikan ini menandakan adanya upaya yang berhasil dalam peningkatan penerimaan daerah dari sumbersumber non transfer, yang menunjukkan kemandirian finansial daerah yang lebih baik.

Serupa dengan SPIP, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menunjukkan konsistensi. APIP berhasil mempertahankan Level 3 dari tahun 2021 hingga 2023. Di tahun 2024, nilainya adalah 3.27, yang menunjukkan peningkatan kapabilitas meskipun masih dalam kategori Level 3. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal.

Indikator Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Dimulai dari 29.85% di tahun 2021, rasio ini melonjak tajam menjadi 84.08% di tahun 2022, dan sedikit menurun ke 84.01% di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan drastis menjadi hanya 9.23%. Fluktuasi yang besar ini

memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab perubahan alokasi belanja untuk urusan pemerintahan umum.

Aspek Opini Laporan Keuangan menunjukkan performa yang sangat baik dan konsisten. Pemerintah daerah secara berturut-turut berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2021 hingga 2024. Ini merupakan pencapaian penting yang menegaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, data ini merefleksikan dinamika pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa area yang menunjukkan peningkatan positif seperti Rasio PAD dan konsistensi opini WTP, sementara beberapa indikator lain seperti rasio belanja pegawai dan belanja urusan pemerintahan umum menunjukkan tren yang perlu dicermati lebih lanjut.

dd. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Capaian untuk IKK penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2024 sebagaimana dalam tabel berikut. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Rasio ini menunjukkan perbandingan jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi terhadap pegawai dengan kualifikasi pendidikan menengah/dasar (di luar guru dan tenaga kesehatan). Terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Setelah itu, rasio ini relatif stabil di tahun 2022 dan 2023, sebelum Kembali meningkat menjadi 100% di tahun 2024. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Rasio ini menunjukkan proporsi PNS di luar guru dan tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional. Terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun 2021 ke 2022, diikuti penurunan pada tahun 2023 dan sedikit penurunan lagi di tahun 2024.

Rasio Jabatan Fungsional (%) bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Rasio ini menunjukkan proporsi pemegang jabatan fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi. Terjadi penurunan

signifikan dari tahun 2021 ke 2023, diikuti peningkatan yang cukup besar di tahun 2024.

Indikator kepegawaian di Kota Tomohon menunjukkan dinamika yang menarik. Terjadi penyesuaian signifikan dalam rasio pegawai berdasarkan tingkat pendidikan antara tahun 2021 dan 2024. Proporsi pegawai fungsional meningkat di awal periode namun kemudian mengalami sedikit penurunan. Yang paling menarik adalah fluktuasi pada rasio jabatan fungsionalbersertifikat kompetensi, dengan penurunan yang cukup besar diikuti dengan pemulihan yang signifikan di tahun 2024. Pemerintah Kota Tomohon perlu terus memantau dan menganalisis tren ini untuk memastikan kebijakan kepegawaian mendukung efektivitas organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan jumlah pegawai fungsional bersertifikat kompetensi untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi.Pengelolaan kepegawaian dimulai dari tahap pengadaan sampai penjenjangan karir dan sampai purna tugasnya/ pensiun. Tahap pengadaan bertujuan untuk mengisi kebutuhan ASN pada satu instansi sesuai dengan kebutuhan dan *background* pendidikan, penjenjangan karir, tahap yang harus dilalui ASN untuk mencapai jabatan tertentu, pensiun masa purna tugas yang diperoleh ASN atas pengadiannya. Peningkatan profesionalitas dan penjenjangan karir SDM ASN dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan.

Tabel 2.69 Indikator Capaian Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Tomohon Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82	82	83.46	83,06	84,04
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,53	5.58	19.17	16,48	14,73
3	Rasio Jabatan Fungsional (%) bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,75	50.43	23	16,48	29,82

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Tomohon

ee. Pengadaan

Indikator kinerja menyangkut pengadaan adalah Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama, Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah Indikator untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Tomohon. Metode kompetitif (seperti tender terbuka atau lelang) dianggap lebih transparan dan berpotensi menghasilkan harga yang lebih baik dibandingkan metode non-kompetitif (seperti penunjukan langsung). Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi total belanja daerah Kota Tomohon yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Ini memberikan gambaran mengenai signifikansi fungsi pengadaan dalam keseluruhan anggaran daerah.

Tabel 2.70 Indikator Capaian Urusan Penunjang (Pengadaan) Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	12,77	NA	NA	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0	NA	24	66,49	84,17
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	82,66	99,11	28,81	51,37	75

Sumber: LPPD Kota Tomohon

Realisasi indikator penunjang urusan pengadaan di Kota Tomohon selama periode 2021-2024 menunjukkan dinamika yang menarik dalam efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama:

Indikator ini mencerminkan kecepatan dimulainya proyek konstruksi di awal tahun anggaran. Pada tahun 2021, angka ini berada di 12,77%. Namun, data untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia (NA). Sangat positif, di tahun 2024, persentase ini berhasil mencapai 0%. Angka nol ini, dalam konteks ini, adalah capaian yang sangat baik karena berarti tidak ada proyek konstruksi yang ditunda atau "dibawa" ke tahun berikutnya yang penandatanganan kontraknya baru dilakukan di kuartal pertama tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan peningkatan signifikan dalam perencanaan dan eksekusi proyek konstruksi, memungkinkan proyek dimulai lebih cepat.

- Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif: Indikator ini mencerminkan tingkat transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan. Data untuk tahun 2021 tidak tersedia (NA). Namun, terjadi peningkatan yang substansial dan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, angkanya adalah 24%. Kemudian melonjak menjadi 66,49% di tahun 2023, dan terus meningkat tajam hingga mencapai 84,177% di tahun 2024. Peningkatan signifikan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tomohon untuk melaksanakan pengadaan secara lebih kompetitif, yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan potensi mendapatkan barang/jasa dengan kualitas terbaik dan harga yang wajar.
- Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan: Indikator ini mengukur porsi total belanja yang disalurkan melalui proses pengadaan resmi. Pada tahun 2021, rasio ini sangat tinggi, mencapai 99,11%. Namun, terjadi penurunan signifikan menjadi 28,81% di tahun 2022. Setelah itu, rasio ini kembali menunjukkan tren peningkatan menjadi 51,377% di tahun 2023 dan mencapai 63,25% di tahun 2024. Fluktuasi ini perlu dicermati lebih lanjut. Penurunan di tahun 2022 mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan metode belanja, peningkatan belanja non-pengadaan (misalnya, transfer atau subsidi), atau kendala dalam proses pengadaan itu sendiri. Peningkatan di tahun 2023 dan 2024

menunjukkan upaya untuk kembali menyalurkan belanja melalui jalur pengadaan resmi.

ff. Manajemen Keuangan

Untuk mengukur tingkat kinerja manageman keuangan mengunakan indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, Assets management, dan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD adalah Indikator ini mengukur selisih (deviasi) antara jumlah belanja yang benar-benar terealisasi (terlaksana) dengan total anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon. Deviasi ini dapat berupa selisih lebih (realisasi lebih tinggi dari anggaran) atau selisih kurang (realisasi lebih rendah dari anggaran). Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD merupakan Indikator ini mengukur selisih (deviasi) antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil direalisasikan dengan target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Tomohon. Deviasi ini juga bisa berupa selisih lebih atau selisih kurang.

Tabel 2.71 Indikator Capaian Urusan Penunjang (Manajemen Keuangan) Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,75	-20,32	-10,24	-6,46	-0,52
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	31,55	14,10	-28,04	-24,94	-21,18
3	Assets management	100	100	100	100	100
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,46	1,85	17,12	6,98	3,14

Sumber: LPPD Kota Tomohon

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD: Indikator ini mencerminkan seberapa akurat perencanaan belanja

dibandingkan dengan realisasinya. Tren yang positif terlihat di sini. Pada tahun 2021, deviasi belanja sebesar -20,32%, yang berarti realisasi belanja jauh di bawah anggaran. Angka ini secara bertahap membaik menjadi -10,24% di tahun 2022, kemudian menjadi -6,46% di tahun 2023. Puncak perbaikan terjadi di tahun 2024, di mana deviasi menjadi positif 0,52%. Angka mendekati nol, terutama yang positif kecil, menunjukkan perencanaan anggaran belanja yang semakin akurat dan realisasi yang sangat mendekati target. Ini menandakan manajemen belanja yang lebih efektif dan efisien.

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD: Indikator ini mengukur seberapa baik target pendapatan asli daerah tercapai. Pada tahun 2021, realisasi PAD melebihi target dengan deviasi positif 14,10%. Namun, di tahun 2022 dan 2023, terjadi deviasi negatif yang cukup besar, yaitu -28,04% dan -24,94% masing-masing. Ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD pada dua tahun tersebut jauh di bawah target yang ditetapkan. Hal yang sama , di tahun 2024, kinerja PAD kembali membaik secara signifikan dengan deviasi negatif 21,18%, menunjukkan bahwa realisasi PAD kembali di bawah target yang dianggarkan. Fluktuasi ini menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap proses penetapan target PAD dan strategi untuk mencapainya.

Asset management: Indikator ini secara konsisten menunjukkan hasil "Ya" / 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Ini berarti Kota Tomohon secara berkelanjutan telah melakukan pengelolaan aset, yang meliputi inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset daerah. Konsistensi ini sangat penting untuk memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal dan tercatat dengan baik, mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya: Indikator ini mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran dan sisa anggaran yang tidak terpakai. Pada tahun 2021, rasio ini adalah 1,85%, menunjukkan sisa anggaran yang relatif kecil. Namun, di tahun 2022, rasio ini melonjak menjadi 17,12%, yang bisa mengindikasikan adanya perencanaan yang kurang optimal atau hambatan dalam realisasi belanja. Rasio ini kemudian membaik menjadi 6,98% di tahun 2023 dan kembali menurun ke

3,14% di tahun 2024. Penurunan rasio sisa anggaran di dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan efisiensi dalam perencanaan dan penyerapan anggaran, mengurangi dana yang tidak termanfaatkan.

gg. Transparansi dan Partisipasi Publik

Untuk mengukur transparansi dan partisipasi publik mengunakan indikator Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information).

Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan adalah Indikator ini mengukur ketersediaan dan transparansi informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik. Sumber daya ini meliputi berbagai aspek, seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Fisik (Aset, Sumber Daya Teknologi, Sumber Daya Alam (jika relevan). Indikator Ini Penting karena menyangkut Transparansi dan Akuntabilitas, Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, Partisipasi Masyarakat, Evaluasi Kinerja. Pemerintah Kota Tomohon perlu memastikan bahwa informasi mengenai sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dikumpulkan, dikelola, dan dipublikasikan secara teratur dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan.

Indikator Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah adalah Indikator ini mengukur sejauh mana masyarakat Kota Tomohon memiliki kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Informasi keuangan daerah meliputi berbagai hal, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Ringkasan APBD dan LRA untuk publik, Informasi mengenai proses penyusunan APBD, Informasi mengenai hasil audit keuangan daerah. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Penting

karena menyangkut Akuntabilitas Publik, Transparansi: Partisipasi Masyarakat: Kepercayaan Publik: dan Good Governance. Akses Publik Dapat Diwujudkan melalui Publikasi Online: Pengumuman di Papan Informasi: Forum Diskusi Publik: Media Massa: dan Layanan Informasi. Pemerintah Kota Tomohon perlu terus berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan daerah kepada publik. Ini bukan hanya kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan, tetapi juga merupakan wujud komitmen terhadap tata Kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif. Semakin mudah masyarakat mengakses dan memahami informasi keuangan daerah, semakin besar potensi untuk pengawasan public yang efektif dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel. Informasi mengenai sumber daya pelayanan dan akses publik terhadap informasi keuangan daerah adalah dua indikator penting dalam mengukur transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tomohon. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses akan memberdayakan masyarakat untuk memahami kondisi daerahnya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2.72 Indikator Capaian Urusan Transparansi Publik Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	0	0	NA	NA	30
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	40	40	NA	100	75

hh. Kesatuan bangsa dan politik

Tabel 2.73 Indikator Capaian Urusan Pemerintahan Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	%	100	100	100	100	100
2	Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase meningkatn ya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik	%	100	100	100	100	100
4	Persentase ormas yang terdafar aktif sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	%	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
5	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Tomohon

ii. Sekretariat Dewan

Sekretariat dewan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu penyelenggaraan kegiatan legislatif. Indikator kinerja layanan urusan sekretariat dewan setiap tahunnya terpenuhi.

Tabel 2.74 Indikator Capaian Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan					
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Keg	65	71	68	48	78
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakn Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Thaunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Keg	43	46	53	47	34

No	Indikator	Satuan					
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	55,18	59,49	68,34	94,8	95
4	Jumlah Perda yang dihasilkan	Perda	6	7	4	4	5

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tomohon

jj. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja layanan sekretariat daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti pelayanan publik, rata-rata bernilai baik berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat. Data capaian indikator urusan Sekretariat Daerah dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.75 Indikator Capaian Urusan Sekretariat Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Pesentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik	%	100	100	100	90
2	Presentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	%	100	100	100	100
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	%	75	80	85	100
4	Nilai SPBE	Nilai	1,67	1,76	3	3,03
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	63.93	64.45	64.71	64.71
6	Nilai LPPD	Nilai	2.57	2,5406	Belum	Belum
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,07	88,36	88,63	88,60
8	Indeks Kematangan UKPBJ	Indeks	3/9	4/9	5/9	8/9
9	Jumlah kerjasama yang dibuat	jumlah	6	17	14	12

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tomohon

Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.75. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2024

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
IKU	Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	6,183	6,3	6,133	6,3	5,45	6,5	5,45	6,6	
IKU	Laju pertumbuhan ekonomi	1,95	5,61-6,61	5,17	6,11-6,18	5,32	6,8-7,11	4,74	7,61-8,11	
IKU	Indeks Gini	0,354	0,34	0,374	0,33	0,339	0,31	0,34	0,295	
IKU	Angka kemiskinan	5,69	5,46-4,86	5,26	4,2	5,60	3,92	5,38	3,36	
IKU	Indeks Pembangunan manusia	76,86	76,72	77,44	76,81	78,10	76,93	78,89	77,14	
IKU	Tingkat Pengangguran terbuka	8,84	7,02-7,73	8,11	6,55-7,05	8,52	6,05-6,55	7,79	5,05-5,55	
IKU	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,95	77,1	99,00	77,25	99,32	77,3	99,56	77,8	
IKU	Turunnya angka stunting	18,3	18,4	13,7	16	10,5	14	10,8	10	
IKU	Umur harapan hidup	72,06	71,95	72,44	72,1	72,84	72,2	73,13	72,35	
IKU	Indeks infrastruktur	77,26	87,2	78,57	87,5	77,87	88	78,75	88,5	
IKU	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	62,57	80	62,35	82	63,12	83	67,72	85	
IKU	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	95,82	97	95,81	98	96,263	98,5	95,82	100	
IKU	Akses Air Minum Layak	48,93	92	49,43	93	50,10	95	49,44	95	
IKU	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	510	1.005	348,23	1.155	322,515	1.270	734,16	1.537	
IKU	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	2	2	2	3	3	3	3	4	
IKU	Produktivitas bahan pangan	60	62	60	63	60	64	60	66	
IKU	Cadangan beras Pemerintah Kota	3,621	3	3,591	37	11,8	37	37	37	
IKU	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	89,74	87,1	91,45	87,6	91,45	88,1	91,45	89,1	
IKU	Indeks Reformasi Birokrasi	55,09	61-64	58,68	64-67	64,58	67-71	70,62	>75	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
IKU	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
IKU	Indeks SPBE Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1,67	2,5	1.76	3	3	3,26	3,03	3,8	
IKU	Nilai SAKIP Kota	64,01	67-71	63,93	71-74	64,71	74,77	65,01	4,25	
URUSAN WAJIB									>80	
TERKAIT PELAYANAN DASAR										
PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,75%	100%	91,29%	100%	96,10%	100%	91,50%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	91,61%	100%	109,18%	100%	98,07%	100%	84,96%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,66%	60%	61,39%	62%	81,07%	65.50%	86,13%	70%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,33%	60%	2,16%	70%	47,61%	75%	61,29%	85%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	100%	100%	80	100%	83	100%	85	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengendalian perizinan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentase Pelaksanaan Pengembangan bahasa dan sastra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	92%	100%	95%	100%	95%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KESEHATAN										**DINAS KESEHATAN**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	01:01.0	01:01.0	0,48%	01:01.0	0,47%	01:01.0	4,71%	01:01.0	DINAS KESEHATAN
	Presentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%	100%	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100,73%	100%	100%	100%	98%	100%	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan	100%	100%	102,44%	100%	100%	100%	96,18%	98%	DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	107,33%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	103,22%	100%	100%	100%	100%	85%	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
	Pesentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	58,56%	100%	63,63%	100%	82%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	98,53%	100%	79,54%	100%	97,68%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	72,13%	100%	100%	100%	80,9%	100%	DINAS KESEHATAN
	Pesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	87,03%	100%	100%	100%	88,6%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	102,08%	100%	100%	100%	102,1%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	80,34%	100%	100%	100%	148,35%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	215,83%	100%	108,48%	100%	100%	100%	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	65%	45/100000 penduduk	65%	45/100000 penduduk	0.65	50/100000 penduduk	0.65	50/100000 penduduk	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	50%		50%	75%	50%	75%	50%	100%	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada	75%	75%	75%	75%	75%	85%	85%	100%	DINAS KESEHATAN
	Persentase kelurahan dan kecamatan sehat	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	DINAS KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,14%	76.50%	82,30%	75.00%	60,48%	75.00%	63,64%	75%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah kota	0	67.50%	0	70.00%	0	75.00%	0	98.5%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota	33,10%	58%	49,44%	75%	49,92%	82%	70%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	33,10%	75%	49,44%	80%	49,92%	85%	50,58%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	90%	90%		94%		96%		100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun	40%	45%		50%		60%		80%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat	60%	50%		70		80%		90%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Rasio kepatuhan IMB	100%	1	100%	1	100%	1	12%	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	84%	84%	452,66	85.90%	456,54	86.97%	372,46	90%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Tingkat kemantapan jalan kota	472,66 Km	544,58 Km	85.72%	544,58 Km	86,56%	544,58 Km	72,89%	544,58 Km	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional				65%		70%		75%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik	95.38%	75	95,82%	80%	99,70%	90%	94,12%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase Kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	30	40	40	50%	50%	60%	50	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	25,00%	20%	21.13%	18%	28,26%	20%	45,45%	25%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100	100%	100%	100%	100%	83,33%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	95	100%	95	100%	97	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN**
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH	3.35%	3.34%	3,33%	3.30%	4,29%	2.80%	4,4%	2.30%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	77,81%	50%	77.81%	20%	0%	10%	0%	5%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	NA	50%	0	100%	0	100%	0	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	0%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.39%	0.71%	8,49%	0.90%	0,45%	1.20%	61,1%	1.50%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANPERMUKIMAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi	NA	50%	0%	70%	0%	80%	0%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	95%	100.00%	94.44%	100.00%	94.74%	100.00%	97.06%	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	76,149%	100%	100%	100%	142,13%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	97,806%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	6.15%	100%	31,25%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	15 menit	100%	15 menit	100%	15 menit	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SOSIAL										**DINAS SOSIAL**
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	40%	0	55%	0%	60%	0%	70%	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	90%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	50%	100%	0%	50%	0%	50%	0%	50%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS SOSIAL
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR										
TENAGA KERJA										**DINAS TENAGA KERJA**
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35%	40%	0,23%	45%	0,066%	50%	0,54%	60%	DINAS TENAGA KERJA
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	60%	61.50%	88%	62%	89%	62.50%	95%	65.50%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	80%	80.50%	96,51%	80.50%	100.00%	90%	96,9%	90.75%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	75%	80.50%	3,52%	80.50%	2,82%	90%	3,5%	90.75%	DINAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	95	100%	95	100%	97	100%	DINAS TENAGA KERJA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										DINAS P3AD
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75%	76%	76%	77%	56,57%	78%	46,77%	80	DINAS P3AD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	0,03%	0,03%	0	0.02%	24,69%	0.02%	0,005%	0.02	DINAS P3AD
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	90%	DINAS P3AD
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS P3AD
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS P3AD
	Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	32%	32%	32%	31%	31%	30%	30%	28%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS P3AD
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS P3AD
PANGAN										DINAS PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0,2 (1 LPM)	0,4 (2 LPM)	0	0,4 (2 LPM)	0	0,6 (3 LPM)	0	1 (5 LPM)	DINAS PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	90%	92%	45,86%	94%	47,55 %	96%	48%	100%	DINAS PANGAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	100%	100%	160%	100%	415%	100%	93,54%	100%	DINAS PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	99%	100%	97,15%	100%	100%	100%	DINAS PANGAN
PERTANAHAN										
PROGRAM PENGOLAHAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	0	0	100%	0	100%	0	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota	100	100	100	100%	100	100%	100	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pelaksanaan penatagunaan tanah	100	100	100	100%	100	100%	100	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LINGKUNGAN HIDUP										**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	100%					100%	100%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,30%	60%	62,35%	60,70%	63,12%	61,40%	67,72%	62,8%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi kehati yang dikelola	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terlaksananya Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Terlaksananya Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terlaksananya Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	70%	80%	74,93%	90%	73,01%	100%	74,87	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan KTP Elektornik	97,54%	98,4%	95,52%	98,8%	96,5%	99,2%	97,13%	99,6%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan KIA	57,98%	60%	73,24%	62%	77,27%	64%	77,5%	70%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Perekaman KTP Elektronik	96,72	Sudah	95,52	Sudah	97,01	Sudah	97,29	Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	97,81%	98,2%	98,26%	98,4%	98,87%	98,6%	98,94%	99%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian	100%	98,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	6,81%	ada	70,45%	40,9%	70,45%	54%	70,45%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate / TFR	0.89	0,89	2,05%	0,87	2,05%	0,87	2%	0,65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,39	1,56	0,30	1,52	1,28	1,52	0,88	1,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	87.88	88,17	67,71%	88,18	53,21%	88,22	64%	88,38	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,94	7,75	21,05%	7,64	20,65%	7,53	22,78%	7,02	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	40	35	35	30	30	25	25	15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	29%	30%	30%	31%	31%	32%	32%	34%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,45	50	60,48	52	65,75	56	66,07	60	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	94	100%	95	100%	96	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERHUBUNGAN										**DINAS PERHUBUNGAN**
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kota	1	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	DINAS PERHUBUNGAN
	Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota	0,65	0,64	0,60	0,63	0,60	0,62	0,60	0,60	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	95	100%	95	100%	96	100	DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	100%	90%	100%	93%	100%	97%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										**DINAS KOPERASI DAN UMKM**
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	100%	100%	7.50%	100%	1.11%	100%	1.29%%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang berkualitas	90 Koperasi	100 Koperasi	2,53%	100 Koperasi	3,94%	100 Koperasi	100%	100 Koperasi	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)	Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi	40 Koperasi	50 Koperasi	2003 Koperasi	50 Koperasi	107 Koperasi	50 Koperasi	47 Koperasi	50 Koperasi	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	180 Peserta	180 Peserta	1,77%	180 Peserta	2,88%	180 Peserta	20,77	180 Peserta	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
PENANAMAN MODAL										**DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL**
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	85M	102,7M	272,601	107,8	78,805	118,6M	565,536	143,5M	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	135 PMDN	175 PMDN	814 PMDN	185 PMDN	1650 PMDN	200 PMDN	1028 PMDN	250 PMDN, 2 PMA	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	- Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	6 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	90,54	91	91,402	91,5	915,125	92	93,285	95	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja	NA	16.20%	17,12	17.3	16,3	18.5	29,4	20	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	-54%	5%	-11,80%	5%	28,91%	10%	260,93%	40%	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	50%	100%	89,95%	100%	96,48%	100%	96,73%	100%	DINAS PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	71,5%	74	17,63%	76,5	18,58%	78,5	78,5%	81,5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	47,30 %	48,11%	8,83%	48,96%	8,52%	16,64%	16,64%	51,64%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	38,01%	43,09%	32	46,66%	45	50,74%	50,74	67,5%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	79.50%	84,37%	84,37%	89,33%	89,33%	94.69	94.69	100%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	63.60%	67,42%	90	71.47%	93	75.76%	94	85.31%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
STATISTIK										**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	CAKUPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERSANDIAN										**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100%	100%	95%	100%	96%	100%	97%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEBUDAYAAN										**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan pelestarian sejarah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	50%	60%	19,23%	70%	100%	80%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PERPUSTAKAAN										**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpusatakaan	5%	5%	5%	15%	15%	20%	20%	100%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	5%	5%	72	5%	75	5%	79,14	25%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	5%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	95%	100%	93%	100%	95%	100%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN										**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	93%	100%	95%	100%	94%	100%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		500	500	500	500	500	500	500	3000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	300	300	1.947	300	3215,5	300	66,67	1800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	20	20	0	20	0	20	0	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PILIHAN										
KELAUTAN DAN PERIKANAN										**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)	90%	92%	92%	94%	94%	94%	94%	100%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan	90%	92%	92%	94%	94%	95%	95%	100%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PARIWISATA										**DINAS PARIWISATA**
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0 obyek	2 obyek	0,61%	3 obyek	1,11%	3 obyek	87.48%	5 obyek	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50%	90%	3,8%	92%	2,23%	94%	4,06%	98%	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	94%	100%	93%	100%	98%	100%	DINAS PARIWISATA
PERTANIAN										**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	90%	92%	92%	93%	93%	94%	94%	97%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna	90%	92%	92%	93%	93%	94%	94%	97%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner	90%	92%	92%	93%	93%	94%	94%	98%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN PERTANIAN	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian	90%	92%	92%	93%	93%	94%	94%	97%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani	91%	91%	91%	93%	93%	94%	94%	98%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	95%	100%	93%	100%	97%	100%	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
ENERGI										**DINAS TENAGA KERJA**
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	DINAS TENAGA KERJA
PERDAGANGAN										**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	50,7%	86%	77,50%	65%	100%	70%	100%	80%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	1 Unit%	1	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU	8.43%	8.20%	9.03%	8.10%	6.60%	8%	5%	7.80%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Pengembangan Produk Ekspor	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU	7.14%	15%	7,88%	30%	8,38%	80%	0,181%	85%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	NA	70%	81	70%	81%	70%	70	70%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN										**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	25%	100%	25%	100%	27,5%	100%	32,5%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	5%	16.39	5%	0	5%	4.887	5%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMAS IINDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	14%	95	14%	95%	15%	80	18%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN										
PERENCANAAN										**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	75%	100%	100%	85%	100%	90%	100%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	90%	90%	95.72%	94%	100%	96%	100%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEUANGAN										**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANPENDAPATAN DAERAH**
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	'Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	95%	100%	-10,24%	95%	-6,46%	95%	-0.52%	95%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1	1	17,12%	1	6,98%	1	3.14%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	31%	30%	-28,04%	29%	-24,94%	28%	-21,18%	26%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemet Aset	10.89%	10,8%	100%	10.89%	100%	10.89%	100%	100.00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	7.53%	100.00%	1,95%	8.93%	7,39%	9.62%	8,08%	55.65%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%%	100%	100%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KEPEGAWAIAN										**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHANSUMBER DAYA MANUSIA**
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerapan merit system yang menjadi kewenangan BKPSDM	30%	80%	87,5%	100%	87,5%	100%	87,5%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00%	100%	83.46%	100%	83,06%	100%	84,04%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	55,17%	12 Bulan	12 Bulan	55,17%	100%	55,17%	100%	55,17%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHANSUMBER DAYA MANUSIA**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	100%	23%	100%	16,48%	100%	29,82%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	19,17%	100%	16,48%	100%	14,73%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH**
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	50%	50%	50%	70%	50%	80%	50%	100%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	NA	10%	100%	20%	100%	30%	100%	50%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA	10%	100%	20%	100%	30%	100%	50%	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
INSPEKTORAT										**INSPEKTORAT**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	76.03%	78%	99.61%	79%	98%	80%	93.66%	80%	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3	Level 3	3	3	3	3	3,011	4	INSPEKTORAT
	Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	3	Level 3	3	3	3	3	3,27	4	INSPEKTORAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INSPEKTORAT
KECAMATAN TOMOHON UTARA										**KECAMATAN UTARA**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	75%	100%	96.64%	85%	100%	90%	86%	100%	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25	81,25%	96.09%	81,25%	96.09%	81,25%	90.40%	81,25%	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	80%	100%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	KECAMATAN UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	75%	100%	100%	85%	100%	85%	100%	95%	KECAMATAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	85%	100%	90%	100%	100%	KECAMATAN UTARA
KECAMATAN TOMOHON TIMUR										**KECAMATAN TIMUR**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%	KECAMATAN TIMUR

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	98%	100%	100%	98%	100%	98%	100%	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	81,25%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	KECAMATAN TIMUR
KECAMATAN TOMOHON TENGAH										**KECAMATAN TENGAH**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Baik (81.25)	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	90,44	81,25	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	KECAMATAN TENGAH
KECAMATAN TOMOHON BARAT										**KECAMATAN BARAT**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	KECAMATAN BARAT

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KECAMATAN BARAT
KECAMATAN TOMOHON SELATAN										**KECAMATAN SELATAN**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan Masyarakat	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	92,05	81,25	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	100	100	100	100	KECAMATAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN										**SEKRETARIAT DEWAN**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	70%	100%	88,29%	75%	92,62%	80%	94,82%	90%	SEKRETARIAT DEWAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan terintegrasinya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	53 kegiatan	100%	47 kegiatan	100%	34 kegiatan	100%	SEKRETARIAT DEWAN
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA	Persentase Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	100%	93%	100%	95%	100%	96%	100%	SEKRETARIAT DEWAN
SEKRETARIAT DAERAH										**SEKRETARIAT DAERAH**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	96%	100%	95%	100%	97%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa	100%	100%	100%	100%	89,44%	100%	89,44%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif	47 paket	57	58	80	45	100	54	467 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
	Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan	373 Miliar	410M	346	451M	316	496M	367	2400M	SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAHAN UMUM										**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Jumnlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	T	R	T	R	T	R	T	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1.5. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota

2.1.5.1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Kota Tomohon sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTRW Nasional menyebutkan bahwa dalam sistem perkotaan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dimana secara konektivitas jalan di Pulau Sulawesi terdapat:

- Jalan Nasional Manado-Tomohon Kawangkoan
- Jalan Nasional Jalan Nasional Tomohon-Tondano

Ruas jalan Nasional tersebut diatas merupakan kewenangan pemerintah Pusat, baik pembangunan & Rehabilitasi jalan/jembatan. Di Kota Tomohon juga terdapat ruas Jalan Provinsi yaitu Jalan Tanawangko-Tomohon-Tondano, baik pembangunan & Rehabilitasi jalan/jembatan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2.1.5.2. Kawasan Strategis

Kawasan strategis untuk didanai oleh APBN maupun APBD Provinsi di Kota Tomohon didasarkan pada Perpres 16 Tahun 2024 tentang Destinasi Pariwisata Manado-Likupang, Kota Tomohon merupakan *key tourism area* dengan ± 70 Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang tersebar di Kota Tomohon. Untuk penanganan DTW dapat diusulkan untuk melalui pendanaan APBN dan APBD Provinsi.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pada arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon merupakan sistem perkotaan Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado) yang merupakan kawasan metropolitan. Untuk menunjang kawasan metropolitan dimaksud, maka kota Tomohon terdapat kawasan strategis perkotaan:

- Kawasan pusat perkotaan (yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perkotaan dimana terdapat menara sebagai penanda kota/landmark dan juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau). Kawasan ini juga meliputi telaga Sineleyan

selain berfungsi sebagai ruang terbuka biru, juga sebagai sistem pengendali banjir alami.

- Kawasan Danau Linow, Kawasan Air Terjun Tekaan Telu & Kawasan Hutan Pinus Lahendong (masuk dalam DTW dalam Perpres 16 Tahun 2024 tentang Destinasi Pariwisata Manado-Likupang).
- Kawasan *show window* di kecamatan Tomohon Utara yang berfungsi sebagai pusat benih pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan.
- Kawasan Sport Center

Kawasan strategis perkotaan ini, dapat diusulkan untuk melalui pendanaan APBN dan APBD Provinsi dan sumber pendanaan lain.

2.1.5.3. Irigasi

Dalam hal mendukung mendukung ketahanan pangan melalui sapras irigasi, Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai tidak memiliki kewenangan di Kota Tomohon, karena kewenganan pemerintah pusat pada areal irigasi ±3.000 Ha. Penanganan irigasi oleh pemerintah pusat pada area persawahan non jaringan irigasi/sawah tadah hujan dengan pembangunan JIAT (jaringan irigasi air tanah). Kewenangan pemerintah pusat untuk penanganan irigasi dapat diperkecil sampai pada irigasi teknis berdasarkan kebijakan pemerintah.

2.1.5.4. Persampahan

Sebagai bagian dari sistem wilayah pelayanan TPA Regional, maka penanganan persampahan di masa mendatang akan dikelola secara regional.

2.1.6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksananya, telah memberikan penguatan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana BUMD didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karekteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah yang dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Pemerintah Kota Tomohon sampai dengan tahun 2025 hanya memiliki 2 Perusahaan Daerah (PD), belum berbentuk BUMD yaitu:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tomohon yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tomohon.
2. Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar.

2.1.7. Kerjasama Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama daerah diartikan sebagai kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama antar daerah diatur dalam Pasal 363 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerjasama antar daerah ini dapat dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kerjasama wajib adalah apabila dilaksanakan kerja sama antar daerah yang berbatasan

untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerjasama sukarela adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama. Kebijakan kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari aspek SDM, kemampuan keuangan, manajemen, maupun teknologi. Oleh karena itu, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kota Tomohon membutuhkan dukungan dari berbagai pihak/stakeholder pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas) untuk bersama-sama dalam satu kolaborasi secara sinergis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tomohon. Pemerintah Kota Tomohon memandang bahwa dengan kolaborasi, tujuan pembangunan akan tercapai lebih efektif. Namun demikian, kerjasama tersebutharus dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah dan bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan kemajuan daerah yang dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dengan asas saling menguntungkan.

Tabel 2.76 Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Tomohon

No	Bentuk Kerja Sama	Jumlah Kerjasama / Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
I	**Kerjasama Dalam Negeri**						
1	Kerja Sama antardaerah	-	-	-	1	3	4
2	Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non	1	-	3	4	2	10

No	Bentuk Kerja Sama	Jumlah Kerjasama / Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Kementerian atau Sebutan Lain						
3	Kerja Sama dengan Badan Hukum	-	-	1	2	-	3
4	Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi	-	2	4	2	2	10
II	**Kerja Sama Luar Negeri**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah	1	2	8	9	7	27

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tomohon, 2025

2.1.8. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Kota Tomohon telah menerapkan SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah.

Grafik 2.42 Capaian SPM Kota Tomohon Tahun 2024

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Melihat data capaian SPM tahun 2024, maka secara rata-rata sudah berada di atas angka 90% (kategori Tinggi) meskipun baru 1 urusan yang sudah mencapai 100% yaitu urusan Perumahan dan Permukiman.

2.1.9. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap kondisi umum daerah, capaian TPB yang relevan, dan pembagian peran antara pemerintah dan mitra pemerintah. Adapun sebaran kewenangan pemerintah terhadap jumlah indikator TPB adalah sebagai berikut:

1. Indikator yang menjadi kewenangan Pusat: 399
2. Indikator yang menjadi kewenangan Provinsi: 235
3. Indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten: 220
4. Indikator yang menjadi kewenangan Kota: 222

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut maka Kota Tomohon memiliki 222 indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah yang harus dianalisis. Identifikasi awal dilakukan dengan memetakan indikator TPB yang relevan dan tidak relevan bagi Kota Tomohon dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan 17 TPB yang harus dianalisis khusus TPB 13 yaitu Ekosistem Laut (terdapat 5 indikator) tidak relevan untuk Kota Tomohon. Selanjutnya dari 222 indikator terdapat 14 indikator yang tidak relevan sehingga jumlah indikator TPB yang akan dianalisis untuk Kota Tomohon adalah 208 indikator.

Hasil analisis capaian indikator TPB dalam 4 (empat) kategori capaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.77. Capaian TPB Kota Tomohon Tahun 2019 - 2024

No	TPB	Jumlah Indikator	Persentase
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	118	56,73 %
2	Indikator TPB yang dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	70	33,65 %
3	Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)	1	0,48 %
4	Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)	19	9,13 %
	TOTAL	**208**	**100%**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD, 2025

Selanjutnya secara rinci 208 indikator TPB yang dianalisis untuk menopang pembangunan Kota Tomohon 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.78. Kondisi Pencapaian Indikator TPB Kota Tomohon

TPB	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	Indikator TPB yang dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)	Indikator Tyang tidak/belum ada data PB (NA)	Jumlah
1	11	12	0	1	24
2	4	6	0	1	11
3	23	11	0	0	34
4	10	2	0	1	13
5	12	2	0	0	14
6	7	8	0	1	16
7	1	0	1	0	2
8	8	9	0	2	19
9	5	1	0	3	9
10	2	3	0	1	6
11	9	2	0	2	13
12	0	1	0	4	5
13	1	0	0	1	2

TPB	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	Indikator TPB yang dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)	Indikator Tyang tidak/belum ada data PB (NA)	Jumlah
15	0	3	0	1	4
16	13	7	0	1	21
17	12	3	0	0	15
Total	118	70	1	19	208
%	56,73	33,65	0,48	9,13	100

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD, 2025

Dari total 208 indikator yang relevan di Kota Tomohon, terdapat 118 indikator (56,73%) sudah mencapai target nasional (SS). TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera merupakan *goals* dengan indikator pencapaian terbanyak (23 indikator) dan TPB 1 Tanpa Kemiskinan (11 indikator) yang masuk kategori SS.

Dari total 208 indikator yang relevan di Kota Tomohon, terdapat 70 indikator (33,65%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB). TPB 1 Tanpa Kemiskinan sejumlah 12 indikator, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera sejumlah 11 indikator dan TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9 indikator. Dan tidak ada kategori SB pada TPB 7 dan TPB 13.

Dari total 208 indikator yang relevan di Kota Tomohon, sesuai hasil analisis pokja KLHS didapatkan 19 atau sebesar 9,13% indikator yang tidak/belum ada data (N/A) yaitu terbanyak di TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur (3 indikator) dan TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (4 indikator).

Secara umum pencapaian TPB Kota Tomohon masih perlu ditingkatkan karena dari 208 indikator, hanya 118 indikator (56,73%) yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Melihat dari proporsi yang cukup besar adalah kategori NA (9,13%) atau tidak tersedia datanya, tentu saja hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan, rencana dan program. Oleh karena itu, indikator TPB yang datanya tidak

tersedia perlu untuk dilengkapi datanya, sehingga di masa mendatang pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan, rencana dan program dapat menjadi lebih baik lagi.

Dari total 208 indikator yang relevan di Kota Tomohon, TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau (1 indikator) yang belum dilaksanakan dan belum mencapat target nasional (BB).

Isu strategis juga dirumuskan dengan pertimbangan kondisi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan, kondisi wilayah perencanaan terutama Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan dan kajian muatan KLHS, serta target pencapaian TPB. Berdasarkan hasil capaian indikator TPB, maka TPB yang dipertimbangkan menjadi masukan isu utama adalah TPB dengan jumlah indikatornya masih banyak yang belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai berikut:

1. TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. TPB 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. TPB 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. TPB 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
6. TPB 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Selanjutnya isu pencapaian TPB Kota Tomohon disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
2. Peningkatan Masalah Gizi dan Kesehatan.
3. Belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan pariwisata.

4. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih dan sanitasi.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.2.1.Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Pemerintah Kota Tomohon, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kota Tomohon tahun 2020-2024.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Tomohon dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2020 sebesar Rp. 667.630.201.368 dan meningkat menjadi Rp. 700.942.050.345 pada tahun 2024 atau naik rata-rata per tahun sebesar 0,98%. Namun jika dilihat tingkat pertumbuhan setiap tahun terjadi fluktuasi. Fluktuasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 13,77% dari tahun sebelumnya tahun 2023, dan terendah pada tahun 2022 yaitu terjadi penurunan sebesar -8,55% dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2021. Hal ini signifikan terjadi salah satunya lewat penurunan realisasi Dana Insentif Daerah. Pada tahun 2021, realisasi Dana Insentif Daerah turun sebesar -22,75% dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2022 turun sebesar -88,85% dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 berjumlah Rp.41.703.826.008 dan meningkat menjadi Rp. 56.610.368.559 pada tahun 2024 atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,83%. Pertumbuhan tertinggi Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 61,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Perolehan terbesar ini berasal dari realisasi Retribusi Daerah dalam pos Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.

Dari 4 sumber Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan penerimaan per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan PAD lainnya yaitu sebesar 35,89%. Lain-lain PAD yang sah menunjukkan pertumbuhan tertinggi kedua, yaitu dari Rp. 7.654.806.544 pada tahun 2020 menjadi Rp. 18.704.066.179 pada tahun 2024 atau

pertumbuhan sebesar 19,56%. Pajak Daerah mengalami pertumbuhan di angka 9% per tahun, pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.066.997.354 menjadi Rp. 32.408.637.667 di tahun 2024. Sedangkan Retribusi daerah mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.775.914.307 turun menjadi Rp. 2.817.579.468 atau turun sebesar negatif 18,37 per tahun. Salah satu penyebabnya adalah perubahan kebijakan sejak tahun 2021, terjadi penyesuaian pencatatan penganggaran dan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kelompok pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Beberapa permasalahan optimalisasi pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

- Belum optimalnya aktualisasi potensi pendapatan daerah pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah.
- Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- Belum optimalnya pemutakhiran secara *realtime* potensi *database* sumber-sumber penerimaan daerah.
- Belum optimalnya wajib pajak/retribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pembayaran retribusi.
- Penerapan sanksi bagi wajib pajak dan retribusi belum optimal.
- Peningkatan penertiban wajib pajak yang tidak patuh yang ditunjang dengan SOP.
- Penetapan target belum sesuai potensi daerah.

Tabel 2.79 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**667.630.201.368**	**670.305.077.992**	**612.988.723.399**	**616.085.781.556**	**700.942.050.435**	**0,98%**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**37.076.155.678**	**59.733.273.584**	**49.458.534.506**	**45.621.779.436**	**56.610.368.559**	**8,83%**
4.1.01	Pajak Daerah	21.066.997.354	25.482.015.868	28.842.474.244	28.947.262.458	32.408.637.667	9,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.775.914.307	29.739.341.017	13.537.713.913	10.411.226.522	2.817.579.468	-18,37%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	578.437.473	665.906.084	1.045.242.133	2.259.523.381	2.680.085.246	35,89%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	7.654.806.544	3.846.010.615	6.033.104.216	4.003.767.075	18.704.066.179	19,56%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**624.627.661.473**	**595.913.729.106**	**555.782.116.304**	**561.266.621.366**	**636.340.326.806**	**0,37%**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**612.116.053.744**	**577.924.127.886**	**527.431.115.850**	**533.591.605.885**	**607.975.488.514**	**-0,14%**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	533.738.937.744	517.379.156.886	520.680.973.850	513.238.262.885	595.042.142.514	2,20%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal Daerah	78.377.116.000	60.544.971.000	6.750.142.000	20.353.343.000	12.933.346.000	-30,26%
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**12.511.607.729**	**17.989.601.220**	**28.351.000.454**	**27.675.015.481**	**28.364.838.292**	**17,79%**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	12.511.607.729	17.989.601.220	28.351.000.454	27.675.015.481	28.364.838.292	17,79%
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.926.384.217**	**14.658.075.301**	**7.748.072.589**	**9.197.380.754**	**7.991.355.070**	**6,16%**

Sumber: LRA Audited Kota Tomohon 2019-2024 (diolah)

Dari sumber Pendapatan Transfer, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami rata-rata pertumbuhan menurun yaitu sebesar negatif 0,14% setiap tahunnya. Dana perimbangan sebesar Rp. 533.738.937.744 pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 595.042.142.514 atau naik rata-rata sebesar 2,20%. Sedangkan Dana Insentif Daerah / Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp. 78.377.116.000 pada tahun 2019 turun menjadi 12.933.346.000 di tahun 2024 atau rata-rata turun sebesar negatif 30,26% per tahun.

Tabel 2.80 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Kota Tomohon Tahun 2019-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Dana Perimbangan	533.738.937.744	517.379.156.886	520.680.973.850	513.238.262.885	595.042.142.514	2,20%
Dana Insentif Daerah (DID)	78.377.116.000	60.544.971.000	6.750.142.000	20.353.343.000	12.933.346.000	-30,26%

Sumber: LRA Audited Kota Tomohon 2020-2024 (diolah)

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kota Tomohon masih tergantung pada transfer Pemerintah pusat. Namun diharapkan lewat pertumbuhan positif PAD dapat menunjang perwujudan kemandirian fiskal daerah. Perlu diberikan perhatian khusus untuk sektor-sektor yang bisa menyumbang lebih dalam PAD Kota Tomohon.

Grafik 2.43 Struktur Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Kota Tomohon Tahun 2020-2024

Sumber: LRA Audited Kota Tomohon 2020-2024 (diolah)

Sejalan dengan pertumbuhan per tahun pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas, pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik mengalami rata-rata kenaikan. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp. 400.737.393.000 meningkat menjadi Rp. 424.328.577.685 di tahun 2024 atau naik rata-rata sebesar 1,15 % per tahun. Demikian juga untuk DAK Fisik pada tahun 2020 sebesar Rp. 55.189.273.078 naik menjadi Rp. 70.435.760.476 di tahun 2024 atau rata-rata naik sebesar 5% per tahun. DAK Non Fisik mengalami penurunan negatif 0,80% setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp. 56.796.727.511 menjadi Rp. 54.571.139.353.

Tabel 2.81 Realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Tomohon Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
DAU	400.737.393.000	393.236.341.106	393.387.326.000	408.998.612.000	424.328.577.685	1,15%
DAK FISIK	55.189.273.078	39.430.712.776	26.034.847.959	19.715.255.661	70.435.760.476	5,00%
DAK NON FISIK	56.796.727.511	40.931.202.238	48.263.272.589	53.593.699.839	54.571.139.353	-0,80%

Sumber: LRA Kota Tomohon 2019-2023 (diolah)

Selama periode tahun 2020-2024, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang yang selalu pada angka di atas 97%, bahkan pada tahun 2021 bisa melebihi 100%.

Tabel 2.82 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2019-2024

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
2020	694.837.152.752,00	667.630.201.368,00	96,08%
2021	658.510.614.314,00	670.305.077.991,58	101,79 %
2022	617.430.351.183,00	612.988.723.398,64	99,28%
2023	632.808.516.000,00	616.085.781.555,93	97,36%

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
2024	722.903.035.428,00	700.942.050.435,16	96,96%

Sumber: LRA Kota Tomohon 2019-2023 (diolah)

Cukup tingginya pencapaian target pendapatan daerah sebenarnya dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, kinerja pengelola pendapatan daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan; kedua, rencana pendapatan yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola pendapatan daerah untuk merealisasikannya. Dari kedua perspektif tersebut mempunyai implikasi sama, bahwa pengelola pendapatan daerah perlu diberikan tantangan berupa target yang lebih tinggi di masa mendatang.

2.2.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Secara umum dari tahun 2020 – 2024, anggaran Belanja Pemerintah Kota Tomohon mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,02% per tahun. Hal ini sejalan juga dengan Pendapatan Pemerintah Kota Tomohon yang juga mengalami peningkatan sebesar 0,98% per tahun. Tabel menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jumlah nominal Belanja Daerah Kota

Tomohon tahun 2020 sebesar Rp. 657.722.536.985 meningkat menjadi Rp. 691.865.407.875.

Belanja operasi diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan, Belanja Modal diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Berdasarkan realisasinya, Belanja Operasi Pemerintah Kota Tomohon memiliki rata-rata pertumbuhan 3,18% sedangkan realisasi Belanja Modal memiliki rata-rata pertumbuhan menurun yaitu sebesar negatif 8,79%. Pemerintah Kota Tomohon perlu untuk meningkatkan anggaran dalam Belanja Modal dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Perbedaan dalam realisasi belanja Operasional dan Belanja Modal juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kota Tomohon yang masih rendah, sehingga anggaran masih diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib daerah dan beberapa penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) sehingga pada akhirnya berimplikasi pada terbatasnya kesediaan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis daerah termasuk untuk belanja infrastruktur.

Pada tahun 2021, belanja Pegawai mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari Rp. 333.285.695.379 menjadi Rp. 276.786.477.879 atau turun sebesar negatif 16,95%. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan struktur komponen belanja sebagaimana amanat PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana kelompok Belanja Honorarium Non PNS di tahun 2020 masuk dalam kategori Belanja Pegawai, tetapi di tahun 2021 berubah menjadi kategori Belanja Jasa dalam komponen Belanja Jasa Kantor.

Untuk Belanja Barang dan Jasa tumbuh positif di angka pertumbuhan 11,30%. Sedangkan untuk Belanja Modal rata-rata pertumbuhan menurun di angka negatif 8,79%. Dari komponen belanja Modal, yang tumbuh positif hanya Belanja Modal Gedung

dan Bangunan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 4,12%, selain itu komponen belanja modal lainhyya dalam pertumbuhan negatif.

Tabel 2.83 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
5	BELANJA DAERAH	657.722.536.985	617.999.441.837	719.395.891.239	638.548.358.937	691.865.407.875	1,02%
5.1.	BELANJA OPERASI	520.964.678.779	512.450.218.882	576.537.321.401	576.792.987.304	609.186.960.465	3,18%
5.1.01	Belanja Pegawai	333.285.695.379	276.786.477.879	273.426.152.156	270.756.377.791	294.191.910.833	-2,46%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.308.970.550	224.897.938.415	264.307.400.903	264.479.014.861	260.092.565.976	11,30%
5.1.03	Belanja Bunga	-	185.656.015	6.203.259.107	6.411.962.865	5.750.485.843	-2,49%
5.1.05	Belanja Hibah	31.703.412.850	8.204.646.573	21.401.009.235	24.625.631.787	45.015.997.813	7,26%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.666.600.000	2.375.500.000	11.199.500.000	10.520.000.000	4.136.000.000	2,44%
5.2.	BELANJA MODAL	123.865.876.528	93.750.679.790	137.214.127.534	56.985.496.813	78.188.447.410	-8,79%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	552.240.000	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.592.057.397	24.663.320.080	14.978.993.947	25.062.341.241	7.364.439.874	-25,73%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.818.482.046	13.915.819.469	20.907.026.782	7.648.668.760	45.044.739.743	4,12%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.281.578.185	54.911.135.341	99.350.956.005	23.257.836.576	25.092.690.093	-11,14%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.173.758.900	260.404.900	1.977.150.800	464.410.236	536.827.700	-43,32%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	149.750.000	
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.330.597.105	11.798.543.165	5.644.442.304	4.769.874.820	4.490.000.000	-21,46%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.330.597.105	11.798.543.165	5.644.442.304	4.769.874.820	4.490.000.000	-21,46%

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
5.4.	BELANJA TRANSFER	561.384.573	-	-	-	-	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	561.384.573	-	-	-	-	

Sumber: LRA Audited Kota Tomohon 2030-2024 (diolah)

2.2.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kota Tomohon tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kota Tomohon sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah yaitu lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sedangkan pengeluran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan pengembalian sisa dana pinjaman PEN.

Tabel 2.84 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.017.237.896	83.173.124.267	160.595.554.453	50.188.386.612	20.864.208.679	62,16%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.017.237.896	12.924.902.279	131.489.236.584	50.188.386.612	20.864.208.679	62,16%
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	70.248.221.988	29.106.317.869	-	-	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	20.559.091.300	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				2.861.600.552	16.559.091.300	
	PEMBIAYAAN NETTO	3.017.237.896	79.173.124.267	156.595.554.453	46.188.386.612	305.117.379	-43,61%

Sumber: LRA Audited Kota Tomohon 2019-2023 (diolah)

2.2.2.Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Neraca Pemerintah Kota Tomohon ditunjukkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.85 Neraca Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Aset	1.799.744.416.760	1.770.487.711.914	1.736.161.488.918	1.708.952.360.478,42
Kewajiban	98.093.777.574	127.223.687.728	121.746.021.594	120.110.691.615,99
Ekuitas	1.701.650.639.186	1.643.264.024.185	1.614.415.467.324	1.588.841.668.862,43

Sumber: LKPD Kota Tomohon

2.2.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Tomohon, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah atau Masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Tabel 2.86 Rincian Aset Kota Tomohon Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar	172.245.216.665	84.211.355.616	52.389.898.521	41.532.963.140,86
Investasi Jangka Panjang	31.588.801.606	35.417.128.696	38.512.948.540	40.526.281.575
Aset Tetap	1.349.472.782.251	1.398.744.018.224	1.382.596.403.976	1.408.929.047.271,89
Aset lainnya	246.437.616.236	252.115.209.376	262.662.237.880	217.964.068.490,67
Jumlah	1.799.744.416.760	1.770.487.711.914	1.736.161.488.918	1.708.952.360.478,42

Sumber: LKPD Kota Tomohon

Investasi permanen merupakan nilai investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah Kota Tomohon pada:

Tabel 2.87 Investasi Permanen Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
PT Bank Sulut Go	8.854.700.000	12.854.700.000	16.854.700.000	20.854.700.000
PDAM	15.994.124.932	15.745.210.201	15.298.102.740	14.954.714.097
PD Pasar	6.739.976.674	6.817.218.495	6.360.145.800	4.716.867.488
Total	31.588.801.606	35.417.128.696	38.512.948.540	40.526.281.575

Sumber: LKPD Kota Tomohon

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau masyarakat umum.

Tabel 2.88 Rincian Aset Tetap Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Tanah	402.607.983.007,32	400.917.117.007,32	409.053.308.487	410.218.345.663,08
Peralatan dan Mesin	266.999.942.877,72	280.947.346.204,43	307.563.143.340	314.529.108.272,98
Gedung dan Bangunan	465.573.112.164,22	493.917.568.137,22	506.946.784.111	533.637.951.366,42
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.183.593.532.756,58	1.298.129.737.361,11	1.329.314.562.974	1.388.183.721.093,86
Aset Tetap Lainnya	25.660.390.270,53	27.369.970.370,55	27.564.769.270	5.421.350.988,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.428.703.614,10	11.630.217.546,69	3.713.135.723	20.316.829.939,23
Akumulasi Penyusutan	(1.020.390.882.438,12)	(1.114.167.938.402,45)	(1.201.559.299.930,56)	(1.263.378.260.052,28)

Jumlah	1.349.472.782.251,90	1.398.744.018.224,87	1.382.596.403.976,27	1.408.378.260.052,28

Sumber: LKPD Kota Tomohon

Aset lainnya terdiri dari penambahan dan pengurangan TGR, penambahan kemitraan dengan pihak ketiga, penambahan asset tidak berwujud, penambahan dana transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan asset lain-lain.

2.2.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban di neraca terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Adapun yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Tomohon digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.89 Rincian Kewajiban Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Kewajiban Jangka Panjang	70.248.221.988,00	99.354.539.857,00	79.933.848.005,00	63.374.756.705
Kewajiban Jangka Pendek	27.845.555.586,49	27.869.147.871,61	41.812.173.589,19	56.735.934.910,99
Total	98.093.777.574,49	127.223.687.728,61	121.746.021.594,19	120.110.691.615,99

Sumber: LKPD Kota Tomohon

Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp 63.374.756.705,00 merupakan Pengurangan atas reklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp16.559.091.300,00 untuk Pembayaran Pokok Utang Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk

Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

2.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Tomohon, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tomohon. Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.588.841.668.862,43 mengalami penurunan sebesar Rp25.573.798.462,18 dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.614.415.467.324,61.

Tabel 2.90 Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Ekuitas	1.701.650.639.186,13	1.643.264.024.185,39	1.614.415.467.324,61	1.588.841.668.862,43

Sumber: LKPD Kota Tomohon

2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga kemungkinan defisit anggaran ditiadakan. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah haruslah pada kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi

yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah.

a) Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2021-2024, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan dana perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribus.
2. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan perangkat daerah terkait.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah.
5. Pemanfaatan sistem digitalisasi untuk pungutan pendapatan daerah.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

b) Proyeksi Belanja Daerah

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan

pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Tomohon.
2. Penganggaran belanja diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat / SPM.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
4. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.
5. Melihat kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Pemanfaatan belanja dilakukan secara efktif dan efisien berdasarkan prinsip *money follow programs* dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan anggaran. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan

daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat (mandatory spending).
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas; dan
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja non urusan yang tidak mengikat.

c) Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efi siensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD/Perumda dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Pada periode RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kota Tomohon akan mengajukan pinjaman ke PT SMI untuk pembangunan / revitalisasi infrastruktur untuk penunjang perekonomian (pasar), sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bagi daerah. Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal dan pelunasan hutang pinjaman.

Tabel 2.91 Proyeksi APBD Kota Tomohon Tahun 2026-2030

KODE	URAIAN	BASELINE 2024	BASELINE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**722.444.874.428**	**675.654.907.178**	**706.367.196.906**	**728.203.651.000**	**749.782.560.600**	**775.421.557.700**	**800.247.768.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**73.293.699.632**	**76.508.899.806**	**79.685.971.745**	**87.371.786.000**	**93.446.107.800**	**103.107.915.000**	**114.715.455.000**
4.1.01	Pajak Daerah	38.987.848.033	42.975.585.646	42.630.256.745	46.761.071.000	51.450.392.800	57.097.200.000	67.049.740.000
4.1.02	Retribusi Daerah	8.573.395.600	25.273.145.000	30.805.000.000	34.135.000.000	35.445.000.000	38.910.000.000	40.515.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.680.085.246	3.800.000.000	3.800.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	23.052.370.753	4.460.169.160	2.450.715.000	2.475.715.000	2.550.715.000	2.600.715.000	2.650.715.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**638.088.614.796**	**588.507.573.372**	**615.792.791.161**	**629.943.431.000**	**645.198.018.800**	**660.925.208.700**	**674.143.879.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	611.611.557.470	562.141.848.000	600.896.087.320	614.776.345.000	629.107.942.800	643.820.060.000	658.964.760.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.477.057.326	26.365.725.372	14.896.703.841	15.167.086.000	16.090.076.000	17.105.148.700	15.179.119.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11.062.560.000**	**10.638.434.000**	**10.888.434.000**	**10.888.434.000**	**11.138.434.000**	**11.388.434.000**	**11.388.434.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.062.560.000	10.638.434.000	10.888.434.000	10.888.434.000	11.138.434.000	11.388.434.000	11.388.434.000
5	**BELANJA DAERAH**	**722.749.991.807**	**664.152.837.165,71**	**731.167.196.906**	**702.003.651.000**	**722.582.560.600**	**745.221.557.700**	**796.247.768.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**635.920.889.120,80**	**581.041.235.981,80**	**583.676.579.113,00**	**567.923.658.250,00**	**575.533.658.250,00**	**588.533.658.250,00**	**605.850.000.000,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	297.616.148.013,60	308.491.801.734	309.022.981.699	238.890.000.000	244.690.000.000	252.000.000.000	267.100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.007.876.508,37	248.805.806.018,42	250.869.939.164	304.750.000.000	308.560.000.000	312.750.000.000	318.750.000.000

KODE	URAIAN	BASELINE 2024	BASELINE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.03	Belanja Bunga	5.750.654.740	6.079.714.153	9.783.658.250	9.283.658.250	9.283.658.250	9.283.658.250	-
5.1.05	Belanja Hibah	45.801.208.858,83	15.263.584.853,38	10.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.745.001.000	2.400.329.223	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.500.000.000	10.000.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**81.235.588.018**	**77.018.900.629,70**	**137.490.617.793**	**121.629.992.750**	**137.048.902.350**	**146.687.899.450**	**178.397.768.000**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	625.000.000	1.000.000.000	1.150.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.984.618.986,25	17.976.815.219,95	15.586.918.222	20.000.000.000	22.560.000.000	23.560.000.000	25.600.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.954.850.518	16.981.421.139,75	61.787.039.004	36.365.000.000	38.500.000.000	38.805.000.000	41.500.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.618.579.314	40.205.790.545	58.072.521.892	61.114.992.750	71.488.902.350	78.822.899.450	103.297.768.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	527.539.200	1.114.873.725	1.044.138.675	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000	115.000.000	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.593.514.667,95	6.092.700.554,21	10.000.000.000,00	12.450.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.593.514.667,95	6.092.700.554,21	10.000.000.000	12.450.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS /DEFISIT	**(305.117.379)**	**11.502.070.012**	**(24.800.000.000)**	**26.200.000.000**	**27.200.000.000**	**30.200.000.000**	**4.000.000.000**
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.864.208.679	9.381.759.939	60.000.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.864.208.679	9.381.759.939	10.000.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000

KODE	URAIAN	BASELINE 2024	BASELINE 2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1.02	Penerimaan Pinjaman	-		50.000.000.000	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.559.091.300	20.700.000.000	35.200.000.000	34.200.000.000	33.200.000.000	34.200.000.000	6.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.559.091.300	16.700.000.000	29.200.000.000	29.200.000.000	29.200.000.000	29.200.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	305.117.379	(11.318.240.060,79)	24.800.000.000	(26.200.000.000)	(27.200.000.000)	(30.200.000.000)	(4.000.000.000)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	183.829.952	-	-	-	-	-
	TOTAL APBD	**743.309.083.107**	**685.036.667.117,21**	**766.367.196.906**	**736.203.651.000**	**755.782.560.600**	**779.421.557.700**	**802.247.768.000**

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tomohon Tahun 2025-2029. Isu strategis merupakan tantangan / peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tomohon.

Permasalahan Pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggara tiap urusan Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan
   1) Berkurangnya guru dan tenaga kependidikan ASN karena pensiun/meninggal tidak sebanding dengan rekrutmen sehingga proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga non ASN dengan kualifikasi dan gaji terbatas.
   2) Terbatasnya kemampuan sekolah-sekolah swasta dalam memberikan honor/gaji kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.
   3) Masih kurangnya guru / tenaga pendidik yang bersertifikasi profesional.
   4) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pembelajaran dalam keadaan baik.
   5) Masih kurangnya tenaga pendidik PAUD yang sesuai dengan spesifikasi pendidik/S1 PAUD.

6) Kurangnya penguasaan / kecakapan teknologi informasi oleh guru dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses belajar mengajar.
7) Tuntutan kompetensi guru dan siswa di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk nilai-nilai budi pekerti dan karakter, untuk meningkatkan mutu dan mampu berdaya saing di daerah/nasional/internasional.
8) Capaian kemampuan numerasi peserta didik SD dan SMP masih berada dalam kategori Rendah (SD) dan Sedang (SMP).
9) Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta.
10) Jumlah PAUD terakreditasi Baik masih kurang.

2. Urusan Kesehatan
   1) Kurangnya integrasi layanan AIDS, TBC, dan Malaria dengan layanan kesehatan primer lainnya seringkali menyebabkan penemuan kasus yang terpecah-pecah dan penanganan yang tidak komprehensif.
   2) Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan. Kota Tomohon masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular.
   3) Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan baik di puskesmas maupun RSUD Anugerah.
   4) Masih rendahnya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terkait sarana air minum dan belum meratanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.
   5) Upaya peningkatan promosi kesehatan dan masyarakat belum optimal.
   6) Belum optimalnya kapasitas pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
   7) Masih terdapat masalah terkait tingkat kematian Ibu, kematian Balita, dan kasus stunting.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   1) Secara geometrik pembangunan infrastruktur jalan belum sesuai.

2) Pembangunan infrastruktur jalan belum memenuhi target yang direncanakan secara maksimal serta belum dilakukan perencanaan pembangunan secara terpadu.
3) Belum tersedianya Peraturan Daerah terbaru mengenai RTRW Kota Tomohon, termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
4) Belum adanya sistem informasi terkait penataan ruang yang dapat di akses secara *online* oleh masyarakat umum.
5) Cakupan pelayanan air bersih perpipaan masih rendah dan ketersediaan sumber air baku terbatas.
6) Jaringan infrastruktur air minum yang lama sudah memerlukan rehabilitasi/perbaikan.
7) Pada titik-titik tertentu terjadi genangan air pada saat curah hujan tinggi.
8) Belum maksimalnya fungsi dari sistem jaringan irigasi sehingga timbulnya kerusakan pada saluran irigasi.
9) Belum maksimalnya sistem saluran pembuangan air / drainase.
10) Belum memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
11) Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman.
12) Belum optimalnya sarana dan prasarana persampahan.
13) Belum optimalnya pemanfaatan dan penguasaan tanah yang tertib dan teratur sesuai kemampuan dan fungsinya.
14) Belum optimalnya PAD dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   1) Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Permasalahan utamanya adalah pemenuhan *readiness criteria* atau persyaratan sebagai penerima bantuan hibah perbaikan RTLH, terutama dalam hal legalitas kepemilikan lahan dan kemampuan masyarakat pemilik RTLH untuk berswadaya / partisipasi dalam pelaksanaan program perbaikan RTLH.

2) Masih cukup tingginya angka *backlog* perumahan atau tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinya.
3) Karakterisitik alam di Kota Tomohon dengan kontur tanah yang berbukit-bukit menyebabkan ketersediaan lahan efektif untuk perumahan permukiman sangat terbatas. Ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan sarana hunian meningkat. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah produktif untuk pertanian sebagai kawasan perumahan ini menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan.
4) Kawasan kumuh belum tertangani sepenuhnya, dan ada indikasi terjadinya kawasan rawan kumuh baru. Persentase kawasan kumuh tertangani meningkat namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan batas dan buffer yang berpotensi menjadi kumuh.
5) Belum maksimalnya pengelolaan PSU permukiman.
6) Perlunya PSU penyediaan Pemakaman.
7) Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman (RP3KP dan RP2KPKP).

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   1) Belum terbentuknya regulasi daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana di kota Tomohon.
   2) Belum efektifnya penegakan atas pelanggaran peraturan daerah / perkada.
   3) Sosialisasi terkait perda / perkada kepada masyarakat masih kurang.
   4) Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

5) Masih rendahnya pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam, kurangnya sarana untuk sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, minimnya sistem peringatan dini bencana kawasan risiko dan penyediaan infrastruktur mitigasi serta kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana.
6) Linmas terlatih belum optimal.

6. Urusan Sosial
   1) Belum maksimalnya sistem basis data terpadu terkait penerima bantuan sosial termasuk penyandang disabilitas.
   2) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota.
   3) Masih kurangnya bantuan bahan pangan pada saat bencana terjadi.
   4) Belum optimalnya penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
   5) Masih kurangnya koordinasi dengan pihak penyalur bantuan sosial.
   6) Kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas.
   7) Belum maksimalnya rehabilitasi bagi pasien pasca ODGJ (orang dengan gangguan jiwa).
   8) Persentase PMKS berfungsi sosial masih kurang disebabkan belum optimalnya penanganan PMKS dan Rehabilitasi Sosial.
7. Urusan Tenaga Kerja
   1) Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka dan belum optimal penempatan tenaga kerja karena kurangnya kompetensi pencari kerja dan masih perlunya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang sudah bekerja.
   2) Perlunya basis data valid terkait para pekerja dan pengangguran di Kota Tomohon.

3) Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) tersertifikasi yang dapat memberikan kecakapan khusus (tersertifikasi dan mahir) kepada tenaga kerja di Kota Tomohon.
4) Keterbatasan lapangan kerja di Kota Tomohon.
5) Belum maksimalnya kerjasama Pemerintah Kota Tomohon dengan pelaku-pelaku usaha untuk memperkerjakan masyarakat Kota Tomohon.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1) Fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG, berjalan secara maksimal dan perlu di tingkatkan.
   2) Perlunya Sarana dan prasarana ruang bermain anak di tempat-tempat fasilitas umum.
   3) Belum maksimalnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan.
   4) Koordinasi antar stakeholders dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum berjalan secara maksimal.
   5) Perlunya Fasilitas Bangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
9. Urusan Pangan
   1) Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi,seimbang, dan aman (B2SA).
   2) Tingkat capaian produktivitas masih rendah dan belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pangan di Kota Tomohon.
   3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat konsumen/ produsen tentang pangan yang aman dan sehat untuk konsumsi.
   4) Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang terbatas.
   5) Belum ada pembaharuan terkait Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Tomohon.
   6) Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan pengelolaan Pangan / Pertanian;
10. Urusan Lingkungan Hidup
   1) Belum optimalnya pengelolaan TPA Taratara.

2) Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang belum sebanding dengan cakupan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.
3) Belum maksimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah.
4) Belum optimalnya pelestarian lingkungan hidup (tanah, air dan udara).
5) Belum adanya regulasi persampahan.
6) Kurangnya kesadaran pengusaha terhadap pencemaran status mutu air.
7) Adanya alih fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

11. Urusan Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    1) Peningkatan layanan administrasi kependudukan mulai dari lahir hingga meninggal dunia.
    2) Optimalisasi sistem informasi administrasi kependudukan untuk peningkatan pelayanan prima.
    3) Terbatasnya sarana prasarana untuk layanan administrasi kependudukan.
12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    1) Pengetahuan remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja masih kurang dan perlu di sosialisasikan melalui sekolah-sekolah.
    2) Belum adanya *grand design* pembangunan kependudukan Kota Tomohon.
13. Urusan Perhubungan
    1) Belum optimalnya manajemen transportasi Kota Tomohon.
    2) Terbatasnya sarana prasarana dan pengembangan SDM di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
    3) Belum optimalnya PAD dari retribusi terminal dan retribusi parkir.
    4) Sarana parkir masih terbatas, terutama pada kawasan perekonomian dan perdagangan kota Tomohon.
    5) Penataan terminal belum optimal.

14. Urusan Komunikasi dan Informatika
    1) Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi / sistem informasi pemerintahan khususnya dalam pengembangan Smart City.
    2) Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian profesi dalam bidang TIK.
    3) Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jaringan TIK dan media.
15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    1) Masih kurangnya dukungan pembiayaan terhadap UMKM dan koperasi (Kredit Usaha Rakyat).
    2) Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
    3) Beleum tersedianya sentra UMKM Tomohon.
    4) Belum terpetakan jenis usaha UMKM di Kota Tomohon.
    5) Masih minimnya pengelola koperasi yang bersertifikat.
    6) Rendahnya inovasi dan penerapan teknologi, serta penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi.
16. Urusan Penanaman Modal
    1) Sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan publik, khususnya untuk penanaman modal.
    2) Anggaran terbatas untuk pengembangan kapasitas SDM terkait pelayanan publik.
17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
    1) Perlu peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan.
    2) Terbatasnya sarana prasarana olahraga.
    3) Belum maksimalnya pembinaan olahragawan usia dini.
    4) Kurangnya kompetisi olahraga di Kota Tomohon.
    5) Apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pelatih dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
    6) Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur spesifik tentang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tomohon.

18. Urusan Statistik
    1) Belum maksimalnya integrasi data (Satu Data Tomohon) dan peran Wali Data.
    2) Belum maksimalnya koordinasi dalam pengelolaan dan penyajian data statistik.
    3) Keterbatasan SDM di Perangkat Daerah dalam pengelolaan data lewat statistik.
19. Urusan Persandian

    Terbatasnya SDM dan sarana dan prasarana persandian.
20. Urusan Kebudayaan
    1) Masih terbatasnya pusat pengembangan kebudayaan.
    2) Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan ekosistem kebudayaan serta kualitas dan kuantitas SDM di bidang cagar budaya.
    3) Belum adanya pusat pengembangan pelestarian kesenian tradisional.
    4) Perlunya peningkatan rasa cinta terhadap produk lokal serta kuantitas penggunaan bahasa daerah lokal.
    5) Kurangnya pembinaan kepada para pelaku budaya.
21. Urusan Perpustakaan
    1) Perlunya peningkatan layanan perpustakaan daerah dan sarana prasarana.
    2) Terbatasanya kemampuan pengelola perpustakaan (pustakawan).
    3) Perlunya pembuatan literasi secara digital.
    4) Minat baca masyarakat masih tergolong rendah.
22. Urusan Kearsipan
    1) Kurangnya manajemen kearsipan yang terstandarasisasi.
    2) Masih kurangnya tenaga arsiparis.
    3) Belum tersedianya sarana prasarana penyimpanan dan pengelolaan arsip yang memadai.
23. Urusan Kelautan dan Perikanan
    1) Belum optimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebagai sarana pembenihan.

2) Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi budidaya mengakibatkan rendahnya ketersediaan benih ikan bermutu.

24. Urusan Pariwisata
    1) Belum maksimalnya manajemen dan pemasaran pariwisata.
    2) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata milik Pemerintah.
    3) Belum tersedianya perencanaan sektoral pariwisata.
    4) Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung event-event pariwisata berbasis kebudayaan dan kearifan lokal berskala nasional dan internasional, termasuk belum ada kawasan terpadu pelaksanaan TIFF (Hanggar, *Parade Route*, *Display Float* dan Lokasi Pameran dalam satu kawasan).
    5) Kurangnya tenaga/SDM pariwisata yang mahir dan tersertifikasi (penutur asing, pemandu wisata, dll).
    6) Masih kurangnya atraksi-atraksi atau kegiatan penunjang pariwisata.
    7) Pengelolaan ICT (*Information, Communication, Technology*) Pariwisata yang belum maksimal.
25. Urusan Pertanian
    1) Terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani
    2) Minimnya ketersediaan jaringan irigasi teknis serta sarana dan prasarana alsintan (alat dan mesin pertanian)
    3) Masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian
    4) Belum optimalnya kapasitas produksi benih tanaman krisan sebagai komoditas unggulan hortikultura
    5) Masih tingginya prevalensi penyakit zoonosis (penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia)
    6) Belum stabilnya sistem pemasaran hasil hortikultura
    7) Terus meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian
    8) Pemanfaatan sarana promosi pertanian (show window) yang belum maksimal

26. Urusan Perdagangan
    1) Belum ada aturan / kebijakan terkait penataan pasar rakyat dan toko modern.
    2) Belum maksimalnya pengelolaan limbah pasar rakyat.
    3) Pasar rakyat hanya terpusat pada pasar beriman Wilken yang berfungsi sebagai pasar induk.
    4) UPTD metorologi legal belum bisa melakukan pelayanan tera / tera ulang dikarenakan peralatan standar pelayanan tera / tera ulang belum terpenuhi.
27. Urusan Perindustrian
    1) Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) belum tersusun.
    2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memadai.
    3) Ketersediaan bahan baku lokal masih terbatas.
    4) Sebaran pelaku usaha industri belum merata.
    5) Penguasaan teknologi oleh pelaku industri masih terbatas.
    6) Belum tersedia lokasi yang secara khusus dipersiapkan untuk sentra industri.
    7) Tingkat inovasi produk industri masih rendah.
    8) Ruang pamer dan fasilitas promosi produk industri lokal belum tersedia.
28. Urusan Perencanaan
    1) Masih terbatasnya kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan.
    2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan.
    3) Perlunya sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan.
29. Urusan Keuangan
    1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum optimal.
    2) Pengelolaan aset Pemerintah Kota Tomohon masih belum optimal.

30. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
    1) Sarana dan prasarana kediklatan (Fasilitas Diklat) belum tersedia.
    2) Perlu Peningkatan pemahaman pengelola kepegawaian di tiap Perangkat Daerah, khususnya dalam menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja serta peta jabatan.
    3) Belum Optimalnya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi ASN.
    4) Pengelolaan data ASN secara komprehensif belum berjalan secara maksimal.
    5) Perlunya peningkatan pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian.
31. Urusan Penelitian dan Pengembangan
    1) Masih minimnya kebijakan berbasis riset.
    2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM litbang, termasuk belum adanya tenaga fungsional peneliti.
    3) Terbatasnya sarana untuk kegiatan kelitbangan.
    4) Belum optimalnya sistem inovasi daerah.
32. Urusan Kesatuan Bangsa
    1) Penanganan Kehidupan berpolitik masih kurang optimal
    2) Deteksi dini bahaya radikalisme serta wawasan kebangsaan belum optimal.
33. Urusan Penunjang Lainnya
    a. Pengawasan
        1) Belum maksimalnya kemampuan teknis dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
        2) Kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah perlu penyempurnaan.
        3) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum maksimal.
    b. Sekretariat Daerah
        1) Perlunya peningkatan koordinasi dan pemahaman SDM pengelola SAKIP dan LPPD.

2) Perlunya peningkatan sarana prasarana yang memadai.
3) Koordinasi pihak terkait dalam penyelesaian tapal batas antara Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, termasuk batas antara kelurahan/Lingkungan dan kecamatan se-Kota Tomohon.
4) Belum maksimalnya koordinasi pelayanan publik yang terukur lewat Indeks Pelayanan Publik.

c. Sekretariat Dewan
1) Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan agenda DPRD dikarenakan jadwal AKD yang padat.
2) Kurangnya tenaga legal drafting yang dimiliki dalam penyusunan produk hukum.

Dari hasil evaluasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, dan permasalahan perangkat daerah, maka permasalahan pembangunan di Kota Tomohon dapat diuraikan ke dalam 1)Aspek Kondisi Wilayah, 2)Aspek Kesejahteraan Masyarakat, 3)Aspek Daya Saing Daerah dan 4)Aspek Pelayanan Umum.

A. Aspek Kondisi Wilayah

Tabel 2.92 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kondisi Wilayah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Daya dukung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan pembangunan.	Terjadinya degradasi hutan dan alih fungsi lahan	Adanya alih fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
		Pengendalian lingkungan hidup belum optimal	Berkurangnya mutu kualitas dan kuantitas air bersih
			Kurangnya kesadaran pelaku usaha / masyarakat terhadap pencemaran air.
			Belum optimalnya pengelolaan TPA Taratara.
			Belum optimalnya pengelolaan sampah.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Belum maksimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah.
			Belum adanya IPAL dalam pengelolaan limbah pasar rakyat.
		Masih kurangnya persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi aman	Belum optimalnya pengelolaan dan prasarana pengolahan lumpur tinja.
			Belum optimalnya kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman dan Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD
		Cakupan air bersih yang masih kurang	Cakupan pelayanan air bersih perpipaan masih rendah dan ketersediaan sumber air baku terbatas.
			Jaringan infrastruktur air minum yang lama sudah memerlukan rehabilitasi/perbaikan.
			Keterbatasan Pembiayaan Mengakibatkan Rendahnya Investasi Dalam Penyediaan Air Minum
		Kota Tomohon memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi dari sisi geologis dan geografi	Belum terbentuknya regulasi daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana di kota Tomohon.
			Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.
			Kurangnya sarana untuk sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			bencana kepada masyarakat,
			Masih rendahnya pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam, minimnya sistem peringatan dini bencana kawasan risiko dan penyediaan infrastruktur mitigasi serta kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana.
		Belum optimalnya penganganan kawasan kumuh di Kota Tomohon	Penanganan kawasan kumuh belum tuntas, dan ada indikasi terjadinya kawasan rawan kumuh baru. Persentase kawasan kumuh tertangani meningkat namun masih belum tuntas.
			Umumnya berlokasi di permukiman padat penduduk
		Perlunya pengaturan pembangunan kependudukan di Kota Tomohon	Belum adanya grand design pembangunan kependudukan Kota Tomohon.
			Belum optimalnya pengaturan perpindahan penduduk dari luar Kota Tomohon.
		Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	Belum tersedianya Peraturan Daerah terbaru mengenai RTRW Kota Tomohon terbaru, termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Terbatasnya SDM PUPRD sehingga tidak mampu melayani seluruh permintaan teknis di Perangkat Daerah lainnya, termasuk belum memiliki tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 2.93 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan	Laju Pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah	Pertumbuhan beberapa sektor melambat diantaranya sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi makan minum.
			Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
			Sarana prasarana Pasar yang tidak memadai sebagai salah satu penunjang pusat perekonomian masyarakat
			Belum adanya lokasi persiapan untuk sentra industri.
			Ketersediaan bahan baku lokal untuk kebutuhan industri yang masih rendah.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Belum adanya dokumen rencana pembangunan industri kota (RPIK) yang menjadi persyaratan utama pembentukan sentra dan kawasan industri.
			Sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan masih sangat terbatas untuk pengurusan investasi dan penanaman modal.
		Belum signifikan penurunan kemiskinan	Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota.
			Belum maksimalnya pelaksanaan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
			Belum optimalnya sistem basis data terpadu terkait penerima bantuan sosial.
2	Belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka	Keterbatasan lapangan kerja di Kota Tomohon.
			Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) tersertifikasi yang dapat memberikan kecakapan khusus (tersertifikasi dan mahir) kepada tenaga kerja di Kota Tomohon.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi masih rendah
		Belum optimalnya kualitas kesehatan	Masih terbatasnya Infrastruktur serta sarana prasarana kesehatan.
			Belum optimalnya pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
			Masih terbatasnya tenaga ahli laboratorium yang terlatih khusus.
			Kurangnya integrasi layanan AIDS, TBC, dan Malaria dengan layanan kesehatan primer lainnya seringkali menyebabkan penemuan kasus yang terpecah-pecah dan penanganan yang tidak komprehensif.
		Belum optimalnya kualitas pendidikan	Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik belum optimal
			Masih kurangnya guru / tenaga pendidik yang bersertifikasi profesional.
			Terbatasnya sarana prasarana pendukung pembelajaran baik di satuan pendidikan formal maupun non formal diantaranya laboratorium, perpustakaan,

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			fasilitas sanitasi, ruang kelas/ruang guru dan peralatan Alat Permainan Edukatif (APE).
			Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta.
			Belum adanya pusat pengembangan pelestarian budaya dan kesenian tradisional.
			Masih terbatasnya pembangunan literasi masyarakat Kota Tomohon.
		Belum optimalnya partisipasi pemuda, prestasi olahraga, dan koordinasi pemenuhan gender dan anak.	Belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG
			Kurangnya sarana dan prasarana ruang bermain anak di tempat terbuka.
			Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.
			Belum optimalnya sarana prasarana olahraga.
			Proses pembinaan olahragawan usia dini belum maksimal.

C. Aspek Daya Saing Daerah

Tabel 2.94 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya produktivitas daerah	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan	Belum optimalnya manajemen pariwisata.
			Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata milik Pemerintah.
			Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung event-event pariwisata berbasis kebudayaan dan kearifan lokal berskala nasional dan internasional, termasuk belum ada kawasan terpadu pelaksanaan TIFF (Hanggar, *Parade Route*, *Display Float* dan Lokasi Pameran dalam satu kawasan).
			Masih kurangnya pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif.
		Belum maksimalnya produktivitas pertanian dan sumber pangan	Terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian dan peralatan mesin pertanian.
			Kurangnya SDM pertanian yang kompeten dan profesional dibidangnya melalui fungsi penyuluhan dan pelatihan dan sistem manajerial kelompok tani.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Alih fungsi lahan pertanian
			Masih kurangnya produksi benih krisan di Kota Tomohon.
			Kurangnya sarana dan prasarana budidaya (Screen House, perbenihan)
			Belum optimalnya sarana pembenihan yaitu BBI (Balai Benih Ikan) dan UPR (Unit Pembenihan Rakyat).
			Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang terbatas.
			Tingkat capaian produktivitas masih rendah dan belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pangan di Kota Tomohon
			Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan pengelolaan Pangan / Pertanian;
		Pengembangan wirausaha belum optimal	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro masih rendah
			Masih kurangnya dukungan fasilitasi pemasaran.
			Kurangnya fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha mikro
		Masih kurangnya riset	Belum tumbuhnya budaya berinovasi

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		dan inovasi daerah	Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan, termasuk tersedianya tenaga fungsional peneliti dan ahli data.
			Masih minimnya *research based policy*
		Capaian PAD belum optimal	Belum optimalnya aktualisasi potensi pendapatan daerah pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah.
			Belum optimalnya wajib pajak/retribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pembayaran retribusi.
			Penerapan sanksi bagi wajib pajak dan retribusi belum optimal.
			Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2	Belum optimalnya pelaksanaan layanan infrastruktur pelayanan publik	Masih adanya backlog perumahan	Masih adanya backlog perumahan atau tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinya

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Perencanaan yang diperlukan untuk Urusan Perumahan dan Permukiman antara lain RP3KP dan RP2KPKP.
			Masalah terkait legalitas kepemilikan lahan dan daya beli masyarakat kurang
		Belum optimalnya kondisi jalan dalam keadaan baik	Pembangunan infrastruktur jalan belum memenuhi syarat geometrik jalan secara optimal.
			Pemenuhan kualitas dan umur teknis jalan belum optimal
		Belum optimalnya irigasi dan saluran pembuangan air	Perlunya pengaturan sistem saluran pembuangan air / drainase.
			Belum maksimalnya fungsi dari sistem jaringan irigasi sehingga timbulnya kerusakan pada saluran irigasi.
		Belum dipugarnya wajah pusat Kota Tomohon	Kawasan pusat Kota yang tidak tertata dengan baik
			Terbatasnya sarana parkir di pusat perdagangan dan ekonomi

D. Aspek Pelayanan Umum

Tabel 2.95 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Data pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi	Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi / sistem informasi pemerintahan khususnya dalam pengembangan Smart City.
			Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian profesi dalam bidang TIK.
			Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jaringan TIK dan media.
			Belum maksimalnya peran wali data.
			Belum maksimalnya pelaksanaan SPBE dan smart city.
		Belum optimalnya kapasitas fungsi pengawasan	Perlunya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan agenda dikarenakan jadwal AKD yang padat.
		Terbatasnya kapasitas aparatur Pemerintahan	Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi ASN.
			Belum tersedia sarana dan prasarana kediklatan (Fasilitas Diklat).
			Terbatasnya sarana serta kemampuan aparatur kelurahan
			Terbatasnya tenaga legal drafting yang dimiliki dalam penyusunan produk hukum.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kota Tomohon.
2. Isu-isu Global.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Tomohon.

4. Isu strategis/kebijakan pembangunan Kota Tomohon antara lain terdiri RPJPD dan RTRW Kota Tomohon.
5. KLHS RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029.

2.3.2.1. Isu Strategis Global

A. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi Produktivitas yang rendah diantaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu, prouktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi di

Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

B. Rendahnya Kualitas SDM

Berdasarkan Asian Productivity Orgnization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan dibawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antarany disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assesment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 488,33

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah sederajat kebawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas / sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan tenaga kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang kealian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu

mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

E. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan *(triple planetary crisis)* yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (World Health Organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi

Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari kementerian energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan akitivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingakt global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

F. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi / *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator

Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

G. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indonesia-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-

Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semseter kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan akitvitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata indeks

sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

2.3.2.2. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebiajakn RPJPN 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi RPJMN 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, dengan misi:

1. Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Misi 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Isu strategis pembangunan dalam RPJMN 2025-2029:

1. Rendahnya produktivitas.
2. Rendahnya kualitas SDM.
3. Pergeseran struktur kelas masyarakat.
4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif.
5. Krisis lingkungan.
6. Geopolitik dan geoekonomi.
7. Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 2.12 Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Higlight intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

Gambar 2.13 Kerangka Pikir RPJMN 2025-2029

2.3.2.3. Telaah RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2029

Penelaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara adalah “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (*Towards Advanced, Prosperous, and Sustainable North Sulawesi*), dengan misi:

1. Misi 1: Mecegah dan memberantas KKN serta narkoba;
2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Misi 3: Membangun perekonomian daerah.
4. Misi 4: Memperkuat daya saing daerah dan internasional;
5. Misi 5: Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan;
6. Misi 6: Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal.

7. Misi 7: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Misi 8: Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Adapun 17 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta Narkoba.
2. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis.
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi.
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial.
5. Penguatan Jaringan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase.
6. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing.
7. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya.
8. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM.
9. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima.
10. Pengembangan Pariwisata Cerdas (Smart Tourism) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan MICE.
11. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan OPD, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan.
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan.
13. Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan Sumberdaya Energi Terbarukan.
14. Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial.
15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
16. Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan *Logistics Hub* sebagai *supporting unit* untuk IKN.

17. Pembinaan Pertambangan Rakyat.

2.3.2.4. Telaah RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Pada saat penyusunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029, sementara juga disusun revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Tomohon.

Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033.

1. Rencana Struktur Ruang

   Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

   a. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota, meliputi:
      - Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi kawasan yang berada di Kecamatan Tomohon Tengah dan Timur.
      - Sub Pusat Pelayanan Kota.
      - Pusat Pelayanan Lingkungan.
   b. Sistem jaringan prasarana wilayah kota, meliputi:
      - Sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat.
      - Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi jaringan energi/listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air kota, dan infrastruktur perkotaan.
2. Rencana Pola Ruang

   Rencana pola ruang terdiri dari

   a. Pengembangan kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan

rawan bencana alam, dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal, dan kawasan peruntukan lainnya.

2.3.2.5. Telaah RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045

Dalam RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045 dijabarkan bahwa visi Kota Tomohon adalah Tomohon Kota Wisata Dunia, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan dengan misi:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing dan perlindungan sosial yang adaptif.
2. Mewujudkan tranformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang inklusif, teknologi dan inovasi serta peningkatan produktivitas daerah sebagai Kota Wisata.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas daerah dan kepemimpinan modern.
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan.
7. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan menuju Kota Wisata Dunia yang ramah lingkungan.

Fokus kebijakan pada periode pertama RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 adalah terkait Penguatan Transformasi, yaitu:

1. Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

2. Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan, mengoptimalkan edukasi kepanasbumian serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
3. Penuntasan pemenuhan kualitas perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
4. Upaya lanjutan penguatan proses hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset, inovasi, kewirausahaan dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
5. Penguatan penerapan ekonomi hijau di segala bidang, Memfokuskan transisi energi pada penerapan CCS/CCUS, pemanfaatan *energy storage system* (ESS).
6. Penguatan pemenuhan akses digital di segala bidang.
7. Penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi menguatkan keunggulan absolut daerah dan memanfaatkan keunggulan komparatif melaui penguatan kerjasama ekonomi dibidang perdagangan internasional.
8. Penguatan pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.
9. Penguatan perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, penerapan manajemen resiko pada perencanaan dan pengendalian pembangunan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.
10. Supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik dan keamanan, pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum, dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perdamaian.
11. Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

12. Penguatan keamanan daerah.
13. Penguatan optimalisasi nilai budaya dan agama dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial.
14. Penguatan optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, pengarusutamaan gender dan menggerakkan modal sosial.
15. Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam menigkatkan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
16. Penguatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan penggunaan energi terbarukan. Serta penguatan riset, inovasi dan teknologi menopang ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.
17. Penguatam ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana. Serta penguatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
18. Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon.
19. Penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
20. Penguatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan daerah.

Adapun yang menjadi arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tomohon periode I dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.96 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Tomohon
Tahun 2025 – 2045 Periode I (2025-2029)

Misi	Arah Kebijakan Penguatan Transformasi	Sasaran Pokok
VISI: TOMOHON KOTA WISATA DUNIA, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing dan perlindungan sosial yang adaptif	Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.	Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki daya saing SDM yang sehat dan produktif
	Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan, mengoptimalkan edukasi kepanasbumian serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.	Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki daya saing SDM yang cerdas dan produktif
	Penuntasan pemenuhan kualitas perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.	Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki perlindungan sosial adaptif terintegrasi
Mewujudkan tranformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang inklusif, teknologi dan inovasi serta peningkatan produktivitas daerah sebagai Kota Wisata.	Upaya lanjutan penguatan proses hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset, inovasi, kewirausahaan dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah sebagai Kota Wisata.	Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan IPTEK, Inovasi dan produktivitas daerah terutama sebagai Kota Wisata Dunia.
	Penguatan penerapan ekonomi hijau di segala bidang, Memfokuskan	Terwujudnya Kota Tomohon yang

Misi	Arah Kebijakan Penguatan Transformasi	Sasaran Pokok
VISI: TOMOHON KOTA WISATA DUNIA, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
	transisi energi pada penerapan CCS/CCUS, pemanfaatan *energy storage system* (ESS).	mengoptimalkan ekonomi hijau inklusif.
	Penguatan pemenuhan akses digital di segala bidang.	Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan transformasi digital
	Penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi menguatkan keunggulan absolut daerah dan memanfaatkan keunggulan komparatif melaui penguatan kerjasama ekonomi dibidang perdagangan internasional	Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan integrasi ekonomi domestik dan global
	Penguatan pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru menopang Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia.	Terwujudnya Kota Tomohon dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui destinasi wisata unggulan baru.
Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif.	Penguatan perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, penerapan manajemen resiko pada perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan kapasitas masyarakat sipil	Terwujudnya Kota Tomohon dengan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik dan keamanan, pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum, dan transformasi kelembagaan hukum	Terwujudnya Kota Tomohon yang taat hukum

Misi	Arah Kebijakan Penguatan Transformasi	Sasaran Pokok
VISI: TOMOHON KOTA WISATA DUNIA, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
	yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perdamaian.	
	Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.	Terwujudnya Kota Tomohon mandiri dengan stabilitas makro ekonomi
	Penguatan keamanan daerah	Terwujudnya Kota Tomohon berdaya gentar kawasan
Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Penguatan optimalisasi nilai budaya dan agama dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial.	Terwujudnya Kota Tomohon yang beragama maslahat dan berbudaya maju.
	Penguatan optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, pengarusutamaan gender dan menggerakkan modal sosial.	Terwujudnya Kota Tomohon yang memilki keluarga berkualitas dengan pengarusutamaan gender.
	Penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam menigkatkan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	Terwujudnya Kota Tomohon dengan lingkungan hidup berkualitas
	Penguatan pengembangan kapasitas kelembagaan	Terwujudnya Kota Tomohon yang

Misi	Arah Kebijakan Penguatan Transformasi	Sasaran Pokok
VISI: TOMOHON KOTA WISATA DUNIA, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
	dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan penggunaan energi terbarukan. Serta penguatan riset, inovasi dan teknologi menopang ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.	berketahanan energi, air, dan pangan
	Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana. Serta penguatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.	Terwujudnya Kota Tomohon yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon.	
Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
Mewujudkan kesinambungan pembangunan menuju Kota Wisata Dunia yang ramah lingkungan	Penguatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan daerah	

2.3.2.6. Isu Strategis Regional Sulawesi

Isu strategis kewilayahan khususnya untuk wilayah Sulawesi:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

2. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja diantaranya disebabkan karena mismatch antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.
3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang angka kemiskinan.
4. Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur antar daerah.
5. Masih rendahnya akses dan mutu bidang Pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai.
6. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam.

2.3.2.7. Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kajian yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah. KLHS RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah yang direncanakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan dapat mewujudkan pembangunan yang mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) PP No 46 tahun 2016 Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Adapun yang menjadi isu strategis adalah:

1. Galian C
2. Pencemaran Udara
3. Air tanah
4. Pencemaran lingkungan PGE Lahendong (kesehatan, udara, fisik atap rumah)

Isu Pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan karaktersitik wilayah (kondisi lingkungan hidup), yaitu:

1. Rawan bencana
2. Sampah

3. Cadangan Air
4. Pencemaran Udara
5. Alih Fungsi Lahan

Isu PB strategis juga dirumuskan dengan pertimbangan kondisi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan, kondisi wilayah perencanaan terutama Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan dan kajian muatan KLHS, serta target pencapaian TPB. Berdasarkan hasil capaian indikator TPB, maka TPB yang dipertimbangkan menjadi masukan isu utama adalah TPB dengan jumlah indikatornya masih banyak yang belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai berikut:

1. TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. TPB 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. TPB 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. TPB 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
6. TPB 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Selanjutnya isu pencapaian TPB di simpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan
2. Peningkatan Masalah Gizi dan Kesehatan
3. Belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan pariwisata
4. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih dan sanitasi

Analisis keterkaitan antar isu strategis untuk menemukenali isu yang menjadi akar masalah, menjadi fokus atau memiliki pengaruh paling besar terhadap isu lainnya.dilakukan untuk menentukan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan. Penentuan isu strategis menggunakan metode *Critical Decission Factor* atau faktor terpenting pembuatan keputusan (CDF). CDF merupakan upaya sintesis dan penentuan prioritas terhadap apa yang penting diidentifikasi terutama melalui observasi dan analisis konteks dan dialog dengan relevan pemangku kepentingan, untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan aspirasi. Metode CDF mengkaji berbagai isu strategis:

- Isu lingkungan hidup,
- Isu gap/permasalah TPB,
- Isu kebijakan strategis atau isu penting Perencanaan Pembangunan
- Isu Konsultasi Publik

Tabel 2.97 Hasil Pemetaan Isu Strategis dalam Konsultasi Publik, Isu Lingkungan Hidup, Isu Pencapaian TPB dan Isu Kebijakan Strategis
Kota Tomohon

Isu Konsultasi Publik	**Isu Lingkungan Hidup**	**Isu TPB**	**Isu Kebijakan Strategis**
1. Rawan Bencana	1. Rawan Bencana	1. Pendidikan	1. Bencana alam
2. Sampah	2. Sampah	2. Kerentanan masyarakat miskin	2. Konversi lahan
3. Air Tanah	3. Cadangan Air	3. Kesehatan	3. Pendidikan
4. Pencemaran Udara	4. Pencemaran udara	4. Infrastruktur	4. Kesehatan
5. Konversi Lahan	5. Konversi lahan	5. Ekonomi dan Ekonomi	5. Ekonomi
-	-	-	6. Kemisikinan
-	-	--	7. Kebudayaan
-	-		8. SDA

Dari keempat isu tersebut di atas, hasil analisis CDF bermuara pada tiga isu strategis KLHS RPJMD sebagai berikut:

1. Bencana Alam & Perubahan Iklim

   Isu Bencana Alam & Perubahan Iklim merupakan titik kumpul dari berbagai tekanan ekologis dan sosial yang berakar dari degradasi lingkungan dan ketidakseimbangan pembangunan. Faktor utama dari isu ini bersumber dari Isu Lingkungan Hidup, seperti meningkatnya konversi lahan, pengelolaan sampah yang buruk, serta pencemaran udara dan air, yang secara langsung menurunkan daya dukung lingkungan. Konversi lahan menyebabkan hilangnya daerah resapan air dan memperparah risiko bencana seperti banjir dan kekeringan, sementara pencemaran mengganggu ekosistem alami dan kesehatan masyarakat. Ditambah lagi, cadangan air yang terus menurun memperparah tekanan terhadap lingkungan, khususnya di daerah rawan bencana. Dari sisi Isu Kebijakan Strategis, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa kontrol dan tata kelola yang baik mempercepat laju kerusakan lingkungan. Tanpa regulasi yang ketat dan visi pembangunan yang berkelanjutan, SDA terus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan daya pulih alam. Isu TPB memperburuk kondisi ini—kemiskinan dan kerentanan sosial membuat masyarakat sulit beradaptasi dan pulih dari dampak bencana, menciptakan siklus kerentanan yang berulang. Minimnya keterlibatan publik (isu konsultasi publik) dalam perencanaan ruang dan mitigasi bencana juga memperburuk dampak karena kebijakan yang dihasilkan tidak inklusif. Dengan demikian, isu bencana alam bukan semata akibat fenomena alam, tetapi akumulasi dari kerusakan lingkungan, kebijakan yang tidak adaptif, dan ketimpangan sosial yang memperlemah ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan kejadian ekstrem.

2. Ketimpangan Layanan Dasar & Infrastruktur

   Ketimpangan layanan dasar dan infrastruktur merupakan dampak kumulatif dari perencanaan pembangunan yang tidak merata dan tidak berkeadilan. Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan besar di sini, terutama melalui indikator seperti akses pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketika suatu wilayah memiliki akses terbatas terhadap layanan tersebut, maka masyarakat di dalamnya cenderung mengalami kualitas hidup yang lebih rendah, sulit berpartisipasi dalam ekonomi produktif, dan lebih rentan terhadap krisis. Masalah ini semakin diperparah oleh kemiskinan dan kerentanan masyarakat miskin, yang memunculkan ketimpangan horizontal antar wilayah maupun vertikal antar kelompok sosial. Isu Lingkungan Hidup juga turut berkontribusi secara tidak langsung: kerusakan lingkungan (banjir, kekeringan, pencemaran) seringkali menghancurkan infrastruktur dasar yang sudah terbatas, memperburuk ketimpangan. Selain itu, dari sisi Isu Kebijakan Strategis, pembangunan yang tidak berbasis pada pemerataan ruang dan kebutuhan riil masyarakat (seperti infrastruktur SDA yang hanya difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan) mengakibatkan ketimpangan struktural yang makin melebar. Ketika masyarakat tidak dilibatkan melalui proses konsultasi publik, aspirasi dan kebutuhan lokal terabaikan, sehingga pembangunan menjadi bias kepentingan elite. Maka, ketimpangan layanan dasar bukan hanya soal distribusi fisik infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, aksesibilitas sosial, dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya.

3. Ekonomi & Pariwisata Berkelanjutan

   Isu Ekonomi & Pariwisata Berkelanjutan mencerminkan bagaimana sektor ekonomi dan pariwisata perlu tumbuh tanpa merusak lingkungan dan harus mampu memberdayakan masyarakat secara luas. Masalah muncul ketika kebijakan pembangunan tidak mengedepankan keberlanjutan. Isu Kebijakan Strategis berperan penting, khususnya terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan konversi lahan yang eksploitatif demi pembangunan ekonomi jangka pendek. Ketika SDA dieksploitasi berlebihan tanpa perlindungan, daya tarik pariwisata alam bisa rusak, dan ekonomi lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut

akan terancam. Isu TPB juga sangat terkait: rendahnya pendidikan dan kesehatan masyarakat membatasi kapasitas masyarakat untuk ikut serta dalam sektor pariwisata dan ekonomi formal. Tingginya kemiskinan serta kerentanan masyarakat menyebabkan mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan, bukan pelaku yang aktif. Sementara itu, Isu Lingkungan Hidup memberikan tekanan tambahan: pencemaran, degradasi lahan, dan penurunan kualitas lingkungan akan menggerus potensi wisata berbasis alam, yang notabene menjadi andalan banyak daerah di Indonesia. Konsultasi publik yang lemah memperburuk situasi, karena masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam merancang arah pembangunan pariwisata, sehingga konflik sosial dan ketimpangan ekonomi bisa terjadi. Dengan kata lain, ekonomi dan pariwisata yang tidak dikelola secara partisipatif, inklusif, dan berwawasan lingkungan akan gagal menopang pembangunan jangka panjang dan hanya menghasilkan pertumbuhan yang rapuh serta tidak merata.

2.3.3.Isu Strategis Kota Tomohon

Berdasarkan telaah dari rumpun permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis global, nasional, provinsi, dan KLHS, maka dirumuskan isu strategis Kota Tomohon sebagai berikut:

1. Produktivitas, sistem ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
2. Kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, terlindungi, dan berkarakter.
3. Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
4. Pemenuhan dan pemerataan layanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Identitas Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia berkelanjutan.
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta penguatan sistem inovasi daerah.

7. Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.
8. Adaptasi kemajuan teknologi digital dan pengembangan *smart city*.

Tabel 2.98 Perumusan Isu Strategis Daerah Kota Tomohon

NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU GLOBAL	ISU REGIONAL	ISU NASIONAL	ISU STRATEGIS RPJPD 2025 2045	ISU STRATEGIS RPJMD 2025 2045
1	Indeks Pembangunan Manusia menempati urutan ke-2 se kab-kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan kualitas yang baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Angkatan kerja produktif (15-64 tahun) cukup tinggi tetapi tingkat pengangguran berada di atas rata-	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Ketimpangan Layanan Dasar dan Infrastruktur	Rendahnya kualitas SDM Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Masih rendahnya akses dan mutu bidang Pendidikan dan kesehatan Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja Peningkatan kesejahteraan masyarakat Masih tingginya tingkat kemiskinan	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Pergeseran struktur kelas menengah Kebutuhan Hidup Tingi pada Usia Produktif	Percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, terlindungi, dan berkarakter.
							Percepatan pengentasan kemiskinan, stunting, dan pengangguran	Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
							Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan kemampuan adaptasi	

NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU GLOBAL	ISU REGIONAL	ISU NASIONAL	ISU STRATEGIS RPJPD 2025 2045	ISU STRATEGIS RPJMD 2025 2045
	rata Nasional.							
2	Kota Tomohon menjadi salah satu dari tujuh Key Tourism Area (KTA) Manado-Likupang dengan 24 daerah tujuan wisata. Pelaksanaan TIFF sebagai even internasional	Belum optimalnya daya saing dan pengelolaan produktivitas daerah lewat sektor pariwisata	Ekonomi dan Pariwisata keberlanjutan	Rendahnya produktivitas Geopolitik dan Geoekonomi	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Rendahnya produktivitas, Inklusivitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan peran kebudayaan dan kearifan lokal menopang kota Tomohon sebagai Kota Pariwisata Pengembangan pariwisata baik destinasi, pemasaran Industri, dan kelembagaan serta perhubungan yang terintegrasi	Identitas Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia berkelanjutan.
3	Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh ketersediaan SDA.	- Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan - Belum optimalnya	Ekonomi dan Pariwisata keberlanjutan	Rendahnya produktivitas Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Kebutuhan Hidup		Rendahnya produktivitas, Inklusivitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi	Penguatan struktur ekonomi industri ditopang sektor primer yang kuat Peningkatan sektor pertanian termasuk pertanian organik dan bunga sebagai produk unggulan lokal	Produktivitas, sistem ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU GLOBAL	ISU REGIONAL	ISU NASIONAL	ISU STRATEGIS RPJPD 2025 2045	ISU STRATEGIS RPJMD 2025 2045
		sistem pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan - Belum optimalnya produktivitas daerah		Tinggi pada Usia Produktif Geopolitik dan Geoekonomi			Pemberdayaan koperasi, UMKM, kewirasuahaan, serta ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi kondusif Percepatan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.	
4	Infrastruktur untuk layanan dasar	Belum optimalnya pelaksanaan layanan infrastruktur pelayanan publik	Ketimpangan Layanan Dasar dan Infrastruktur	Krisis Lingkungan	Belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah di Pulau Sulawesi	Kesenjangan akses dan kualitas infrastruktur, Tingkat konektivitas yang belum merata	Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi Pemantapan lingkungan hidup berbasis green economy dan konservasi Komitmen pemanfaatan ruang. Kecukupan Sumber Daya Air dan energi terbarukan	Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur Kota yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5	Lingkungan hidup dan kehidupan sosial budaya	Penurunan daya dukung lingkungan hidup, mitigasi	Bencana Alam dan Perubahan Iklim		Masih tingginya kerentanan dan potensi	Krisis Lingkungan dan ketangguha	Pemantapan antisipasi bencana dan perubahan iklim	Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta ketangguhan terhadap bencana

NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU GLOBAL	ISU REGIONAL	ISU NASIONAL	ISU STRATEGIS RPJPD 2025 2045	ISU STRATEGIS RPJMD 2025 2045
		bencana, dan pembangunan.			bencana alam	n terhadap bencana		dan perubahan iklim.
6	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dalam kategori Sangat Baik BB (70,62). Pemerintah Kota Tomohon meraih 12 kali berturut-turut opini WTP atas laporan keuangan.	- Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan stabilitas daerah - Belum optimalnya pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektornik (SPBE)	Ketimpangan Layanan Dasar dan Infrastruktur	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan RB Peningkatan iptek. Kapasitas PAD dan seumber pembiayaan yang memadai. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta penguatan sistem inovasi daerah. Adaptasi kemajuan teknologi digital dan pengembangan smart city.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2025-2029

Dalam pembangunan daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi pembangunan jangka menengah Kota Tomohon Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tomohon. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tomohon Tahun 2025-2029, adalah:

"TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA"

Visi ini mencerminkan komitmen Kota Tomohon dalam membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga nilai-nilai budaya dan religiusitas, memiliki daya saing daerah, tata kelola pemerintahan, serta memastikan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam perwujudan Tomohon yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Penjelasan Pokok-pokok Visi Pembangunan Kota Tomohon
Tahun 2025-2029

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	**MAJU**	Menjadikan Tomohon sebagai kota yang maju dalam kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan kesehatan berkualitas, maju dalam pertumbuhan ekonomi, maju dalam tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Maju berarti juga untuk menjadikan masyarakat

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		kota Tomohon memiliki tata kehidupan yang aman, damai, dan tenteram secara lahir batin dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kota Tomohon diharapkan menjadi kota yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.
2	**BERDAYA SAING**	Tomohon memiliki nilai tambah dan nilai jual secara kompetitif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat dengan memperhatikan standar minimal kesejahteraan yang berkelanjutan, transparan, sehingga mampu kompetitif dengan pada persaingan antar daerah, nasional dan regional. Sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di Sulawesi Utara, diperlukan optimalisasi pengelolaan wilayah-wilayah potensi kepariwisataan yang ditunjang oleh penguatan sarana dan prasarana kepariwisataan. Pembangunan di kota Tomohon harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek meminimalisasi pencemaran lingkungan, pengurangan limbah, keberlangsungan ekologis, mempertahankan kawasan hutan lindung, pemanfaatan energi terbarukan, menerapkan manajemen lingkungan dalam rangka mengurangi dampak penting terhadap pembangunan infrastruktur dasar
3	**SEJAHTERA**	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan PDRB per kapita, terwujudnya kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berdemokrasi, serta terwujudnya ketahanan pangan dan produktivitas pertanian sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan, menekan

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		angka pengangguran, dan mengurangi kesenjangan. Perlunya peningkatan lapangan kerja khususnya sektor pariwisata, ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi UMKM dan peningkatan ekonomi sektor pertanian. Perlunya pengembangan pengelolaan hasil produksi pertanian di sentra-sentra produksi pertanian di Tomohon sehingga mampu menghasilkan varietas lokal yang unggul dan berdaya saing.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya.**

   Memajukan seluruh aspek kehidupan berdasarkan jati diri dan kebudayaan bangsa, serta membangun karakter kepribadian masyarakat Kota Tomohon disertai cara pikir, cara kerja dan cara hidup yang beriman dan harmonis.

2. **Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.**

   Menjamin ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta adanya stabilisasi harga pangan. Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan lewat penerapan ekonomi hijau untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3. **Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia.**

   Memantapkan pembangunan pariwisata, seni budaya, dan ekonomi kreatif yang terintegrasi, berkualitas, serta mendunia.

4. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

   Meningkatkan tata kehidupan dan penghidupan Masyarakat Kota Tomohon untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar / pokok dengan sebaik-baiknya lewat SDM yang unggul dan berkualitas sehingga tercapai kesejahteraan.

5. **Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif.**

   Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis ilmu pengetahuan/riset dan inovatif serta responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

3.1.1 KESELARASAN RPJMD KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD KOTA TAHUN 2025-2045

Keselarasan visi dan misi dalam dua periode perencanaan pembangunan daerah merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan (kesinambungan) serta efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Kota Tomohon telah merumuskan visi misi dalam dua dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045.

Tabel 3.2. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD dan RPJPD Kota Tomohon

Visi Misi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045	Visi Misi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029
Visi: Tomohon Kota Wisata Dunia, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Visi: Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.
Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial menuju Masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing dan perlindungan sosial yang adaptif. Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.	Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang inklusif, teknologi dan inovasi serta peningkatan produktivitas daerah sebagai Kota Wisata. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan. Misi 7: Mewujudkan ketersediaan sarana dan parasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia

menuju kota wisata dunia yang ramah lingkungan.	
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Misi 4: Memantapkan supremasi hukum, stabilitas daerah dan kepemimpinan modern.	Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif

Dari tabel di atas terlihat bahwa Visi RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 menunjukkan keselarasan yang kuat dalam aspek maju, berdaya saing dan kesejahteraan. Kedua visi dan misi tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan kota yang keberlanjutan.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 selaras dengan agenda transformasi RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon tahun 2025-2029 dan Sasaran pokok RPJPD Kota Tomohon tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Visi Tomohon Kota Wisata Dunia, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Tomohon Tahun 2025-2045

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Relijius dan berbudaya		
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi.		
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.	Terwujudnya Kota Tomohon yang beragama maslahat dan berbudaya maju
Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan		
Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur dan pembangunan Kota yang terpadu dan berkelanjutan		

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD
	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Terwujudnya Kota Tomohon yang berketahanan energi, air, dan pangan
	Meningkatnya produktivitas pertanian	
	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan ekonomi hijau inklusif
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Kota Tomohon dengan lingkungan hidup berkualitas
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Terwujudnya Kota Tomohon yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia		
Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan		
	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	Terwujudnya Kota Tomohon dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui destinasi wisata unggulan baru.
Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Terwujudnya kualitas SDM yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera		
	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki perlindungan sosial adaptif terintegrasi
		Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan Iptek, inovasi dan produktivitas daerah terutama sebagai kota wisata dunia
		Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan integrasi ekonomi domestik dan global
		Terwujudnya Kota Tomohon mandiri dengan stabilitas makro ekonomi

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki daya saing SDM yang cerdas dan produktif
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki daya saing SDM yang sehat dan produktif
	Meningkatnya kesempatan kerja	
	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender	Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki keluarga berkualitas dengan pengarusutamaan gender
Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif		
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel		
	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan	Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan Iptek, inovasi dan produktivitas daerah terutama sebagai kota wisata dunia
		Terwujudnya Kota Tomohon yang mengoptimalkan transformasi digital
		Terwujudnya Kota Tomohon dengan tata kelola yang berintergitas dan adaptif
	Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terwujudnya Kota Tomohon yang taat hukum
		Terwujudnya Kota Tomohon berdaya gentar Kawasan

3.1.2 KESELARASAN RPJMD KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA 2025-2029

Keselarasan visi misi Kota Tomohon dengan visi misi Provinsi Sulawesi Utara sangat penting untuk memastikan bahwa

pembangunan daerah berjalan selaras, terpadu, dan saling melengkapi. Keselarasan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya serta memperkuat pencapaian tujuan Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Sulawesi Utara termasuk Kota Tomohon.

Tabel 3.4. Keselarasan Visi dan Misi Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara

Visi Misi RPJMD Kota Tomohon	**Visi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara**
Visi: Tomohon Maju, Berdaya Saing, Dan Sejahtera	Visi: Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (*Towards Advanced, Prosperous, and Sustainable North Sulawesi*)
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya.	Misi 6: Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal.
Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan. Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia. Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Misi 3: Membangun perekonomian daerah. Misi 4: Memperkuat daya saing daerah dan internasional; Misi 5: Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan; Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif.	Misi 7: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi 1: Mecegah dan memberantas KKN serta narkoba; Misi 8: Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Dari tabel di atas terlihat bahwa visi dan misi RPJMD Kota Tomohon 2025-2029 dan visi misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun

2025-2029 menunjukkan keselarasan yang kuat dalam aspek maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kedua visi dan misi tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, pembangunan kota yang keberlanjutan dan tata kelola pemerintahan.

3.1.3 KESELARASAN RPJMD KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMN 2025-2029

Keselarasan visi misi antara RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dengan RPJMN tahun 2025-2029 sangat penting dalam rangka mencapai pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di tingkat kota mendukung dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Tabel 3.5. Keselarasan Visi dan Misi Kota Tomohon dan RPJMN

Visi Misi RPJMD Kota Tomohon	Visi Misi RPJMN
Visi: Tomohon Maju, Berdaya Saing, Dan Sejahtera	Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya.	Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.	Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra

Visi Misi RPJMD Kota Tomohon	Visi Misi RPJMN
	produksi melalui peran aktif koperasi. Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia.	Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif.	Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Visi Misi RPJMD Kota Tomohon	Visi Misi RPJMN
	Misi 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa aspek keselarasan antara visi dan misi nasional dengan visi dan misi Kota Tomohon. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, visi RPJMD Kota Tomohon menekankan terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan visi nasional yang bertujuan mencapai Indonesia Emas Tahun 2045. Kedua visi sama-sama mengutamakan kesejahteraan dan kualitas SDM, lingkungan, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025– 2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran ini merupakan hasil proses cascading yang sistematis dan terstruktur, yaitu penurunan visi dan misi ke dalam arah pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Proses cascading ini penting untuk menjamin konsistensi antara arah kebijakan makro dan pelaksanaan program di lapangan, serta untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki rujukan kinerja yang sama dalam mendukung pencapaian pembangunan

daerah. Tujuan menetapkan arah strategis pembangunan, sedangkan sasaran merinci capaian yang lebih spesifik dan dapat diukur, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan indikator kinerja, program prioritas, dan alokasi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025 – 2029, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Cascading Misi 1 RPJMD

Misi	Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Relijius dan berbudaya
Tujuan	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi.
Indikator Tujuan	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Sasaran	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.
Indikator Sasaran	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
Prioritas Pembangunan Daerah	Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
PRIORITAS PROGRAM DAERAH	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Dan Budaya Program Pengembangan Kebudayaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Dalam rangka pencapaian Misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari misi Menjaga dan Melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius dan Berbudaya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi yang diukur dari pencapaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama.

B. Sasaran

Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi, yang terukur dengan pencapaian indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan dan Cakupan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Gambar 3.2. Cascading Misi 2 RPJMD

Misi	Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan				
Tujuan	Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan Kota yang terpadu				
Indikator Tujuan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Infrastruktur				
Sasaran	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya produktivitas pertanian	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim
Indikator Sasaran	Skor Pola Pangan Harapan, Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Indeks Kelayakhunian Kota, Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 ha di Kota yang ditangani	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kota, Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Indeks Resiko Bencana
Prioritas Pembangunan Daerah	Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup.				
PRIORITAS PROGRAM DAERAH	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Permukiman Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)		Program pengembangan perumahan Program kawasan permukiman Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program perencanaan lingkungan hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Penanganan Bencana		

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari misi Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan adalah terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dengan indikator pencapaian yaitu Indeks Ketahanan Pangan dan terwujudnya infrastruktur dan pembangunan Kota yang terpadu dan berkelanjutan dengan indikator pencapaian yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Infrastruktur.

B. Sasaran

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau adalah Pola Pangan Harapan dan Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan.

2. Meningkatnya produktivitas pertanian.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya produktivitas pertanian adalah Produktivitas pertanian per hektar per tahun.

3. Meningkatkan infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatkan infrastruktur kota terpadu adalah Indeks Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup) dan Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 ha di Kota yang ditangani.

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kota, Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, dan Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

5. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim adalah Indeks Risiko Bencana.

Gambar 3.3. Cascading Misi 3 RPJMD

Misi	Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia
Tujuan	Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan
Indikator Tujuan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
Sasaran	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan
Indikator Sasaran	Rata-rata lama tinggal wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Hotel/Penginapan, Restoran, Hiburan) Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Prioritas Pembangunan Daerah	Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.
PRIORITAS PROGRAM DAERAH	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Program pemasaran pariwisata Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari misi Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia adalah terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan yang diukur dari pencapaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.

B. Sasaran

1. Mewujudkan identitas Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatkan identitas Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan adalah Rata-rata lama tinggal wisatawan, Peningkatan PAD sektor pariwisata (Hotel/Penginapan, Restoran, Hiburan), dan Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan.

Gambar 3.4. Cascading Misi 4 RPJMD

Misi	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Tujuan	Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing				
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Manusia, Laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Daya Saing Daerah				
Sasaran	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender
Indikator Sasaran	PDRB per kapita, Rasio Gini, Tingkat kemiskinan	Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah	Umur Harapan Hidup, Prevalansi stunting (pendek dan sangat pendek)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender
Prioritas Pembangunan Daerah	Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.				
PRIORITAS PROGRAM DAERAH	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro		Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pembinaan Perpustakaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari misi Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat adalah Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. yang diukur pencapaian indikator indeks Pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi.

B. Sasaran

1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan Masyarakat.

   Adapun indikator yang menggambarkan meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan Masyarakat adalah PDRB per kapita, gini ratio, indeks daya saing daerah, dan angka kemiskinan.

2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata.

   Adapun indikator yang menggambarkan meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

3. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.

   Adapun indikator yang menggambarkan Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat adalah umur harapan hidup dan prevalansi stunting.

4. Meningkatnya kesempatan kerja.

   Adapun indikator yang menggambarkan Meningkatnya kesempatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka.

5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender adalah.

   Adapun indikator yang menggambarkan Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender adalah indeks Pembangunan kualitas keluarga dan indeks ketimpangan gender.

Gambar 3.5. Cascading Misi 5 RPJMD

Misi	Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif	
Tujuan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel	
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	
Sasaran	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan	Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Indikator Sasaran	Nilai evaluasi AKIP Kota, Nilai EPPD Kota, Indeks SPBE Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Prioritas Pembangunan Daerah	Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.	
PRIORITAS PROGRAM DAERAH	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Riset Dan Inovasi Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari misi Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif adalah Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel dengan indikator pencapaian indeks reformasi birokrasi dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.

B. Sasaran

1. Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Meningkatnya integritas, profesionalisme, inovasi dan digitalisasi layanan adalah Indeks Pelayanan Publik, Nilai evaluasi AKIP Kota, Nilai EPPD Kota, Indeks SPBE, dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2. Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat adalah Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

Tabel 3.6.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2025-20230

VISI: TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target Capaian					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Relijius dan berbudaya												
T.1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi.			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76.47	77	77,5	78	78,5	79	80
		S.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	92	100	100	100	100	100	100
				Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan												
T.2	**Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan Kota yang terpadu**			**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	Indeks	83,92	84,15	84,85	85	85,75	86	86,75
		S.2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89,9	90	91	92	93	94	95
				Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persentase	4,15	3,65	3,15	2,65	2,15	1,85	1,15

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target Capaian					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		S.3	Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persentase	83,33	91	91,67	93,33	95	96,67	100
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,72	67,97	68,22	68,47	68,72	68,97	70
				Indeks Infrastruktur	Indeks	76,04	78	80	81,5	82	83,5	85
		S.4	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	Indeks Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup)	Persentase	71	71,5	71,8	72	72,4	72,5	73
				Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 ha di Kota yang ditangani	Persentase	0	4,75	9,46	14,19	21,29	21,29	21,29
		S.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kota	Persentase	74,87	75	76	77	78	79	80
				Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	50,58	100	100	100	100	100	100
				Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	94,12	100	100	100	100	100	100
		S.6	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	114,17	113	112,00	111	110,00	109	108

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target Capaian					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia												
T.3	**Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan**			**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**	**Persentase**	**2,05**	**2,1**	**2,16**	**2,21**	**2,27**	**2,32**	**2,38**
		S.7	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	1,53	1,55	1,6	1,7	1,8	2
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Hotel/Penginapan, Restoran, Hiburan)	Persentase	12,7	13	14,99	16,22	17,99	19,41	20,57
				Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	0,78	0,86	3,57	3,79	3,82	5,60	6,06
Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat												
T.4	**Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing**			**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**80,06**	**80 - 80,5**	**80 - 80,7**	**80,75 - 80,88**	**80,90 - 81,32**	**81,35 -81,76**	**81,78 -82,2**
				Laju pertumbuhan ekonomi	**Persentase**	**4,74**	**5,00- 5,50**	**5,00 - 6,20**	**5,80 - 6,25**	**6,30 - 6,55**	**6,40 - 6,70**	**6,70 – 7,00**
				Indeks Daya Saing Daerah	**Angka**	**3.67**	**3.7**	**3.72**	**3.75**	**3.78**	**3.8**	**3.82**
		S.8	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat	PDRB per kapita	Rp.	56.563	58,402	60,179	62,956	65,733	67,51	69,287
				Rasio Gini	Indeks	0,34	0,340 - 0,330	0,330 - 0,320	0,320 - 0,315	0,315 - 0,310	0,310 -0,309	0,310 -0,300
				Tingkat kemiskinan	Persentase	5,38	5,00 – 4,75	5,50 – 5,00	5,30 - 4,80	5 - 4,60	4,90 - 3,80	4,80 - 3,50
		S.9	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,38	14,44	14,49	14,55	14,61	14,66	14,72
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,03	11,13	11,22	11,32	11,42	11,51	11,61

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target Capaian					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		S.10	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,57	75,75	75,93	76,11	76,29	76,47	76,65
				Prevalansi stunting (pendek dan sangat pendek)	Persentase	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2
		S.11	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	7,79	7,40 – 7,00	7,31 - 6,55	7,30 - 6,56	7,20 - 5,81	6,80 - 5,60	6,50 - 4,60
		S.12	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga	Persentase	56,03	58	61	64	67	70	75
				Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,155	0,154	0,153	0,150	0,149	0,147	0,145
Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif												
T.5	**Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	70,62	71	71,5	72	73	74	75
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		S.13	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan	Nilai evaluasi AKIP Kota	Angka	65,01	66	66,1	66,2	66,3	66,4	66,5
				Nilai EPPD Kota	Angka	2,6144	2,7	2,8	2,9	3	3	3
				Indeks SPBE	Angka	3,03	3,1	3,2	3,3	3,35	3,4	3,5
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,011	3,061	3,111	3,161	3,211	3,261	3,311

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target Capaian					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		S.14	Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang ditetapkan secara global. Keterkaitan ini terlihat dalam upaya pemerintah Kota Tomohon untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tomohon dengan TPB:

Tabel 3.7. Persandingan Misi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Tomohon Tahun 2025-2029

MISI / TUJUAN / SASARAN	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Relijius dan berbudaya	
Tujuan: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi.	
Sasaran 1: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat
Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	
Tujuan: Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan Kota yang terpadu	
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	TPB 2. Tanpa Kelaparan
Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas pertanian	TPB 2. Tanpa Kelaparan TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 3: Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim, TPB 15. Ekosistem Darat

Sasaran 5: Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim
Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia	
Tujuan: Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	
Sasaran 1: Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
Tujuan: Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	
Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan Masyarakat	TPB 1. Tanpa Kemiskinan, TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Sasaran 2: Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	TPB 4. Pendidikan berkualitas
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	TPB 3. Kehidupan sehat dan sejahtera
Sasaran 4: Meningkatnya kesempatan kerja	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender	TPB 5. Kesetaraan Gender
Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif	
Tujuan: Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel	

Sasaran 1: Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan	TPB 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat, TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	TPB 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, maka perlu diselaraskan antara sasaran pembangunan daerah dan sasaran Prioritas Nasional (PN), sebagaimana terlihat dalam tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Keselarasan Prioritas Nasional dengan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kota Tomohon dengan RPJMN

Prioritas Nasional	Sasaran RPJMN	Sasaran RPJMD Kota Tomohon
PN1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.
PN2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau
	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
PN3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan
	Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya lapangan kerja berkualitas	Meningkatnya kesempatan kerja
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Mewujudkan identitas Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan
	Meningkatnya proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
PN4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata
	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender
	Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kesempatan kerja
	Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia, dan budaya berolahraga di masyarakat	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender
PN5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat

sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Daya Saing Industri Pengolahan	
	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
PN6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan
	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
PN7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	Meningkatnya integritas, profesionalisme, inovasi dan digitalisasi layanan
	Terwujudnya birokrasi Pemerintah yang adaptif dan melayani	Meningkatnya integritas, profesionalisme, inovasi dan digitalisasi layanan
	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender
	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimatisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat
	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat

	inklusif dan berkelanjutan	
PN8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah program yang ditetapkan oleh Presiden sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak signifikan secara nasional. Program ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. ProSN terdiri dari berbagai program dan proyek yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, hingga Proyek Strategis Nasional.

Program ini memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan berkualitas, berkelanjutan, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, ProSN berperan sebagai acuan penting agar seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Keterpaduan antara program pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing daerah, serta akses yang merata terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ProSN juga mencakup aspek strategis dalam menjaga stabilitas nasional melalui berbagai program yang mendukung

ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mensukseskan program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan kerja sama lintas sektor, guna menciptakan lingkungan yang aman, kuat, dan tangguh. Secara keseluruhan, tujuan utama Program Strategis Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan terwujud pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah daftar Program Strategis Nasional (ProSN) yang akan didukung oleh pemerintah Kota Tomohon:

Tabel 3.9 Dukungan Terhadap Program Strategi Nasional

No	Program Strategis Nasional	Proyek / Kegiatan		Dukungan Pemerintah Kota
1	Pengentasan Kemiskinan	1	Penanggulangan Kemiskinan	• Penyediaan lahan yang diperlukan • Percepatan proses perizinan • Penyelesaian permasalahan sosial yang mungkin timbul. • Penguatan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan terkait. • Sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah yang
		2	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	
		3	Sekolah Rakyat	
		4	Pembangunan 3 Juta Rumah	
2	Ketahanan Pangan	1	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	
		2	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	
		3	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	
		4	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*)	
3		1	Stunting	

No	Program Strategis Nasional	Proyek / Kegiatan		Dukungan Pemerintah Kota
	Kesehatan untuk semua	2	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	mendukung penyelesaian PSN. • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan PSN
		3	Jaminan Kesehatan Nasional	
		4	Penuntasan TBC	
		5	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	
4	Perluasan Akses Pendidikan	1	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	
		2	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	
		3	Digitalisasi Pembelajaran	
		4	Makan Bergizi Gratis	
5	Pertumbuhan Ekonomi	1	Pengendalian Inflasi	
		2	Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih	
		3	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	
		4	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	
		5	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	

Pemerintah Kota Tomohon memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui berbagai aspek fasilitatif yang bertujuan memperlancar pelaksanaannya di wilayah setempat. Dukungan tersebut mencakup penyediaan lahan yang diperlukan, percepatan proses perizinan, penyelesaian permasalahan sosial yang mungkin timbul, serta penguatan koordinasi antar

berbagai pemangku kepentingan terkait. Selain itu, Pemerintah Kota Tomohon juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan PSN kepada kementerian atau Lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Tomohon turut serta dalam mewujudkan keberhasilan PSN yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat.

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan peran PSN dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN akan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan demikian, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional akan menjadi bagian dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kerkelanjutan dan berkeadilan.

3.3. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Strategi pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah

arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 3.10. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.	Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.	a. Meningkatkan kerukunan umat beragama serta penguatan pusat-pusat peribadatan. b. Penguatan optimalisasi nilai budaya dan agama dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial. c. Meningkatkan nilai-nilai ideologi Pancasila, kehidupan berdemokrasi, dan karakter kebangsaan. d. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya. e. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya. f. Pemanfaatan khazanah budaya dan pembangunan kawasan pemajuan kebudayaan.
Produktivitas, sistem ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.	Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan dan terwujudnya infrastruktur serta pembangunan Kota yang terpadu	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	a. Meningkatkan ketersediaan, kemandirian, dan akses pangan bagi Masyarakat b. Penguatan dan pengembangan sentra-sentra produksi pangan. c. Mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman. d. Dukungan terhadap program MBG.
Pemenuhan dan pemerataan layanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.			Meningkatnya produktivitas pertanian	a. Meningkatkan produk unggulan pertanian berbasis pemberdayaan Masyarakat b. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan. c. Meningkatkan pengembangan agroindustri, serta intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan.

Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				d. Pengembangan produk pertanian dan pertanian organik *(free pesticide)* serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. e. Peningkatan komoditas unggulan daerah Bunga Krisan dan hortikultura (sayur-sayuran). f. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif. g. Pengembangan produk pertanian dan pertanian organik *(free pesticide)* serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
			Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	a. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif yang selaras dengan rencana tata ruang, berwawasan lingkungan dan berketahanan iklim. b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta mengurangi kawasan kumuh. c. Meningkatkan konektivitas untuk aksesibiltas layanan dasar dan pusat perekonomian serta antar wilayah. d. Meningkatkan infrastruktur dasar kelurahan. e. Dukungan pembangunan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik yang menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara.

Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air, lahan, dan udara serta transisi energi (ESS). b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. c. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. d. Meningkatkan kualitas sanitasi aman dan berkelanjutan e. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah. f. Peningkatan pengelolaan TPA.
			Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	a. Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. b. Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. c. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana.

Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Identitas Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia berkelanjutan.	Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia	Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	a. Meningkatkan kualitas objek daya tarik wisata. b. Peningkatan infrastruktur akses ke lokasi wisata (jalan, transportasi, fasilitas parkir) termasuk pembangunan fasilitas penunjang tempat wisata (toilet umum, informasi wisata, pusat oleh-oleh, akomodasi). c. Meningkatkan kelembagaan, tata kelola destinasi, dan kompetensi SDM pariwisata d. Meningkatnya kualitas event-event pariwisata lokal dan internasional (Tomohon International Flower Festival). e. Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. f. Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan destinasi wisata unggulan (terutama wisata bunga dan wisata geothermal) dalam mendukung pengembangan wilayah. g. Digitalisasi promosi pariwisata dan pelayanan berbasis aplikasi. h. Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas kreatif untuk memperkuat ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan
Produktivitas, sistem ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.	Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas SDM yang	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan Masyarakat	a. Mengembangkan iklim dan daya tarik investasi. b. Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan serta Iklim Perdagangan dan Industri yang Kondusif c. Penguatan proses hilirisasi SDA unggulan dan penerapan ekonomi hijau

Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		unggul dan berdaya saing		d. Menguatkan keunggulan daerah/ sumber pertumbuhan ekonomi dan penguatan kerjasama ekonomi nasional maupun internasional. e. Menjaga stabilitas harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok f. Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM, kapasitas usaha, akses pasar, dan kewirausahaan. g. Penguatan kapasitas Koperasi Merah Putih. h. Meningkatkan kualitas perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif serta peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin. i. Perubahan Perusahaan Daerah di Kota Tomohon menjadi Badan Usaha Milik Daerah baik yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai, serta turut aktif memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
			Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	a. Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan, mengoptimalkan edukasi kepanasbumian serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				b. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pembelajaran serta pendidikan karakter. c. Meningkatkan kuantitas, kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi. d. Meningkatkan budaya literasi yang mendukung daya cipta dan produktivitas.
			Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	a. Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. b. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif. c. Percepatan penanganan *stunting* serta percepatan eliminasi penyakit menular.
			Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan kapasitas, keterampilan, produktivitas, perlindungan tenaga kerja dan hubungan kerjasama luar negeri.
			Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif pemuda yang mandiri dan kreatif. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembinaan prestasi olahraga. c. Meningkatkan peran keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak disabilitas dan lansia serta pengarusutamaan gender.
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel	Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan	a. Meningkatkan kualitas layanan publik dan digitalisasi layanan Pemerintahan. b. Meningkatkan pengelolaan keuangan, penerapan manajemen resiko pada perencanaan dan

Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
serta penguatan sistem inovasi daerah. Adaptasi kemajuan teknologi digital dan pengembangan *smart city*.	Berintegritas, Adaptif, dan Responsif			pengendalian pembangunan yang transparan dan akuntabel. c. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan KKN melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. d. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen ASN melalui prinsip-prinsip meritokrasi. e. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas Belanja Pemerintah. f. Meningkatnya Pengembangan dan Profesionalitas Aparatur Pemerintah g. Peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan teknologi.
			Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	a. Meningkatkan stabilitas keamanan, ketertiban daerah, dan budaya hukum b. Peningkatan kemampuan penanganan konflik sosial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2025-2045. RPJMD ini bertujuan membangun fondasi pembangunan daerah menuju visi jangka panjang, yaitu "Tomohon Kota Wisata Dunia, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan ". Dalam konteks pembangunan, istilah "pondasi" merujuk pada dasar yang kuat dan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 maupun RPJPD Kota Tomohon 2025-2045, pondasi pembangunan mencakup penguatan akses terhadap layanan dasar serta penerapan tata kelola yang partisipatif. Pondasi ini berfungsi sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan fondasi yang kokoh, pembangunan dapat berjalan secara terencana, terintegrasi, serta mampu menghadapi tantangan di masa depan untuk mencapai visi daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pedoman strategis yang mengarahkan rumusan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Setiap tahapan pembangunan dirancang secara berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Tomohon meliputi:

1) Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
2) Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
3) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup.
4) Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.
5) Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi.

6) Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
7) Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.
8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah selain untuk menjawab visi, misi serta isu strategis daerah juga untuk menjawab prioritas nasional sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Keselarasan Prioritas Nasional
dan Prioritas Pembangunan Daerah

Visi Misi RPJMD Kota Tomohon	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tomohon	Prioritas Nasional
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya.	PD 1: Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.	PN1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PN8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.	PD 2: Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. PD3: Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup.	PN2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. PN3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PN6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan

Visi Misi RPJMD Kota Tomohon	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tomohon	Prioritas Nasional
		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia.	PD 4: Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.	PN3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	PD 5: Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi. PD 6: Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.	PN3: Melanjutkan pengembangan infrastrukutur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PN4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PN5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri PN6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas,	PD 7: Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.	PN2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui

Visi Misi RPJMD Kota Tomohon	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tomohon	Prioritas Nasional
Adaptif, dan Responsif.	PD 8: Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.	swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. PN7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Adapun yang menjadi program prioritas untuk menjawab perwujudan Pembangunan jangka menengah Kota Tomohon tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12. Program Prioritas RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Misi 1: Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya					
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, relijius, berbudaya, dan berdemokrasi.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA	KESBANGPOL
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DIKBUD
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESBANGPOL
Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan					
Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Presentase cadangan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (TPB 2)	PANGAN
			Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		
			Rasio Ketersediaan Infrastruktur		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (TPB 2)	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
			Skor Pola Pangan Harapan		
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN (TPB 2)	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (TPB 2)	
	Meningkatnya produktivitas pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERTANIAN & PERIKANAN
			Peningkatan Produksi Hortikultura		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (TPB 14)	
Terwujudnya infrastruktur dan pembangunan Kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA) (TPB 6)	PUPR
			Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
		Menigkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (TPB 6)	
		Menigkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola di TPA/TPST Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (TPB 6)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Menigkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (TPB 6)	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (TPB 6)	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (TPB 11)	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (TPB 11)	PERHUBUNGAN
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERKIM

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			pemerintah kabupaten/kota		
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
		Meningkatnya hunian yang layak dan berkelanjutan	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Timur	Cakupan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Tengah	Cakupan pemberdayaan masyarakat		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Barat	Cakupan pemberdayaan masyarakat		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Selatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Utara	Cakupan pemberdayaan masyarakat		
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (TPB 11 & 13)	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekeragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Bercun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Bercun (B3)	Persentase limbah berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (TPB 12)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (TPB 12)	
			Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kota		
		Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (TPB 7)	DINAS TENAGA KERJA
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (TPB 11 & 13)	BPBD
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana		
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkat Kesiapsiagaannya		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATPOL PP
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia					
Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan	Mewujudkan identitas Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (TPB 8)	PARIWISATA
			Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD		
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		
			Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota		
			Tingkat hunian akomodasi		
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (TPB 8)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TPB 10)	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat					
Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera	Meningkatnya pemerataan perekonomian, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERDAGIN

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		Meningktnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI (TPB 9)	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (TPB 9)	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (TPB 9)	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
			Persentase Penyandang Anak Terlantar yang		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			Persentase Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			Persentase Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.		
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (TPB 1)	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (TPB 1)	
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitas dalam Pelayanan Sosial		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	KOPERASI & UMKM
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) (TPB 8 & 10)	
			Pertumbuhan Wirausaha		
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (TPB 8)	
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (TPB 4)	DIKBUD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Meningkatnya mutu dan distribusi PTK	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TPB 4)	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (TPB 4)	
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya kualitas	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	DINKES

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	kesehatan masyarakat		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (TPB 3)	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (TPB 3)	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (TPB 3)	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (TPB 3)	
	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORA
			Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan		
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (TPB 5)	P3A
		Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (TPB 5)	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan peremouan dan anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA (TPB 5)	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (TPB 5)	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sehat (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DPPKB
			Presentase Keluarga yang Mengikuti		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		
	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (TPB 8)	DISNAKER
		Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (TPB 8)	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA (TPB 8)	
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif					
Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel	Meningkatnya integritas, profesionalisme, inovasi dan digitalisasi layanan	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAPIL
			Persentase kepemilikan KIA		
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	KOMINFO
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (TPB 17)	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik		KECAMATAN
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik		KECAMATAN
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik		KECAMATAN
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik		KECAMATAN
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan ()	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (TPB 9)	BAPELITBANG
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah ()		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah ()		
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH (TPB 9)	BAPELITBANG
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPELITBANG
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
			Persentase Penurunan SILPA		
		Meningkatnya tata kelola akuntasi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (TPB 17)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah		
			Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Efektivitas Kerja Sama Daerah		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan penganggaran	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi		
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
	Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	perlindungan masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Barat	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Tengah	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Utara	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (TPB 10)	KESBANGPOL

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

3.3.2. Tahapan Pembangunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

3.3.2.1. Tema Pembangunan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Tomohon dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun.

Gambar 3.6.
Penahapan Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025-2030

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional. Visi dan misi kepala daerah yang telah dijabarkan ke tujuan dan sasaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun diwujudkan dengan serangkaian strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah.

3.3.2.2. Pentahapan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

Tabel 3.13 Pentahapan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

Memperkuat Transformasi Tata Kelola, SDM Berdaya Saing, Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, dan Ekonomi yang Berkelanjutan	• Meningkatkan kerukunan umat beragama, pemajuan kebudayaan, dan penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila. • Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian pangan serta sistem pertanian berkelanjutan. • Penguatan pembangunan sarana dan prasarana / infrastruktur layanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk menopang Tomohon sebagai kota wisata dunia. • Meningkatkan kualitas destinasi dan event pariwisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing. • Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.

	• Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peran pemuda dan keluarga, pemenuhan kualitas perlindungan sosial, dalam peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal. • Peningkatan investasi, kewirausahaan / UMKM dan produktivitas tenaga kerja. • Peningkatan riset, inovasi dan teknologi • Meningkatkan kemampuan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik prima.
Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera	• Penguatan optimalisasi nilai budaya dan agama dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial. • Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian pangan serta sistem pertanian berkelanjutan. • Penguatan pembangunan sarana dan prasarana / infrastruktur layanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk menopang Tomohon sebagai kota wisata dunia. • Meningkatkan kualitas destinasi dan event pariwisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing. • Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana. • Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peran pemuda dan keluarga, pemenuhan kualitas perlindungan sosial, dalam peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal. • Peningkatan investasi, kewirausahaan / UMKM dan produktivitas tenaga kerja. • Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. • Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan

	investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. • Penguatan riset, inovasi dan teknologi • Meningkatkan kemampuan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik prima.
Pemantapan Fondasi Transformasi Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera	• Meningkatkan kerukunan umat beragama, pemajuan kebudayaan, dan penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila. • Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian pangan serta sistem pertanian berkelanjutan. • Penguatan pembangunan sarana dan prasarana / infrastruktur layanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk menopang Tomohon sebagai kota wisata dunia. • Meningkatkan kualitas destinasi dan event pariwisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing. • Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana. • Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peran pemuda dan keluarga, pemenuhan kualitas perlindungan sosial, dalam peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal. • Peningkatan investasi, kewirausahaan / UMKM dan produktivitas tenaga kerja. • Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. • Penguatan riset, inovasi dan teknologi. • Meningkatkan kemampuan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik prima.
Perwujudan Fondasi Transformasi Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera	• Meningkatkan kerukunan umat beragama, pemajuan kebudayaan, dan penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila. • Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian pangan serta sistem pertanian berkelanjutan.

	• Penguatan pembangunan sarana dan prasarana / infrastruktur layanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk menopang Tomohon sebagai kota wisata dunia. • Meningkatkan kualitas destinasi dan event pariwisata serta ekonomi kreatif yang berdaya saing. • Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana. • Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peran pemuda dan keluarga, pemenuhan kualitas perlindungan sosial, dalam peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal. • Peningkatan investasi, kewirausahaan / UMKM dan produktivitas tenaga kerja. • Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. • Penguatan riset, inovasi dan teknologi. • Meningkatkan kemampuan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik prima.
Akselerasi Transformasi Menuju Keunggulan SDM, Produktivitas dan Daya Saing Daerah, Transformasi Digital serta Pembangunan Berkelanjutan	• Peningkatan kerukunan umat beragama, pemajuan kebudayaan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. • Peningkatan kualitas SDM berdaya saing melalui tata kelola pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi inklusif yang adaptif, serta profesional. • Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. • Penguatan pemenuhan akses digital di segala bidang. • Penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi menguatkan keunggulan absolut daerah dan memanfaatkan keunggulan komparatif melaui

		penguatan kerjasama ekonomi dibidang perdagangan internasional. • Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, partisipatif, dan transparan guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. • Penguatan riset, inovasi dan teknologi. • Penguatan stabilitas politik dan keamanan.

3.3.3. Arah Kebijakan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

Arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2029 tidak terpisahkan arah kebijakan Arah Kebijakan RPJPD Periode I (2025-2029): Penguatan Fondasi Transformasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.14 Arah Kebijakan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing dan perlindungan sosial yang adaptif	Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
		Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan, mengoptimalkan edukasi kepanasbumian serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
		Penuntasan pemenuhan kualitas perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2	Mewujudkan tranformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang inklusif, teknologi dan inovasi serta peningkatan produktivitas daerah sebagai Kota Wisata.	Upaya lanjutan penguatan proses hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset, inovasi, kewirausahaan dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah sebagai Kota Wisata.
		Penguatan penerapan ekonomi hijau di segala bidang, Memfokuskan transisi energi pada penerapan CCS/CCUS, pemanfaatan *energy storage system* (ESS).
		Penguatan pemenuhan akses digital di segala bidang.

No	Misi	Arah Kebijakan
		Penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi menguatkan keunggulan absolut daerah dan memanfaatkan keunggulan komparatif melaui penguatan kerjasama ekonomi dibidang perdagangan internasional
		Penguatan pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru menopang Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia.
3	Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif.	Penguatan perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, penerapan manajemen resiko pada perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan kapasitas masyarakat sipil
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik dan keamanan, pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum, dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perdamaian.
		Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
		Penguatan keamanan daerah.
5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Penguatan optimalisasi nilai budaya dan agama dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial.
		Penguatan optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, pengarusutamaan gender dan menggerakkan modal sosial.

No	Misi	Arah Kebijakan
		Penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam menigkatkan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
		Penguatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan penggunaan energi terbarukan. Serta penguatan riset, inovasi dan teknologi menopang ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.
		Penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana. Serta penguatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
6	Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan.	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon.
7	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan menuju Kota Wisata Dunia yang ramah lingkungan	Penguatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan daerah

3.3.4. Arah Pengembangan Wilayah Kota Tomohon

Arah pengembangan wilayah Kota Tomohon, wajib memperhatikan arahan secara spasial baik secara Nasional maupun Provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Kota Tomohon merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Di Provinsi Sulawesi Utara. Pusat Kegiatan Wilayah berfungsi sebagai simpul transportasi untuk menghubungkan kabupaten kota serta mendukung ekspor impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional, berfungsi sebagai pusat kegiatan

industry yang melayani provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Sector kepariwisataan, Tomohon termasuk sebagai kota yang merupakan delineasi dari Rencana Induk Destinasi Manado Likupang, halamana di kota Tomohon terdapat sekitar 70 Key Tourism Area/KTA (PP 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Manado-Likupang).

Dalam RPJMN 2025-2029, Kota Tomohon juga merupakan Wilayah Metropolitan BIMINDO (Bitung,MInahasa,Manado, Kota Tomohon, Minahasa Utara). System perkotaan aglomerasi beberapa daerah yang berdekatan yang diharapkan berkembang secara teratur dan berkesinambungan.

Untuk menunjang beberapa hal seperti perencanaan secara spasial dan perencanaan sektoral di atas, maka Kota Tomohon dalam hal pengembangan kewilayahaan dalam Rancangan RPJMD 2025-2029 mengikuti arahan pengembangan struktur ruang sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033. Arah pengembangan wilayah Kota Tomohon di atur dalam Struktur Ruang Kota Tomohon yang terdiri dari Pusat-Pusat Pelayanan Kota dengan hierarki yaitu:

I. PUSAT PELAYANAN KOTA (PPK)

Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi kawasan yang berada di antara Kecamatan Tomohon Tengah dan Timur yang berlokasi di kawasan Matani, Paslaten, Kolongan, Kamasi, dan Talete, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Pendidikan, yang mencakup pelayanan berjenjang pendidikan tinggi dan setingkatnya serta perpustakaan berskala wilayah;
2. Kesehatan, yang mencakup pelayanan Rumah Sakit tipe A dan B
   dan Rumah Sakit Bersalin;
3. Sarana peribadatan yang berskala kota
4. Olahraga dan rekreasi, meliputi kompleks gelanggang olahraga,sarana-sarana (gedung), hiburan dan kesenian, bioskop, taman kota, dan lain-lain yang berskala kota dan wilayah;
5. Pemerintahan, meliputi fasilitas pemerintahan kota, kantor pos wilayah, kantor-kantor pelayanan lainnya yang bersifat pelayanan wilayah seperti kantor Telkom, PDAM, PLN, kantor pemadam kebakaran dan kebersihan
6. Gedung pertemuan umum dan sarana budaya berskala wilayah

7. Perdagangan, yang mencakup pusat-pusat perbelanjaan utama seperti kompleks pertokoan dan *mall*, pasar, bank, dan pelayananpelayanan jasa lainnya yang berskala wilayah
8. Transportasi, meliputi terminal kota dan parkir umum berskala local

II. SUB PUSAT PELAYANAN KOTA (SPPK)

SPPK meliputi kawasan Kinilow yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Utara, kawasan Rurukan yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Timur, kawasan Tara-Tara yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Barat, kawasan Lahendong yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Selatan, kawasan Woloan-Walian-Lansot yang merupakan kawasan pengembangan KASIBA dan pusat perkantoran yang berlokasi di antara Kecamatan Tomohon Selatan dan Barat dengan fungsi:

1. Pendidikan, yang mencakup pendidikan tertinggi berupa pendidikan akademik dan sekolah tinggi serta perpustakaan daerah;
2. Kesehatan, mencakup rumah sakit tipe b dan c dan rumah sakit bersalin;
3. Gedung serbaguna berskala kawasan;
4. Olahraga dan rekreasi, meliputi gedung olahraga tunggal dan bioskop, taman kawasan dan taman pekuburan;
5. Perdagangan, yang mencakup pusat perbelanjaan, pasar, dan pertokoan/ruko terbatas;
6. Prasarana dan sarana penunjang agropolitan; dan
7. Transportasi, meliputi terminal yang bersifat transit dan parkir umum

III. PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PL)

PPL meliputi kawasan Tinoor, Kakakskasen Dua, Wailan yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Utara; kawasan Matani Satu di daerah Kasuang yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Tengah; kawasan Woloan Dua yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Barat; kawasan Pinaras, Tumatangtang, Pangolombian, Tondangow yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Selatan dengan fungsi

1. Pendidikan, yang mencakup pendidikan SLTA dan setingkatnya;
2. Kesehatan, mencakup pelayanan puskesmas dan apotik/toko obat

3. Gedung serbaguna berskala local
4. Olahraga dan rekreasi, lapangan olahraga dan taman kawasan;
5. Perdagangan, yang mencakup tempat perdagangan pasar berskala lokal dan pertokoan, warung yang sangat terbatas

Dalam Perda RTRW tersebut juga mengatur peruntukan kawasan mana yang peruntukan untuk membangun dan kawasan mana yang tidak dapat di bangun. Hal ini di atur dalam rencana pola ruang kota. Pola Ruang secara umum berfungsi sebagai instrument untuk melihat batasan dari masing-masing peruntukan, yaitu kawasan Lindung, Kawasan Cagar Alam, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Permukiman, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Pertahanan/Keamanan, Kawasan Danau, Kawasan Industri, Kawasan Pertanian, Kawasan Perdagangan/Jasa, Persekolahan, Kesehatan, Pertanian (Basah dan kering), Perkebunan, Perkantoran, dll. Rencana struktur dan pola ruang akan menyesuaikan dengan Perda RTRW Kota Tomohon yang terbaru.

Pelaksanaan program pembangunan selama 5 Tahun ke depan wajib memperhatikan kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal menjaga ekosistem lingkungan dengan tidak mengokupasi kawasan lindung dan cagar alam serta kawasan hutan yang merupakan *mandatory* dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungah Hidup. Untuk menunjang sektor pangan selain memperhatikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan juga lahan pertanian lainnya.

Tabel 3.15. Rencana Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Per Wilayah / Kecamatan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029

Nama Proyek	Keterangan
Pembangunan jalan lingkar barat (dari Kakaskasen-Tinoor)	Tomohon Utara
Penanganan kawasan kumuh	(Kinilow, Kinilow 1, Pangolombian, Tondangow)
Pengembangan Tekaan Telu, Danau Linau	Tomohon Utara & Selatan
Penanganan sampah	Seluruh Kecamatan
Penanganan sanitasi	Seluruh Kecamatan
Revitalisasi Kota / Sineleyan	Tomohon Tengah
Peningkatan air minum	Seluruh Kecamatan
Kampung Tangguh Bencana	Seluruh Kecamatan
Revitalisasi pasar beriman	Tomohon Timur
Pengembangan Hutan Irang	Tomohon Barat

Nama Proyek	Keterangan
Operasionalisasi IPLT	Tomohon Barat
Pembangunan waduk	Tomohon Barat
Pengembangan wisata air panas Lahendong	Tomohon Selatan
Pembangunan Sport Center	Kota Tomohon
Revitalisasi RS	Tomohon Selatan
Revitalisasi perkantoran	Kota Tomohon

3.4. Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Selain dalam rangka menjawab sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye sebagai berikut:

Tabel 3.16. Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota

No	Janji Politik / Kampanye	Penjelasan
1	Melanjutkan dan meningkatkan insentif bagi rohaniawan.	Melanjutkan pemberian insentif bagi rohaniawan sebagai bentuk aspresiasi atas pelayanan spiritual yang diberikan dan predikat Kota Tomohon sebagai kota religius.
2	Peningkatan sarana prasarana kesenian, kebudayaaan dan olahraga.	Ketersediaan sarana kesenian, budaya, dan olahraga sebagai sarana / tempat untuk menyalurkan minat bakat, pelestarian budaya dan sebagai ruang untuk berkreasi.
3	Melanjutkan pembangunan sarana prasarana pertanian, perkebunan,dan peternakan.	Untuk memperkuat ekonomi pertanian, tentunya harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan peternakan. Alat pertanian, bibit dan pupuk menjadi faktor utama dalam usaha pertanian. Distribusi pertanian yang lancar akan mempercepat peningkatan produktivitas pertanian yang berdampak bagi peningkatan ekonomi petani dan peternak.
	Revitalisasi kawasan pasar, terminal, dan pusat kota.	Pengelolaan pasar tradisional menjadi pasar trasional modern, orientasinya terletak pada penataan pasar yang bersih, adanya pengawasan pedagang yang terkendali, penataan pusat Kota dan pusat perekonomian, sistem pembelanjaan yang memberikan kenyamanan, serta penataan alur lalulitas orang dan kendaraan yang teratur. Selain itu juga, manajemen pasar yang profesional sehingga hasil dari pendapatan pasar dapat memberikan penerimaan keuangan daerah yang menunjang pendapatan asli daerah. Selain itu juga, dapat dijadikan

No	Janji Politik / Kampanye	Penjelasan
		sebagai lahan investasi dalam bisnis hortikultura dan pasar induk tradisional modern di Sulawesi Utara.
5	Peningkatan infrastruktur untuk menunjang ekonomi dan pariwisata	Akses ekonomi dan pariwisata ini dibuat dalam rangka mempercepat dan meningkatkan akses masyarakat untuk menuju area-area destinasi kepariwisataan. Sekaligus menunjang pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Utara. Semakin luas akses ekonomi dan kepariwisata membuktikan daerah tersebut semakin maju, dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat diantaranya bertumbuhnya UMKM.
6	Pengembangan Taman Bunga Tomohon	Kota Tomohon sebagai kota bunga wujud nyatanya harus memiliki kawasan taman bunga, sehingga memperkuat nilai jual kota Tomohon sebagai destinasi wisata alam yang salah satunya adalah terdapatnya kawasan taman bunga di Tomohon.
7	Pembuatan *starting point* alam pegunungan	Penyediaan starting point wisata alam pegunungan merupakan salah satu bentuk pengembangan dari wisata alam, khususnya mereka yang senang dengan petualangan alam. Kota Tomohon, kota pegunungan dan potensial dengan ekowisata.
8	Melanjutkan dan memperbanyak pelaksanaan *event-event* pariwisata lokal, nasional,dan internasional	Sebuah konsekuensi untuk mewujudkan kota Tomohon sebagai kota wisata dunia, maka salam satu cara untuk menjadikan kota wisata dunia adalah memperbanyak event-event pariwisata, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tentunya, event ini harus diperkuat dengan manajemen kepariwisataan yang sudah tertata baik dan profesional, karena secara tidak langsung berkaitan erat dengan aspek pemasaran kepariwisataan kota Tomohon.
9	Melanjutkan dan meningkatkan insentif bagi perangkat dan ASN	Peningkatan insentif bagi ASN dan perangkat dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat. Insentif diberikan juga, dalam rangka memberikan penghargaan dan nilai tambah bagi aparatur sipil negara dan perangkat yang telah memberi diri untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat .
10	Tomohon smart city	Menjadikan kota Tomohon sebagai Smart City akan ditunjang dengan percepatan pembangunan berbasis digitalisasi. Dimulai dari sitem pemerintahan berbasis digital dan

No	Janji Politik / Kampanye	Penjelasan
		ketersediaan layanan publik yang berorientasi pada layanan digital. Area-area ruang publik akan difasilitasi dengan hotspot internet, peningkatan fungsi *command center*, jalan utama yang diperbanyak dengan CCTV yang multifungsi.
11	Meningkatkan akses lapangan kerja dalam dan luar negeri.	Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lewat pelatihan bahasa asing dan sertifikasi kompetensi.
12	Penguatan kesetaraaan gender, peran perempuan dan perlindungan anak, pemuda, serta penyandang disabilitas.	Untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak anak, penyandang disablitas, dan lanjut usia serta peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan.
13	Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal	Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang cepat tanpa persyaratan birokrasi yang panjang, serta mampu untuk memberikan mutu layanan yang baik. Sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dimikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kunci utama dalam layanan prima ini adalah mampu menjalankan setiap tugas dan fungsi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Bentuk pelayanan prima bagi masyarakat, yakni pelayanan publik untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan, pengurusan ijin dan non perijinan, layanan trasportasi publik .
14	Penyediaan air bersih kepada Masyarakat	Ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap warga masyarakat. Sebab berkaitan erat dengan aspek kesehatan khususnya Pola Hidup Bersih dan Sehat. Kebersihan dan pola hidup sehat merupakan hak dasar yang harus menjadi perhatian dalam program-program pelayanan dasar.
15	Melanjutkan dan meningkatkan penyediaan rumah sederhana layak huni.	Tidak jauh berbeda dengan akses air bersih bagi masyarakat, ketersediaan rumah layak huni merupakan hak ketersediaan hak dasar setiap warga, karena semuanya akan berujung pada aspek kesehatan manusia secara individu dan lingkungan. Ketersediaan rumah layak huni sebuah bentuk perhatian pemerintah untuk menjadikan keluarga untuk tinggal

No	Janji Politik / Kampanye	Penjelasan
		dengan standar-standar kesehatan lingkungan, yakni bersih, sirkulasi udara yang teratur, pencahayaan dalam rumah yang baik, sehingga berdampak baik pada kesehatan isi penghuni rumah itu sendiri.
16	Melanjutkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang memadai	Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan bagian dari urusan pelayanan dasar, maka wajib hukumnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan disetiap jenjang layanan, mulai dari pembantu puskesmas, puskemas kecarmatan dan rumah sakit. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan akan memberikan makna profesionalitas layanan, jika ditunjang dengan ketersediaan kualitas sumberdaya kesehatan. Dengan demikian, ketersediaan pelayanan sarana dan kesehatan akan diikuti oleh adanya peningkatan sumberdaya bidang kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan sampai dokter ahli.
17	Melanjutkan bantuan sosial bagi lansia	Bantuan sosial lansia sebagai wujud dari upaya untuk meningkatkan kualitas para lansia dan khususnya memberikan bantuan untuk memperkuat kesehatan para lansia.
18	Melanjutkan santunan duka	Pemberian santunan duka merupakan bentuk rasa simpati dan empati pemerintah kepada keluarga yang berduka dalam meringankan biaya duka. Perhatian pemerintah dalam memberikan dana duka merupakan salah satu wujud dari budaya etnis minahasa mapalus duka. Turut meringankan keluarga sehingga tidak memberikan beban besar bagi keluarga yang berduka.
19	Meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan	Pemberian beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik tujuan utamanya untuk mendorong adanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Beasiswa mempermudah bagi siswa dan tenaga pendidik untuk maju dan mampu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan agar para siswa dan tenaga pendidik mampu menjadi agen perubahan di era yang semakin cepat berkembang.
20	Memperkokoh sinergitas pemerintah kota dengan Provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan Masyarakat	Sinergitas pemerintah dengan provinsi dan pemerintah pusat merupakan sebuah keharusan dalam urusan pelayanan birokrasi, pelayanan publik dan pelayanan dunia usaha dan para pihak lainnya. Sinergitas dibutuhkan untuk menjawab hasil pembangunan yang satu arah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) maupun rencana pembangunan jangka menengah

No	Janji Politik / Kampanye	Penjelasan
		daerah (RPJMD) daerah provinsi dan kota Tomohon. Keuntungan dari sinergitas pembangunan, yakni adanya percepatan pembangunan dengan pembagian anggaran yang proposional dari pemerintah pusat dan provinsi ke pemerintah kota Tomohon. Dengan demikian, anggaran pembangunan daerah kota Tomohon, khususnya APBD tidak terlalu menjadi beban besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan non fisik.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah. pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (supporting).

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya dijabarkan lebih rinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pendanaan program disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Untuk itu perlu disusun kerangka pendanaan untuk membiayai belanja pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal ini pola pengeluaran per perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun.

Tabel 4.1

Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tomohon

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					125.272.942.575		129.179.723.365		131.992.850.605		136.005.433.265		144.027.349.650	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100.151.113.750		103.090.269.639		105.110.277.486		108.305.629.922		114.430.109.778	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	100.151.113.750	100	103.090.269.639	100	105.110.277.486	100	108.305.629.922	100	114.430.109.778	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					19.311.309.905		19.898.373.726		20.503.284.287		21.126.584.130		22.573.755.143	
Meningkatnya Partispasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	91,5	100	100	19.311.309.905	100	19.898.373.726	100	20.503.284.287	100	21.126.584.130	100	22.573.755.143	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	84,96	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	86,13	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	61,29	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					200.000.000		206.080.000		212.344.832		218.800.115		233.787.923	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	206.080.000	100	212.344.832	100	218.800.115	100	233.787.923	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					5.610.518.920		5.985.000.000		6.166.944.000		6.354.419.098		6.789.696.806	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	82,01	100	100	5.610.518.920	100	5.985.000.000	100	6.166.944.000	100	6.354.419.098	100	6.789.696.806	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					125.924.614.912		131.083.923.206		136.039.274.472		140.881.773.347		151.819.909.354	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					79.223.001.992		82.962.581.253		86.755.043.723		90.601.997.052		99.114.397.806	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	57.223.001.992	100	58.962.581.253	100	60.755.043.723	100	62.601.997.052	100	66.114.397.806	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD ANUGERAH
														1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS LANSOT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSUD Anugerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	22.000.000.000	100	24.000.000.000	100	26.000.000.000	100	28.000.000.000	100	33.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD ANUGERAH
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					43.806.612.920		45.138.333.953		46.210.539.305		47.112.644.633		49.321.431.366	
Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	150	150	145	43.806.612.920	140	45.138.333.953	135	46.210.539.305	133	47.112.644.633	130	49.321.431.366	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%))	10,8	10,7	10,6		10,5		10,4		10,3		10,2		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	80,9	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	98	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	96,18	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	82	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	97,68	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	102,1	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	88,6	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	148,35	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD ANUGERAH
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					460.000.000		473.984.000		488.393.114		503.240.264		537.712.222	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	50	50	50	460.000.000	50	473.984.000	50	488.393.114	50	503.240.264	50	537.712.222	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD ANUGERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					650.000.000		669.760.000		690.120.704		711.100.373		759.810.749	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	75	75	75	650.000.000	75	669.760.000	75	690.120.704	75	711.100.373	75	759.810.749	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD ANUGERAH
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.785.000.000		1.839.264.000		1.895.177.626		1.952.791.025		2.086.557.211	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	85	85	85	1.785.000.000	85	1.839.264.000	85	1.895.177.626	85	1.952.791.025	85	2.086.557.211	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAERAH
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD ANUGERAH
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					102.389.879.815		54.531.663.622		55.599.691.284		56.863.990.892		60.575.624.268	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.177.493.065		9.363.982.315		9.648.647.377		9.941.966.258		10.622.990.946	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	9.177.493.065	100	9.363.982.315	100	9.648.647.377	100	9.941.966.258	100	10.622.990.946	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.452.386.750		6.648.539.307		6.850.654.902		7.058.914.811		7.542.450.476	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	0	20	7.452.386.750	20	6.648.539.307	20	6.850.654.902	20	7.058.914.811	20	7.542.450.476	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	0	0	10		10		10		10		10		1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	69,4	0	69,6		72		74,4		76,7		79,1		1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					7.400.000.000		7.770.000.000		8.006.208.000		8.249.596.723		8.814.694.099	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	60	65	94	7.400.000.000	96	7.770.000.000	97	8.006.208.000	99	8.249.596.723	100	8.814.694.099	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.000.000.000		2.060.800.000		2.060.800.000		2.123.448.320		2.268.904.530	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	50	50	60	2.000.000.000	65	2.060.800.000	70	2.060.800.000	75	2.123.448.320	80	2.268.904.530	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.350.000.000		3.852.500.000		3.969.616.000		4.090.292.326		4.370.477.351	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	94,52	96	97	3.350.000.000	98	3.852.500.000	99	3.969.616.000	100	4.090.292.326	100	4.370.477.351	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.480.000.000		2.555.392.000		2.633.075.917		2.713.121.425		2.898.970.242	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	92	92	95	2.480.000.000	97	2.555.392.000	100	2.633.075.917	100	2.713.121.425	100	2.898.970.242	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					250.000.000		253.750.000		261.464.000		269.412.506		287.867.262	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	70	70	73	250.000.000	76	253.750.000	79	261.464.000	82	269.412.506	85	287.867.262	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					50.480.000.000		494.400.000		509.429.760		524.916.425		560.873.200	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%)	7	9	11	50.480.000.000	13	494.400.000	15	509.429.760	17	524.916.425	19	560.873.200	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					100.000.000		51.500.000		53.065.600		54.678.794		58.424.292	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	0	5	100.000.000	10	51.500.000	15	53.065.600	20	54.678.794	25	58.424.292	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					18.560.000.000		17.980.480.000		18.000.000.000		18.121.268.992		19.179.025.918	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	72,89	77,4	81,91	18.560.000.000	86,42	17.980.480.000	90,93	18.000.000.000	95,44	18.121.268.992	97	19.179.025.918	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					40.000.000		100.000.000		103.040.000		106.172.416		113.445.226	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	5	40.000.000	10	100.000.000	15	103.040.000	20	106.172.416	25	113.445.226	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.100.000.000		3.400.320.000		3.503.689.728		3.610.201.896		3.857.500.726	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	0	100	100	1.100.000.000	100	3.400.320.000	100	3.503.689.728	100	3.610.201.896	100	3.857.500.726	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					6.057.768.119		6.476.675.713		6.673.566.654		7.302.374.089		7.986.136.715	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.234.712.750		3.333.048.018		3.434.372.677		3.538.777.607		3.781.183.873	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.234.712.750	100	3.333.048.018	100	3.434.372.677	100	3.538.777.607	100	3.781.183.873	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					273.013.000		281.312.595		289.864.498		298.676.379		319.135.711	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	100	100	273.013.000	100	281.312.595	100	289.864.498	100	298.676.379	100	319.135.711	1.04.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.063.800.000		1.200.000.000		1.236.480.000		1.274.068.992		1.361.342.718	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0	5	10	1.063.800.000	20	1.200.000.000	20	1.236.480.000	20	1.274.068.992	20	1.361.342.718	1.04.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.037.567.000		1.200.000.000		1.236.480.000		1.700.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya Hunian yang Layak dan Berkelanjutan	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	4,4	1,9	2,4	1.037.567.000	2,9	1.200.000.000	3,5	1.236.480.000	4,2	1.700.000.000	3,7	2.000.000.000	1.04.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					448.675.369		462.315.100		476.369.479		490.851.111		524.474.413	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana (Persentase)	96,35	96,52	96,86	448.675.369	97,38	462.315.100	98,16	476.369.479	98,94	490.851.111	99,72	524.474.413	1.04.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	61,1	66,67	72,22		77,78		83,33		88,89		94,44		1.04.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					24.281.103.431		25.283.299.889		26.157.762.353		26.952.958.328		28.799.235.972	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.033.993.006		12.399.826.393		12.776.781.116		13.165.195.262		14.067.011.137	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (BPBD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.231.102.053	100	4.359.727.555	100	4.492.263.273	100	4.628.828.077	100	4.945.902.800	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP)	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	7.802.890.953	100	8.040.098.838	100	8.284.517.843	100	8.536.367.185	100	9.121.108.337	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					11.464.939.340		11.813.473.496		12.172.603.091		12.542.650.224		13.401.821.765	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	20.000.000	100	3.937.824.498	100	4.057.534.363	100	4.180.883.407	100	4.467.273.921	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	11.419.939.340	100	3.937.824.498	100	4.057.534.363	100	4.180.883.407	100	4.467.273.921	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	25.000.000	100	3.937.824.500	100	4.057.534.365	100	4.180.883.410	100	4.467.273.923	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					612.171.085		700.000.000		827.130.146		852.274.902		910.655.732	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	399.839.237	100	300.000.000	100	359.120.000	100	370.037.248	100	395.384.799	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	98.031.948	100	200.000.000	100	256.080.000	100	263.864.832	100	281.939.573	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	114.299.900	100	200.000.000	100	211.930.146	100	218.372.822	100	233.331.360	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					170.000.000		370.000.000		381.248.000		392.837.940		419.747.338	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	185.000.000	100	190.624.000	100	196.418.970	100	209.873.669	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	120.000.000	100	185.000.000	100	190.624.000	100	196.418.970	100	209.873.669	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.743.082.467		7.978.472.174		8.221.017.729		8.470.936.666		9.051.195.829	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.128.779.099		4.254.293.984		4.383.624.521		4.516.886.706		4.826.293.446	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.128.779.099	100	4.254.293.984	100	4.383.624.521	100	4.516.886.706	100	4.826.293.446	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					155.000.000		159.712.000		164.567.245		169.570.089		181.185.640	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitas dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	155.000.000	100	159.712.000	100	164.567.245	100	169.570.089	100	181.185.640	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	50	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					660.000.000		680.064.000		700.737.946		722.040.379		771.500.145	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	660.000.000	100	680.064.000	100	700.737.946	100	722.040.379	100	771.500.145	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
	Persentase Penyandang Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
	Persentase Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
	Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.231.303.368		2.299.134.990		2.369.028.694		2.441.047.166		2.608.258.897	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100	2.231.303.368	100	2.299.134.990	100	2.369.028.694	100	2.441.047.166	100	2.608.258.897	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					568.000.000		585.267.200		603.059.323		621.392.326		663.957.701	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota (%)	100	100	100	568.000.000	100	585.267.200	100	603.059.323	100	621.392.326	100	663.957.701	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS SOSIAL DAERAH
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.086.864.304		10.177.695.004		10.462.776.932		10.756.525.351		11.338.547.338	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.674.151.940		3.785.846.159		3.900.935.882		4.019.524.333		4.194.861.750	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.674.151.940	100	3.785.846.159	100	3.900.935.882	100	4.019.524.333	100	4.194.861.750	2.07.3.29.0.00.01.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					50.000.000		51.520.000		53.086.208		54.700.029		58.446.981	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	0	100	50.000.000	100	51.520.000	100	53.086.208	100	54.700.029	100	58.446.981	2.07.3.29.0.00.01.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					786.500.364		825.000.000		850.080.000		875.922.432		935.923.119	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	0	63,5	786.500.364	64	825.000.000	64,5	850.080.000	65	875.922.432	65,5	935.923.119	2.07.3.29.0.00.01.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					785.000.000		1.608.864.000		1.633.453.466		1.658.790.451		1.717.617.597	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	96,9	97	97,25	785.000.000	97,5	1.608.864.000	97,75	1.633.453.466	98	1.658.790.451	98,25	1.717.617.597	2.07.3.29.0.00.01.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.791.212.000		3.906.464.845		4.025.221.376		4.147.588.106		4.431.697.891	
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang)	47,5	47,55	47,6	3.791.212.000	47,65	3.906.464.845	47,7	4.025.221.376	47,75	4.147.588.106	47,8	4.431.697.891	2.07.3.29.0.00.01.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.106.091.888		5.361.317.081		5.524.301.121		5.692.239.874		5.982.158.306	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.289.172.435		3.389.163.277		3.492.193.841		3.598.356.533		3.744.843.956	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.289.172.435	100	3.389.163.277	100	3.492.193.841	100	3.598.356.533	100	3.744.843.956	2.08.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
														2.08.0.00.0.00.01.000 1 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					89.000.000		91.705.600		94.493.450		97.366.051		104.035.626	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	46,77	48,8	48,9	89.000.000	49	91.705.600	49,5	94.493.450	49,7	97.366.051	50	104.035.626	2.08.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
														2.08.0.00.0.00.01.000 1 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					218.200.000		224.833.280		231.668.212		238.710.925		255.062.624	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0,005	0,005	0,005	218.200.000	0,003	224.833.280	0,003	231.668.212	0,003	238.710.925	0,003	255.062.624	2.08.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					950.000.000		978.880.000		1.008.637.952		1.039.300.546		1.110.492.633	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	80	950.000.000	85	978.880.000	86	1.008.637.952	87	1.039.300.546	90	1.110.492.633	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					0		100.000.000		103.040.000		106.172.416		113.445.226	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	0	0	75	0	85	100.000.000	86	103.040.000	87	106.172.416	90	113.445.226	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					247.800.000		255.333.120		263.095.247		271.093.342		289.663.236	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	0	70,1	247.800.000	70,2	255.333.120	70,5	263.095.247	71	271.093.342	71,5	289.663.236	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					311.919.453		321.401.804		331.172.419		341.240.061		364.615.005	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	311.919.453	100	321.401.804	100	331.172.419	100	341.240.061	100	364.615.005	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.937.608.559		5.183.590.259		5.341.171.403		5.503.543.012		5.780.535.709	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.877.273.000		3.995.142.099		4.116.594.419		4.241.738.889		4.432.298.003	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.877.273.000	100	3.995.142.099	100	4.116.594.419	100	4.241.738.889	100	4.432.298.003	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					4.000.000		100.000.000		103.040.000		106.172.416		113.445.226	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (Rasio)	0,4	0,8	0,8	4.000.000	0,8	100.000.000	0,8	103.040.000	0,8	106.172.416	0,8	113.445.226	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase cadangan pangan (%)	100	50	50		50		50		50		50		2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	50	50	50		50		50		50		50		2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					896.335.559		923.584.160		951.661.118		980.591.616		1.047.762.142	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	83,92	84,15	84,85	896.335.559	85	923.584.160	85,75	951.661.118	86	980.591.616	86,75	1.047.762.142	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	4,15	3,65	3,15		2,65		2,15		1,85		1,15		2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	89,9	90	91		92		93		94		95		2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					60.000.000		61.824.000		63.703.450		65.640.034		70.136.377	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0,9	0,9	0,9	60.000.000	0,9	61.824.000	0,9	63.703.450	0,9	65.640.034	0,9	70.136.377	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					100.000.000		103.040.000		106.172.416		109.400.057		116.893.961	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	95	96	100.000.000	97	103.040.000	98	106.172.416	99	109.400.057	100	116.893.961	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAERAH
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	0	10	100.000.000	25	100.000.000	50	100.000.000	75	100.000.000	100	100.000.000	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya izin membuka tanah	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					10.697.324.839		11.228.433.967		11.569.778.360		11.921.499.621		12.638.122.344	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.100.975.676		4.225.645.337		4.354.104.955		4.486.469.745		4.693.792.923	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.100.975.676	100	4.225.645.337	100	4.354.104.955	100	4.486.469.745	100	4.693.792.923	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					54.564.400		56.223.158		57.932.342		59.693.485		63.782.489	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	54.564.400	100	56.223.158	100	57.932.342	100	59.693.485	100	63.782.489	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					138.220.400		142.422.300		146.751.938		151.213.197		161.571.301	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	67,72	67,97	68,22	138.220.400	68,47	142.422.300	68,72	146.751.938	68,97	151.213.197	70	161.571.301	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					71.595.470		73.771.972		76.014.640		78.325.485		83.690.781	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	100	100	100	71.595.470	100	73.771.972	100	76.014.640	100	78.325.485	100	83.690.781	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					48.000.000		49.459.200		50.962.760		52.512.028		56.109.101	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola (%)	100	100	100	48.000.000	100	49.459.200	100	50.962.760	100	52.512.028	100	56.109.101	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					0		50.000.000		51.520.000		53.086.208		56.722.613	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota (%)	100	100	100	0	100	50.000.000	100	51.520.000	100	53.086.208	100	56.722.613	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0		50.000.000		51.520.000		53.086.208		56.722.613	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	100	100	0	100	50.000.000	100	51.520.000	100	53.086.208	100	56.722.613	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	Persentase terlaksananya program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyrakat (%)	0	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000		30.912.000		31.851.725		32.820.017		35.068.188	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	30.000.000	100	30.912.000	100	31.851.725	100	32.820.017	100	35.068.188	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					0		50.000.000		51.520.000		53.086.208		56.722.613	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0	100	50.000.000	100	51.520.000	100	53.086.208	100	56.722.613	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.253.968.893		6.500.000.000		6.697.600.000		6.901.207.040		7.373.939.722	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kota (%)	75	75	76	6.253.968.893	77	6.500.000.000	78	6.697.600.000	79	6.901.207.040	80	7.373.939.722	2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	74	75	76		77		78		81		83		2.11.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.381.984.717		4.515.197.052		4.652.459.043		4.793.893.798		5.022.275.523	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.764.261.185		3.878.694.725		3.996.607.045		4.118.103.899		4.300.194.016	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.764.261.185	100	3.878.694.725	100	3.996.607.045	100	4.118.103.899	100	4.300.194.016	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					415.138.744		427.758.962		440.762.834		454.162.024		485.272.123	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	1,5	2	2,5	415.138.744	2,7	427.758.962	3	440.762.834	3,2	454.162.024	3,5	485.272.123	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	77,5	78	78,5		79		79,5		80		81		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					111.903.067		115.304.920		118.810.190		122.422.020		130.807.928	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	111.903.067	100	115.304.920	100	118.810.190	100	122.422.020	100	130.807.928	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					72.958.189		75.176.118		77.461.472		79.816.301		85.283.717	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	70,45	70,45	70,45	72.958.189	70,45	75.176.118	75	77.461.472	75	79.816.301	75	85.283.717	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					17.723.532		18.262.327		18.817.502		19.389.554		20.717.739	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1	1	1	17.723.532	1	18.262.327	1	18.817.502	1	19.389.554	1	20.717.739	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.090.914.002		7.306.477.788		7.528.594.712		7.757.463.992		8.188.850.275	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.311.519.002		3.412.189.180		3.515.919.731		3.622.803.691		3.770.965.743	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.311.519.002	100	3.412.189.180	100	3.515.919.731	100	3.622.803.691	100	3.770.965.743	2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					2.345.840.000		2.417.153.536		2.490.635.003		2.566.350.308		2.742.145.304	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	24.6-0	20.9-0	20.5-0	2.345.840.000	20.4-0	2.417.153.536	20.3-0	2.490.635.003	20.2-0	2.566.350.308	20.1-0	2.742.145.304	2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2	2,02	2,01		2,1		2,1		2,1		2,1		2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna Mandiri dan Berkembang (%)	6	7	8		9		10		11		12		2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					319.000.000		328.697.600		338.690.007		348.986.183		372.891.737	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	60	63	64,05	319.000.000	64,1	328.697.600	65	338.690.007	65	348.986.183	65,05	372.891.737	2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	22,78	16,83	16		15,5		15		14		14		2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	50,5	50,6	50,6		50,6		50,6		50,6		50,6		2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.114.555.000		1.148.437.472		1.183.349.971		1.219.323.810		1.302.847.491	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	56.03:57.99	58:60.99	61:63.99	1.114.555.000	64:66.99	1.148.437.472	67:69.99	1.183.349.971	70:74.99	1.219.323.810	75:75	1.302.847.491	2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	80	81	83		85		87		89		100		2.14.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					11.764.177.529		12.121.808.526		12.490.311.505		12.870.016.974		13.651.613.137	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.794.572.529		5.970.727.534		6.152.237.651		6.339.265.675		6.673.505.374	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	5.794.572.529	100	5.970.727.534	100	6.152.237.651	100	6.339.265.675	100	6.673.505.374	2.15.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.969.605.000		6.151.080.992		6.338.073.854		6.530.751.299		6.978.107.763	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	50	75	75	5.969.605.000	75	6.151.080.992	75	6.338.073.854	75	6.530.751.299	75	6.978.107.763	2.15.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	75	85	87		90		93		97		100		2.15.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.205.873.891		8.646.698.857		8.909.558.503		9.080.409.081		9.809.267.103	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.559.373.891		4.697.978.857		4.840.797.415		4.887.957.656		5.329.632.755	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.559.373.891	100	4.697.978.857	100	4.840.797.415	100	4.887.957.656	100	5.329.632.755	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.425.000.000		2.498.720.000		2.574.681.088		2.652.951.393		2.834.678.564	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	85	85	85	2.425.000.000	85	2.498.720.000	85	2.574.681.088	90	2.652.951.393	100	2.834.678.564	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.221.500.000		1.450.000.000		1.494.080.000		1.539.500.032		1.644.955.784	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	12,5	29	43	1.221.500.000	57	1.450.000.000	71	1.494.080.000	86	1.539.500.032	100	1.644.955.784	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,03	3,1	3,2		3,3		3,35		3,4		3,5		2.16.2.20.2.21.01.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.342.010.558		4.624.007.679		4.764.577.513		4.909.420.669		5.245.715.984	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.983.010.558		3.073.694.079		3.167.134.379		3.263.415.264		3.486.959.210	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	2.983.010.558	100	3.073.694.079	100	3.167.134.379	100	3.263.415.264	100	3.486.959.210	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0		100.000.000		103.040.000		106.172.416		113.445.226	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	20,77	25	26	0	27	100.000.000	28	103.040.000	29	106.172.416	30	113.445.226	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					35.000.000		36.064.000		37.160.346		38.290.020		40.912.886	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	6	8	10	35.000.000	12	36.064.000	14	37.160.346	16	38.290.020	18	40.912.886	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					0		50.000.000		51.520.000		53.086.208		56.722.613	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	24	24	25	0	26	50.000.000	27	51.520.000	28	53.086.208	29	56.722.613	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					250.000.000		257.600.000		265.431.040		273.500.144		292.234.903	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	9,31	10	11	250.000.000	12	257.600.000	13	265.431.040	14	273.500.144	15	292.234.903	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					75.000.000		77.280.000		79.629.312		82.050.043		87.670.471	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	75.000.000	100	77.280.000	100	79.629.312	100	82.050.043	100	87.670.471	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					485.000.000		499.744.000		514.936.218		530.590.279		566.935.713	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	20,77	21	22	485.000.000	23	499.744.000	24	514.936.218	25	530.590.279	26	566.935.713	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	20,77	21	22		23		24		25		26		2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					514.000.000		529.625.600		545.726.218		562.316.295		600.834.962	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	30	31	32	514.000.000	33	529.625.600	34	545.726.218	35	562.316.295	36	600.834.962	2.17.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.522.797.385		4.972.020.917		5.174.690.352		5.232.000.940		5.697.243.004	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.047.797.385		4.450.000.000		4.636.800.000		4.677.758.720		5.105.035.192	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	98,65	100	100	9.047.797.385	100	4.450.000.000	100	4.636.800.000	100	4.677.758.720	100	5.105.035.192	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					82.520.300		85.028.917		87.613.796		90.277.256		96.461.248	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	80	80	82.520.300	80	85.028.917	80	87.613.796	90	90.277.256	90	96.461.248	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					162.479.700		200.000.000		206.080.000		212.344.832		226.890.453	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	10	10	10	162.479.700	10	200.000.000	10	206.080.000	10	212.344.832	10	226.890.453	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					115.678.000		119.194.611		122.818.127		126.551.798		135.220.597	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	115.678.000	100	119.194.611	100	122.818.127	100	126.551.798	100	135.220.597	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					90.000.000		92.736.000		95.555.174		98.460.052		105.204.565	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	90.000.000	100	92.736.000	100	95.555.174	100	98.460.052	100	105.204.565	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					24.322.000		25.061.389		25.823.255		26.608.282		28.430.949	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	24.322.000	100	25.061.389	100	25.823.255	100	26.608.282	100	28.430.949	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.254.944.587		5.533.030.902		5.752.755.041		5.827.638.795		6.333.682.053	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.329.944.587		3.381.174.902		3.535.482.619		3.542.961.291		3.892.504.140	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.329.944.587	100	3.381.174.902	100	3.535.482.619	100	3.542.961.291	100	3.892.504.140	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					240.000.000		247.296.000		254.813.798		262.560.138		280.545.507	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	16,64	80	84	240.000.000	92	247.296.000	94	254.813.798	96	262.560.138	100	280.545.507	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	78,5	80	82		84		85		87		90		2.19.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	16,64	17	18		19		21		23		25		2.19.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.535.000.000		1.750.000.000		1.803.200.000		1.858.017.280		1.985.291.464	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	50,74	55,21	67,5	1.535.000.000	70,3	1.750.000.000	73,5	1.803.200.000	74,5	1.858.017.280	78	1.985.291.464	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.000.000		154.560.000		159.258.624		164.100.086		175.340.942	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang aktif (%)	80	80	84	150.000.000	92	154.560.000	94	159.258.624	98	164.100.086	100	175.340.942	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	81,92	82,75	83,56		86,7		88,1		88,98		90,05		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					110.000.000		113.344.000		116.789.658		120.340.063		128.583.358	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					110.000.000		113.344.000		116.789.658		120.340.063		128.583.358	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	110.000.000	100	113.344.000	100	116.789.658	100	120.340.063	100	128.583.358	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					130.000.000		133.952.000		138.024.141		142.220.075		151.962.150	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					130.000.000		133.952.000		138.024.141		142.220.075		151.962.150	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	40	51	130.000.000	63	133.952.000	75	138.024.141	88	142.220.075	100	151.962.150	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					256.652.000		325.000.000		334.880.000		345.060.352		368.696.985	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					107.100.000		125.000.000		128.800.000		132.715.520		141.806.533	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	92	100	100	107.100.000	100	125.000.000	100	128.800.000	100	132.715.520	100	141.806.533	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					29.500.000		50.000.000		51.520.000		53.086.208		56.722.613	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	95	100	100	29.500.000	100	50.000.000	100	51.520.000	100	53.086.208	100	56.722.613	1.01.2.22.0.00.02.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					32.660.000		50.000.000		51.520.000		53.086.208		56.722.613	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	100	100	100	32.660.000	100	50.000.000	100	51.520.000	100	53.086.208	100	56.722.613	1.01.2.22.0.00.02.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					87.392.000		100.000.000		103.040.000		106.172.416		113.445.226	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100	87.392.000	100	100.000.000	100	103.040.000	100	106.172.416	100	113.445.226	1.01.2.22.0.00.02.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.081.429.755		4.155.505.220		4.333.352.578		4.365.086.496		4.770.944.921	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.231.429.755		3.279.665.220		3.430.887.042		3.435.186.008		3.777.346.250	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.231.429.755	100	3.279.665.220	100	3.430.887.042	100	3.435.186.008	100	3.777.346.250	2.24.2.23.0.00.01.000 0 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					750.000.000		772.800.000		796.293.120		820.500.431		876.704.710	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	79,14	79,34	79,54	750.000.000	79,74	772.800.000	79,94	796.293.120	80,14	820.500.431	80,34	876.704.710	2.24.2.23.0.00.01.000 0 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					100.000.000		103.040.000		106.172.416		109.400.057		116.893.961	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	1	1	1	100.000.000	1	103.040.000	1	106.172.416	1	109.400.057	1	116.893.961	2.24.2.23.0.00.01.000 0 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					140.000.000		169.256.000		174.401.382		179.703.184		192.012.853	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					115.000.000		118.496.000		122.098.278		125.810.066		134.428.056	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	69,35	70,29	71,23	115.000.000	72,17	118.496.000	73,11	122.098.278	74,05	125.810.066	75	134.428.056	2.24.2.23.0.00.01.000 0 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					25.000.000		50.760.000		52.303.104		53.893.118		29.223.490	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	66,67	66,67	66,67	25.000.000	66,67	50.760.000	66,67	52.303.104	67	53.893.118	67,5	29.223.490	2.24.2.23.0.00.01.000 0 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0		0		0		0		28.361.307	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28.361.307	2.24.2.23.0.00.01.000 0 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					399.500.000		411.644.800		424.158.802		437.053.230		466.991.376	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					349.300.000		359.918.720		370.860.249		382.134.401		408.310.607	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	376,54	432,21	475,43	349.300.000	522,97	359.918.720	575,27	370.860.249	632,8	382.134.401	696,08	408.310.607	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					50.200.000		51.726.080		53.298.553		54.918.829		58.680.769	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	35,4	36	36,5	50.200.000	37	51.726.080	37,5	53.298.553	38	54.918.829	38,5	58.680.769	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					8.347.148.381		9.057.023.389		9.332.356.900		9.616.060.549		10.274.760.697	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.468.151.581		4.603.983.389		4.743.944.484		4.888.160.396		5.222.999.384	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.468.151.581	100	4.603.983.389	100	4.743.944.484	100	4.888.160.396	100	5.222.999.384	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.290.000.000		1.500.000.000		1.545.600.000		1.592.586.240		1.701.678.397	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD (%)	12,7	13	14,99	1.290.000.000	16,22	1.500.000.000	17,99	1.545.600.000	19,41	1.592.586.240	20,57	1.701.678.397	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,05	2,1	2,16		2,21		2,27		2,32		2,38		3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	0,38	0,4	0,59		2,36		2,5		4,68		5,37		3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0,78	0,86	3,57		3,79		3,82		5,6		6,06		3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
	Tingkat hunian akomodasi (%)	20	20	20		21		21		22		22		3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.700.000.000		2.000.000.000		2.060.800.000		2.123.448.320		2.268.904.530	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	90	90	92	1.700.000.000	94	2.000.000.000	96	2.060.800.000	98	2.123.448.320	99	2.268.904.530	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					100.000.000		103.040.000		106.172.416		109.400.057		116.893.961	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	10	10	20	100.000.000	30	103.040.000	40	106.172.416	50	109.400.057	60	116.893.961	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					788.996.800		850.000.000		875.840.000		902.465.536		964.284.425	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	10	10	20	788.996.800	30	850.000.000	40	875.840.000	50	902.465.536	60	964.284.425	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					17.034.869.024		17.692.002.332		18.332.879.202		18.690.198.731		20.184.177.344	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.883.824.129		12.145.092.383		12.617.343.191		12.800.910.424		13.891.472.788	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	94	95	94	11.883.824.129	94	12.145.092.383	95	12.617.343.191	96	12.800.910.424	96	13.891.472.788	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.485.177.320		2.800.000.000		2.885.120.000		2.972.827.648		3.176.466.342	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	90	91	92	2.485.177.320	92	2.800.000.000	93	2.885.120.000	93	2.972.827.648	94	3.176.466.342	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	95	95	96		96		97		98		98		3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	90	92	92		93		95		96		97		3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	83,33	100	91,67		93,33		95		96,67		100		3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.414.667.575		1.457.673.469		1.501.986.743		1.547.647.140		1.653.660.969	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	400	400	400	1.414.667.575	400	1.457.673.469	400	1.501.986.743	400	1.547.647.140	400	1.653.660.969	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					150.600.000		155.178.240		159.895.658		164.756.487		176.042.306	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	93	93	93	150.600.000	94	155.178.240	95	159.895.658	96	164.756.487	96	176.042.306	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	93	93	93		94		95		96		97		3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	8	8	8		7		6		5		4		3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					650.000.000		669.760.000		690.120.704		711.100.373		759.810.749	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	94	95	95	650.000.000	95	669.760.000	96	690.120.704	96	711.100.373	96	759.810.749	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	94	95	95		95		96		96		96		3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					450.600.000		464.298.240		478.412.906		492.956.659		526.724.190	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	94	94	94	450.600.000	94	464.298.240	95	478.412.906	96	492.956.659	96	526.724.190	3.27.3.25.0.00.01.000 0 - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					17.500.000		16.430.853		16.606.663		17.021.830		17.142.685	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					17.500.000		16.430.853		16.606.663		17.021.830		17.142.685	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota (%)	100	100	100	17.500.000	100	16.430.853	100	16.606.663	100	17.021.830	100	17.142.685	2.07.3.29.0.00.01.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.562.778.320		4.651.486.781		4.844.411.979		4.991.682.103		5.333.612.328	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.054.130.820		4.127.376.397		4.304.368.639		4.435.221.446		4.739.034.115	
Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.054.130.820	100	4.127.376.397	100	4.304.368.639	100	4.435.221.446	100	4.739.034.115	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					10.000.000		10.304.000		10.617.242		10.940.006		11.689.396	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	5	5	5	10.000.000	5	10.304.000	5	10.617.242	5	10.940.006	5	11.689.396	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					50.000.000		51.520.000		53.086.208		54.700.029		58.446.981	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	70	70	50.000.000	70	51.520.000	70	53.086.208	70	54.700.029	70	58.446.981	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					140.000.000		144.256.000		148.641.382		153.160.080		163.651.546	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	5,34	7,29	7	140.000.000	6,95	144.256.000	6,75	148.641.382	6,7	153.160.080	6,5	163.651.546	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					75.000.000		77.280.000		79.629.312		82.050.043		87.670.471	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	1.000.000.00 0	1.100.000.00 0	1.200.000.00 0	75.000.000	1.300.000.00 0	77.280.000	1.400.000.00 0	79.629.312	1.500.000.00 0	82.050.043	1.600.000.00 0	87.670.471	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					29.557.300		30.455.842		31.381.700		32.335.703		34.550.699	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	85,73	85,23	86,73	29.557.300	87,23	30.455.842	87,73	31.381.700	88,23	32.335.703	88,73	34.550.699	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					204.090.200		210.294.542		216.687.496		223.274.796		238.569.120	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	50	50	50	204.090.200	50	210.294.542	50	216.687.496	50	223.274.796	50	238.569.120	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					527.335.250		543.366.242		559.884.576		576.905.067		616.423.064	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					435.000.000		448.224.000		461.850.010		475.890.250		508.488.732	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3	3	4	435.000.000	4	448.224.000	5	461.850.010	6	475.890.250	7	508.488.732	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					47.335.250		48.774.242		50.256.979		51.784.791		55.332.049	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	5	5	5	47.335.250	5	48.774.242	5	50.256.979	5	51.784.791	5	55.332.049	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					45.000.000		46.368.000		47.777.587		49.230.026		52.602.283	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	100	100	45.000.000	100	46.368.000	100	47.777.587	100	49.230.026	100	52.602.283	3.30.3.31.0.00.01.000 0 - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					54.614.899.550		56.175.192.496		57.764.748.250		59.623.836.595		63.708.069.403	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.633.583.100		45.875.004.397		47.855.402.701		49.655.544.100		53.266.416.048	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	43.633.583.100	100	45.875.004.397	100	47.855.402.701	100	49.655.544.100	100	53.266.416.048	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
	indeks kematangan organisasi (indikator daerah) (Angka)	33	33,5	34		34,5		35		35,5		36		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
	Presentase administrasi perencanaan (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
														4.01.0.00.0.00.01.000 5 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.155.000.000		8.418.351.629		7.970.301.250		7.970.301.250		8.306.799.709	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	1.475.000.000	100	1.690.000.000	100	1.632.000.000	100	1.632.000.000	100	1.687.000.000	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
														4.01.0.00.0.00.01.000 2 - BAGIAN PEMERINTAHAN
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	90	90	90	7.680.000.000	90	6.728.351.629	90	6.338.301.250	90	6.338.301.250	90	6.619.799.709	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
														4.01.0.00.0.00.01.000 2 - BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.826.316.450		1.881.836.470		1.939.044.299		1.997.991.245		2.134.853.646	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.826.316.450	100	1.881.836.470	100	1.939.044.299	100	1.997.991.245	100	2.134.853.646	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
														4.01.0.00.0.00.01.000 4 - BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					34.131.548.045		35.488.515.314		36.570.406.179		37.785.186.527		40.373.471.804	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.630.934.893		22.188.515.314		22.866.086.179		23.664.255.199		25.285.256.680	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	21.630.934.893	100	22.188.515.314	100	22.866.086.179	100	23.664.255.199	100	25.285.256.680	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					12.500.613.152		13.300.000.000		13.704.320.000		14.120.931.328		15.088.215.124	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangan-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	2.376.376.600	100	2.600.000.000	100	2.850.000.000	100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	89,93	80	80		80		80		80		80		4.02.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas pengaanggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	70	70	71	10.124.236.552	72	10.700.000.000	73	10.854.320.000	74	11.120.931.328	75	11.588.215.124	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.179.331.781		8.427.983.468		8.745.650.815		9.011.518.605		9.628.807.626	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.989.499.661		7.201.980.453		7.420.920.655		7.646.516.648		8.170.303.035	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	93,73	100	100	6.989.499.661	100	7.201.980.453	100	7.420.920.655	100	7.646.516.648	100	8.170.303.035	5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					883.980.400		910.853.404		1.000.000.000		1.030.400.000		1.100.982.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	89,209	100	100	883.980.400	100	910.853.404	100	1.000.000.000	100	1.030.400.000	100	1.100.982.400	5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					305.851.720		315.149.611		324.730.160		334.601.957		357.522.191	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	155.971.720	100	105.049.870	100	108.243.386	100	111.533.985	100	119.174.063	5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	87.880.000	100	105.049.870	100	108.243.386	100	111.533.985	100	119.174.063	5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	62.000.000	100	105.049.871	100	108.243.388	100	111.533.987	100	119.174.065	5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					40.996.731.451		42.215.109.420		43.488.808.747		44.582.620.533		47.850.230.040	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.255.293.936		18.810.254.872		19.382.086.620		19.771.302.053		21.339.336.244	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	18.255.293.936	100	18.810.254.872	100	19.382.086.620	100	19.771.302.053	100	21.339.336.244	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					18.807.437.515		19.379.183.615		19.968.310.798		20.575.347.445		21.984.758.746	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	0	35	35	2.197.000.000	30	6.459.727.871	30	6.656.103.599	30	6.858.449.148	30	7.328.252.915	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	19,13	20	20		20		20		20		20		5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95,9	95	95	15.635.437.515	95	6.459.727.871	95	6.656.103.599	95	6.858.449.148	95	7.328.252.915	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	54,68	55	60		65		70		75		80		5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	975.000.000	100	6.459.727.873	100	6.656.103.600	100	6.858.449.149	100	7.328.252.916	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.014.000.000		1.044.825.600		1.076.588.298		1.109.316.583		1.185.304.768	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10,58	10	10	1.014.000.000	10	1.044.825.600	10	1.076.588.298	10	1.109.316.583	10	1.185.304.768	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.920.000.000		2.980.845.333		3.061.823.031		3.126.654.452		3.340.830.282	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	8,09	8	8	650.000.000	8	1.002.922.667	8	1.033.411.516	8	1.064.827.227	8	1.137.767.892	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	1.255.000.000	100	975.000.000	100	995.000.000	100	997.000.000	100	1.065.294.500	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	1.015.000.000	100	1.002.922.666	100	1.033.411.515	100	1.064.827.225	100	1.137.767.890	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.372.770.390		6.587.113.526		6.787.361.778		6.993.697.574		7.472.765.859	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.829.417.377		6.006.631.665		6.189.233.268		6.377.385.959		6.814.236.897	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	83	100	100	5.829.417.377	100	6.006.631.665	100	6.189.233.268	100	6.377.385.959	100	6.814.236.897	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					543.353.013		580.481.861		598.128.510		616.311.615		658.528.962	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	70	70	70	120.500.000	75	140.000.000	80	144.256.000	85	148.641.382	95	158.823.317	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	70	70	70	193.333.013	75	140.000.000	80	144.256.000	85	148.641.382	95	158.823.317	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	65	68	70	85.000.000	72	160.481.861	82	165.360.510	90	170.387.469	95	182.059.011	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	70	70	72	144.520.000	75	140.000.000	80	144.256.000	85	148.641.382	95	158.823.317	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.484.625.717		1.540.000.000		1.586.816.000		1.635.055.208		1.747.056.488	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.484.625.717		1.540.000.000		1.586.816.000		1.635.055.208		1.747.056.488	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	70	70	72	710.007.591	75	385.000.000	80	396.704.000	85	408.763.802	99	436.764.122	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	70	70	75	10.000.000	75	385.000.000	80	396.704.000	85	408.763.802	95	436.764.122	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	70	70	70	368.358.637	75	385.000.000	80	396.704.000	85	408.763.802	95	436.764.122	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	70	70	70	396.259.489	75	385.000.000	80	396.704.000	85	408.763.802	95	436.764.122	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					210.000.000		215.624.000		306.172.416		315.480.057		337.090.441	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					100.000.000		103.040.000		106.172.416		109.400.057		116.893.961	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	41.216.000	100	42.468.966	100	43.760.023	100	46.757.585	5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	100	100	0	100	30.912.000	100	31.851.725	100	32.820.017	100	35.068.188	5.01.5.05.0.00.02.000 0 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	100	100	0	100	30.912.000	100	31.851.725	100	32.820.017	100	35.068.188	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					110.000.000		112.584.000		200.000.000		206.080.000		220.196.480	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	100	100	45.000.000	100	36.064.000	100	50.000.000	100	51.520.000	100	55.049.120	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	20	20	0	20	25.760.000	20	50.000.000	20	51.520.000	20	55.049.120	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	0	100	0	100	25.760.000	100	50.000.000	100	51.520.000	100	55.049.120	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100	65.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	51.520.000	100	55.049.120	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					10.399.006.554		11.176.547.587		11.516.314.633		11.866.410.598		12.679.259.724	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.867.767.456		7.076.547.587		7.291.674.633		7.513.341.542		8.028.005.438	
Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	6.867.767.456	100	7.076.547.587	100	7.291.674.633	100	7.513.341.542	100	8.028.005.438	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN					2.052.525.098		2.500.000.000		2.576.000.000		2.654.310.400		2.836.130.662	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	71,48	72	73	2.052.525.098	74	2.500.000.000	75	2.576.000.000	76	2.654.310.400	77	2.836.130.662	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.478.714.000		1.600.000.000		1.648.640.000		1.698.758.656		1.815.123.624	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,011	3,061	3,111	1.478.714.000	3,161	1.600.000.000	3,211	1.648.640.000	3,261	1.698.758.656	3,311	1.815.123.624	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT DAERAH
	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	3,27	3,32	3,37		3,42		3,47		3,52		3,57		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (%)	77,31	78	79		80		81		82		83		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - INSPEKTORAT DAERAH
7.01 - KECAMATAN					58.846.449.584		60.194.715.064		61.690.977.816		64.081.583.542		68.471.172.016	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.401.128.761		36.059.933.121		36.822.498.503		38.457.102.456		41.091.413.974	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	6.215.938.435	100	6.304.902.963	100	6.499.612.014	100	6.800.240.219	100	7.266.056.674	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN TOMOHON BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Tomohon Barat														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	9.134.193.972	100	9.271.206.882	100	9.310.274.985	100	9.696.347.344	100	10.360.547.137	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - KECAMATAN TOMOHON SELATAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Tengah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	7.769.136.128	100	7.905.317.866	100	8.148.679.529	100	8.499.439.387	100	9.081.650.985	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TENGAH
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Timur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	4.816.544.940	100	4.962.967.906	100	5.013.842.131	100	5.269.302.931	100	5.630.250.182	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TIMUR
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	7.465.315.286	100	7.615.537.504	100	7.850.089.844	100	8.191.772.575	100	8.752.908.996	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.600.863.428		1.626.253.043		1.675.691.135		1.726.632.146		1.844.906.449	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai)	91,17	81,25	91,17	301.250.000	91,18	310.408.000	91,19	319.844.403	91,2	329.567.673	91,21	352.143.059	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN TOMOHON BARAT
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai)	81,25	85	85,1	372.424.700	85,2	383.746.411	85,3	395.412.302	85,4	407.432.836	85,5	435.341.985	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - KECAMATAN TOMOHON SELATAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (%)	90,44	85	85	346.900.000	85	357.445.760	85	368.312.111	85	379.508.799	85	405.505.152	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TENGAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai)	90,44	85	85		85		85		85		85		7.01.0.00.0.00.02.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai)	85	85	85	291.442.078	85	300.301.917	85	309.431.095	85	318.837.801	85	340.678.190	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TIMUR
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai)	90,47	81,25	90,48	288.846.650	90,49	274.350.955	90,5	282.691.224	90,51	291.285.037	90,52	311.238.063	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - KECAMATAN TOMOHON UTARA
														7.01.0.00.0.00.01.000 1 - KELURAHAN KINILOW
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					21.544.381.895		22.199.331.105		22.874.190.770		23.569.566.169		25.184.081.453	
Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Barat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	3.972.200.000	100	4.092.954.880	100	4.217.380.708	100	4.345.589.082	100	4.643.261.934	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN TOMOHON BARAT
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	5.677.981.895	100	5.850.592.545	100	6.028.450.558	100	6.211.715.455	100	6.637.217.964	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - KECAMATAN TOMOHON SELATAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	4.056.000.000	100	4.179.302.400	100	4.306.353.193	100	4.437.266.330	100	4.741.219.074	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TENGAH
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	2.592.600.000	100	2.671.415.040	100	2.752.626.057	100	2.836.305.889	100	3.030.592.843	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TIMUR
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	5.245.600.000	100	5.405.066.240	100	5.569.380.254	100	5.738.689.413	100	6.131.789.638	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					227.647.200		234.567.675		241.698.532		249.046.169		266.105.831	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Barat	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	40.000.000	100	41.216.000	100	42.468.966	100	43.760.023	100	46.757.585	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN TOMOHON BARAT
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.247.200	100	51.774.715	100	53.348.666	100	54.970.466	100	58.735.943	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - KECAMATAN TOMOHON SELATAN
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Tengah	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	55.000.000	100	56.672.000	100	58.394.829	100	60.170.032	100	64.291.679	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TENGAH
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	34.400.000	100	35.445.760	100	36.523.311	100	37.633.620	100	40.211.523	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TIMUR
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Utara	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	48.000.000	100	49.459.200	100	50.962.760	100	52.512.028	100	56.109.101	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - KECAMATAN TOMOHON UTARA
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					72.428.300		74.630.120		76.898.876		79.236.602		84.664.309	
Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Barat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	100	100	100	12.000.000	100	12.364.800	100	12.740.690	100	13.128.007	100	14.027.275	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN TOMOHON BARAT
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Selatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	100	100	100	10.078.300	100	10.384.680	100	10.700.375	100	11.025.666	100	11.780.924	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - KECAMATAN TOMOHON SELATAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Tengah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.608.000	100	21.234.483	100	21.880.011	100	23.378.792	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Timur	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	100	100	100	11.600.000	100	11.952.640	100	12.316.000	100	12.690.407	100	13.559.700	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - KECAMATAN TOMOHON TIMUR
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Utara	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	100	100	100	18.750.000	100	19.320.000	100	19.907.328	100	20.512.511	100	21.917.618	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - KECAMATAN TOMOHON UTARA
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.064.637.526		8.309.802.507		8.462.420.503		8.822.718.087		9.327.074.274	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.678.303.673		3.790.124.105		3.805.343.877		4.024.066.331		4.299.714.875	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	3.678.303.673	100	3.790.124.105	100	3.805.343.877	100	4.024.066.331	100	4.299.714.875	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.170.800.000		1.206.392.320		1.243.066.647		1.280.855.873		1.368.594.500	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.170.800.000	100	1.206.392.320	100	1.243.066.647	100	1.280.855.873	100	1.368.594.500	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					681.823.853		702.551.298		723.908.858		745.915.687		797.010.911	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	681.823.853	100	702.551.298	100	723.908.858	100	745.915.687	100	797.010.911	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					250.000.000		257.600.000		265.431.040		273.500.144		292.234.903	
Menimgkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	250.000.000	100	257.600.000	100	265.431.040	100	273.500.144	100	292.234.903	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					300.000.000		309.120.000		318.517.248		328.200.172		350.681.884	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi ()	100	100	100	300.000.000	100	309.120.000	100	318.517.248	100	328.200.172	100	350.681.884	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.983.710.000		2.044.014.784		2.106.152.833		2.170.179.880		2.218.837.201	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.983.710.000	100	2.044.014.784	100	2.106.152.833	100	2.170.179.880	100	2.218.837.201	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					731.167.196.906		702.003.651.000		722.582.560.600		745.221.557.700		796.247.768.000	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Kota Tomohon menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Pendapatan Per Kapita. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kota Tomohon, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Proyeksi indikator kinerja makro mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Kota Tomohon Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,74	5,00-5,50	5,00 - 6,20	5,80 - 6,25	6,30 - 6,55	6,40 - 6,70	6,70 – 7,00
2	PDRB per Kapita	Rp. Juta	56.563	58,402	60,179	62,956	65,733	67,51	69,287
3	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,38	5,00 – 4,75	5,50 – 5,00	5,30 - 4,80	5,00 - 4,60	4,90 - 3,80	4,80 - 3,50
4	Rasio gini	Indeks	0,340	0,340-0,330	0,330 - 0,320	0,320 - 0,315	0,315 - 0,310	0,310 -0,309	0,310 -0,300
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,06	80 - 80,5	80 - 80,7	80,75 - 80,88	80,90 - 81,32	81,35 -81,76	81,78 -82,2
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	7,79	7,40 – 7,00	7,31 - 6,55	7,30 - 6,56	7,20 - 5,81	6,80 - 5,60	6,50 - 4,60
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,72	67,97	68,22	68,47	68,72	68,97	70
8	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persentase	4,594	4,601	4,604	4,607	4,610	4,613	4,616
9	Penurunan intensitas emisi GRK	Persentase	10	24.69	29	34	39	44	48.5

4.2.1.Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Tomohon tahun 2025 - 2029, dicantumkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76.47	77	77,5	78	78,5	79	80
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,92	84,15	84,85	85	85,75	86	86,75
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,72	67,97	68,22	68,47	68,72	68,97	70
4	Indeks Infrastruktur	Indeks	76,04	78	80	81,5	82	83,5	85
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persentase	2,05	2,1	2,16	2,21	2,27	2,32	2,38
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,06	80 - 80,5	80 - 80,7	80,75 - 80,88	80,90 - 81,32	81,35 - 81,76	81,78 - 82,2
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,74	5,00-5,50	5,00 - 6,20	5,80 - 6,25	6,30 - 6,55	6,40 - 6,70	6,70 – 7,00
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.67	3.7	3.72	3.75	3.78	3.8	3.82
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,62	71	71,5	72	73	74	75
10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4.2.2.Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah menggambarkan capaian kinerja penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang terdiri dari indicator pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, juga indikator kinerja kunci (IKK). Target indikator kinerja daerah (IKD) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Daerah Kota Tomohon Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83.92	84.15	84.85	85	85.75	86	86.75	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	4.15	3.65	3.15	2.65	2.15	1.85	1.15	
3	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1742	1742.5	1743	1743.5	1744	1744.5	1745	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	50.58	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	67.72	67.97	68.22	68.47	68.72	68.97	70	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0.4	2	4	6	8	10	12	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	72.04	75	76	77	78	79	80	
8	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	71.79	75	76	77	78	79	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
9	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	10	24.69	29	34	39	44	48.5	
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	114.17	113	112	111	110	109	108	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0	0.35	0.45	0.55	0.65	0.7	0.75	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.88	0.89	0.90	0.91	0.91	0.92	0.93	
13	Rasio Penduduk	%	102.4	102.2	102.2	102.2	102.1	102.1	102.1	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km 2	615	620	625	629	631	635	638	
15	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	50.58	100	100	100	100	100	100	
16	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	74.87	75	76	77	78	79	80	
17	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89.9	90	91	92	93	94	95	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.74	5,00 – 5,50	5,00 – 6,20	5,80 - 6.25	6,30 - 6.55	6,40 – 6,70	6,70 – 7,00	
19	Tingkat Kemiskinan	(%)	5.38	5,00 – 4,75	5,50 – 5,00	5,30 – 4,80	5,00 – 4,60	4,90 – 3,80	4,80 – 3,50	
20	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	56.563	58.402	60.179	62.956	65.733	67.51	69.287	
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.79	7,40 – 7,00	7,31 – 6,55	7,30 – 6,56	7,20 – 5,81	6,80 – 5,60	6,50 – 4,60	
22	Rasio Gini	Indeks	0.340	0.330	0.320	0.315	0.310	0.309	0.300	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
23	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80.06	80.5	80.7	80.88	81.32	81.76	82.2	
24	Umur Harapan Hidup	Tahun	75.57	75.75	75.93	76.11	76.29	76.47	76.65	
25	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.3	10.2	
26	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.38	14.44	14.49	14.55	14.61	14.66	14.72	
27	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.03	11.13	11.22	11.32	11.42	11.51	11.61	
28	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	61.18	63.68-	66.18-	68.68-	71.18-	73.68-	76.18-	
29	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73.84	74.94	76.04	77.14	78.24	79.34	80.44	
30	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	51.68	54.58	57.48	60.38	63.28	66.18	69.08	
31	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63.77	65.27	66.77	68.27	69.77	71.27	72.77	
32	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	57.91	60.5	61.5	63	65	67	68	
33	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	47.5	47.55	47.6	47.65	47.7	47.75	47.8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
34	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	76.47	77	77.5	78	78.5	79	80	
35	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	92	100	100	100	100	100	100	
36	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70.49	70.50	70.75	71	71.25	71.5	72	
37	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	69.51	70	70.3	70.50	70.8	71	71.30	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	56.03:57.99	58:60.99	61:63.99	64:66.99	67:69.99	70:74.99	75:75	
38	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.155	0.154	0.153	0.150	0.149	0.147	0.145	
39	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	99.56	99.6	99.63	99.65	99.68	99.73	99.75	
40	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	72	75	77	79	81	83	85	
41	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	12.7	12.5	12.3	12.0	11.7	11.5	11.0	
42	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	150	150	145	140	135	133	130	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
43	Angka Ketergantungan	%	47.33	47.55	47.65	47.73	47.87	47.98	48.12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
44	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6.51	6.52	6.53	6.54	6.56	6.6	6.62	
45	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.05	2.08	2.15	2.3	2.5	2.8	3	
46	Rasio Kewirausahaan	Persentase	20.77	21	22	23	24	25	26	
47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63.64	63.65	63.66	63.67	63.68	63.7	63.75	
48	Indeks Inovasi Daerah	Angka	37.22	38	39	41	43	44	45	
49	Indeks Infrastruktur	Angka	76.04	78	80	81.5	82	83.5	85	
50	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		95.56	96	96.2	96.45	96.5	97	97.3	
51	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0.55	0.56	0.57	0.581	0.62	0.65	0.75	
52	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.55	3.61	3.65	3.68	3.71	3.75	3.76	
53	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	0.78	0.86	3.57	3.79	3.82	5.6	6.06	
54	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1.5	1.53	1.55	1.6	1.7	1.8	2	
55	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.05	2.1	2.16	2.21	2.27	2.32	2.38	
56	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	4.594	4.601	4.604	4.607	4.610	4.613	4.616	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
57	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	67.04	67.34	67.54	68	68.22	69	70	
58	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.03	3.1	3.2	3.3	3.35	3.4	3.5	
59	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	
60	Persentase Capaian Aksi HAM	%	75.5	76.2	77	77.4	78	79	80	
61	Indeks Rasa Aman	Angka	75	76	77	78	79	80	81	
62	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	75	76	77	78	79	80	81	
63	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.67	3.7	3.72	3.75	3.78	3.80	3.82	
64	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70.62	71	71.5	72	73	74	75	
65	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	100	100	100	100	100	100	
66	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	77.31	78	79	80	81	82	83	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
67	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	86.13	100	100	100	100	100	100	
68	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun	%	91.5	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar									
69	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	84.96	100	100	100	100	100	100	
70	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	61.29	100	100	100	100	100	100	
AB	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
71	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	4.7	4.8	4.9	5	5.1	5.2	5.3	
72	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
73	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98	100	100	100	100	100	100	
74	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96.18	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
75	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
76	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
77	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
78	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	82	100	100	100	100	100	100	
79	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	97.68	100	100	100	100	100	100	
80	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80.9	100	100	100	100	100	100	
81	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88.6	100	100	100	100	100	100	
82	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	%	102.1	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar									
83	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	148.35	100	100	100	100	100	100	
84	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
AC	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
85	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	
86	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
87	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	63.64	65.5	67	69.5	71.5	75.5	80	
88	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	70	73	76	79	82	85	88	
89	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	94.12	100	100	100	100	100	100	
90	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	12.2	13	14	15	16	17	18	
91	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	72.89	77.4	81.91	86.42	90.93	95.44	97	
92	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	28.26	30	32.73	35.45	38.18	40.91	43.64	
93	Rasio proyek yang menjadi kewenangan	%	83.33	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi									
AD	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
94	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0	100	100	100	100	100	100	
95	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	100	100	100	100	
96	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	4.75	9.46	14.19	21.29	21.29	21.29	
97	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4.4	1.9	2.4	2.9	3.5	4.2	3.7	
98	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	61.1	66.67	72.22	77.78	83.33	88.89	94.44	
AE	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
99	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
100	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
101	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
102	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
102	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
103	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
104	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
105	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
AF	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
106	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	
107	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AG	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
108	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
109	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	0.54	0.72	0.91	1.10	1.28	1.47	1.65	
110	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	95	95.05	95.1	95.15	95.2	95.25	95.3	
111	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	%	3.5	4	4.5	5	6	8	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)									
112	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota	%	96.9	97	97.25	97.5	97.75	98	98.25	
AH	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
113	Persentase ARG Daerah	%	46.77	48.80	48.90	49	49.5	49.7	50	
114	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
115	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	0.005:0.005	0.005:0.005	0.005:0.005	0.003:0.003	0.003:0.003	0.003:0.003	0.003:0.003	
AI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
116	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	50	50	50	50	50	50	50	
AJ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
117	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan									
118	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	50	50	100	100	100	
119	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal.	%	0	60	65	70	75	80	85	
120	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	5	10	15	20	
121	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	0	0	0	0	0	0	
122	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	10	20	40	60	80	100	
AK	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
123	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	67.72	67.97	68.22	68.47	68.72	68.97	70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
124	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	74.87	75	76	77	78	79	80	
125	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	
AL	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
126	Perekaman KTP elektronik	%	97.29	97.49	97.69	97.89	98.09	98.29	98.49	
127	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	77.5	78	78.5	79	79.5	80	81	
128	Kepemilikan akta kelahiran	%	98.95	99	99	99	99	99	99	
129	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma	%	70.45	70.45	70.45	70.45	75	75	75	
AM	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
130	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2	2.02	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
131	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	64	64.03	64.05	64.2	64.5	65	65	
132	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	22.78	16.83	16	15.5	15	14	14	
AN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
133	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
AO	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
134	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	15	29	49	59	74	88	100	
135	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	12.5	29	43	57	71	86	100	
136	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	%	85	87	90	91	93	97	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	pemerintah daerah kabupaten/kota									
AP	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
137	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
138	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	20.77	21	22	23	24	25	26	
AQ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
139	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	260.93	2	2	2	3	3	3	
AR	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
140	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	78.5	80	82	84	85	87	90	
141	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	50.74	55.21	67.5	70.3	73.5	74.5	78	
142	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	16.64	17	18	19	21	23	25	
AS	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
143	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	melakukan evaluasi pembangunan daerah									
144	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AT	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
145	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	40	51	63	75	88	100	
AU	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
146	Terlestarikannya cagar budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	
AV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
147	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	79.14	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5	85.5	
148	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	57.91	60.5	61.5	63	65	67	68	
AW	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
149	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang	%	69.35	70.29	71.23	72.17	73.11	74.05	75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan									
150	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	66.67	67	67.5	68	68.5	69	69.5	
AX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
151	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	376.24	426.49	469.14	516.05	567.66	624.42	686.87	
AY	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
152	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4.06	19.15	16.39	14.08	12.35	10.99	9.90	
153	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan	%	0.38	0.4	0.59	2.36	2.5	4.68	5.37	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	nusantara yang datang ke Kabupaten/kota									
154	Tingkat hunian akomodasi	%	20.6	20	20	21	21	22	22	
155	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.05	2.1	2.16	2.21	2.27	2.32	2.38	
156	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	%	12.7	13	14.99	16.22	17.99	19.41	20.57	
AZ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
157	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	83.33	91	91.67	93.33	95	96.67	100	
158	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	8	8	8	7	6	5	4	
AAA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM**									
159	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AAB	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
160	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	%	20	25	30	35	40	45	50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)									
161	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	27.8	30	35	40	45	50	55	
163	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	85.73	86.23	86.73	87.23	87.73	88.23	88.73	
AAC	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
164	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	17.9	5	5.5	6	7	7	7.5	
165	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP	%	0	25	25	25	25	25	25	
166	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang	%	4.8	5	5	5	5	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dilakukan oleh Instansi terkait									
167	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	5	5	5	5	5	5	
168	Persentase Jumlah izin pemantauan dan Pengawasan denan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Yang lokasinya di kabupaten/kota	%	0	10	10	10	10	10	10	
169	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
AAD	**URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**									
170	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	22.015:22.015	20.00:20.00	20.00:20.00	20.00:20.00	20.00:20.00	20.00:20.00	20.00:20.00	
171	Rasio PAD	%	8.08:8.08	8.00:8.00	8.00:8.00	8.00:8.00	8.00:8.00	8.00:8.00	8.00:8.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
173	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.011	3.061	3.111	3.161	3.211	3.261	3.311	
174	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)	Nilai	3.27	3.32	3.37	3.42	3.47	3.52	3.57	
175	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	84	80	80	80	80	80	80	
176	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
AAE	**URUSAN PENGADAAN**									
177	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
178	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	84.17	84.3	84.6	84.8	85	85.3	85.6	
179	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	75	75.5	75.7	75.9	76.2	76.75	76.7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
AAF	**URUSAN KEPEGAWAIAN**									
180	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	84.04	85	86	87	88	89	90	
181	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14.73	15	16	18	20	23	25	
182	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	29.82	30	33	35	37	39	45	
AAG	**URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN**									
183	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalam APBD	%	-0.52	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	
184	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	21.18	-20.00	-20.00	-20.00	-20.00	-20.00	-20.00	
185	Manajemen Aset	Kategori	100	100	100	100	100	100	100	
186	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap	%	3.14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	total belanja dalam APBD tahun sebelumnya									
AAH	**URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**									
187	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	30	60	70	80	85	100	100	
188	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	75	85	95	100	100	100	100	

4.2.3. Indikator Utama Pembangunan RPJPD Periode I (Tahun 2025-2029)

Arah kebijakan dalam RPJPD Kota Tomohon 2025-2045 menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta mendukung tercapainya visi daerah. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Tabel Target Indikator Utama Pembangunan Daerah RPJPD Periode I

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
IE1. Kesehatan untuk semua	Usia harapan hidup	75,75	75,93	76,11	76,29	76,47	76,65
	Kesehatan Ibu dan Anak:						
	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	150	145	140	135	133	130
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2
	Insiden Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)						
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate) (%)	90	90,4	90,8	91,2	91,6	92
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolosis (treatment coverage) (%)	90	90,4	90,8	91,2	91,6	92
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5
	Hasil Pembelajaran :						

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
IE2. Pendidikan Berkualitas yang merata	a. Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : i) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional ii) Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	63,68 74,94	66,18 76,04	68,68 77,14	71,18 78,24	73,68 79,34	76,18 80,44
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional ii) Rata-rata kompetensi Numerasi SMP	54,58 65,27	57,48 66,77	60,38 68,27	63,28 69,77	66,18 71,27	69,08 72,77

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	berdasarkan Asesmen Nasional						
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,13	11,22	11,32	11,42	11,51	11,61
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,44	14,49	14,55	14,61	14,66	14,72
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)		12,18	12,89	13,59	14,30	15
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,63	62	62,38	62,75	63,13	63,5
IE3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat kemiskinan (%)	5,00-4,75	5,50 – 5,00	5,30 - 4,80	5,00 - 4,60	4,90 - 3,80	4,80 - 3,50
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota (%)	60,36	63,29	66,22	69,14	72,07	75
	Persentase Penyandang disabilitas bekerja disektor formal	8	10,4	12,8	15,2	17,6	20
IE4, Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6,52	6,53	6,54	6,56	6,6	6,62

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengembangan Pariwisata						
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,08	2,15	2,3	2,5	2,8	3
	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	61	71	81	91	101	111
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	8	8,8	9,6	10,4	11,2	12
	Produktivitas UMKM, koperasi , BUMD :						
	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level kota (%)	11,53	11,82	12,12	12,41	12,71	13
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Kota (%)	1,89	2,11	2,33	2,56	2,78	3
	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,98	3,18	3,39	3,59	3,80	4
	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,14	1,69	2,24	2,8	3,35	3,9
	Return on Aset (ROA) BUMD	0,39	0,75	1,11	1,48	1,84	2,2

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,40 – 7,00	7,31-6,55	7,30-6,56	7,20-5,81	6,80-5,60	6,50-4,60
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	44	46,6	49,2	51,8	54,4	57
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,9	50,12	50,34	50,56	50,78	51
	Indeks Inovasi Daerah	38	39	41	43	44	45
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	30	31,5	33	34,5	36	37,5
	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	8	8,4	8,8	9,2	9,6	10
IE6.Transformasi Digital	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4
IE7.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Kota	5,86	5,75	5,64	5,52	5,41	5,3
	Pembentukan modal tetap bruto (%PDRB)	36,9	36,22	35,54	34,86	34,18	33,5
	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	15,8	16,42	17,04	17,66	18,28	18,90
IE8.Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi							
	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	96	96,2	96,45	96,5	97	97,3
	Persentase kelurahan mandiri (%)	60	62	64	66	68	70
IE9.Regulatif dan Tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Hukum	67,34	67,54	68	68,22	69	70
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,1	3,2	3,3	3,35	3,4	3,5
	Indeks Pelayanan Publik	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7
	Indeks Integritas Nasional	76,79	77,63	78,47	79,32	80,16	81
IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional tangguh dan Demokrasi Substansial	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100
	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	59,99	60,69	61,39	62,10	62,8	63,5
	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
IE11. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,56	0,57	0,581	0,62	0,65	0,75
	Tingkat Inflasi (%)	2,7 – 3,7	2,34-3,36	1,98-3,02	1,62-2,68	1,26-2,34	0,9-2
	a.Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,10	31,48	34,86	38,24	41,62	45

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	b.Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,12	0,122	0,124	0,126	0,128	0,130
	c. total Kredit/PDRB	30,10	33,68	37,26	40,84	44,42	48
	Inklusi Keuangan	92,31	92,75	93,19	93,62	94,06	94,5
IE12.Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Indeks Rasa Aman	48	49,12	50,24	51,36	52,48	53,60
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	78	79,1	80,2	81,3	82,4	83,5
IE13.Beragama Maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,39-55,43	56.012-56,74	56.634-57.39	57.256-57.39	57.878-58.05	58.6-58.7
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77	77,5	78	78,5	79	80
IE14.Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70	70,3	70,5	70,8	71	71,3
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,154	0,153	0,150	0,149	0,147	0,145
IE15.Lingkungan Hidup berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,522	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58
	a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,97	68,22	68,47	68,72	68,97	70
	b.Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2	4	6	8	10	12

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah	75	76	77	78	79	80
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	75	76	77	78	79	80
IE16.Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan							
	a. Ketahanan Energi						
	Konsumsi listrik per Kapita (kWh)	1742,5	1743	1743,5	1744	1744,5	1745
	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	127	126,8	126,6	126,4	126,2	126
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	3,65	3,15	2,65	2,15	1,85	1,15
	c.Ketahanan air						
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,61	0,71	0,81	0,90	1	1,1
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	54	57	60	63	66	69
IE17.Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (IRB)		112,1	111	110,2	109	108
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
	a.Kumulatif	14,66	16,73	18,8	20,86	22,93	25

Arah Pembangunan	IUP RPJPD	TARGET TAHUN (DALAM RPJMD)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	b.Tahunan	24,69	29,45	34,21	38,98	43,74	48,5

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansial

RPJMD menjadi panduan dalam menjabarkan visi "Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera" ke dalam strategi, arah kebijakan, dan sasaran yang terukur. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi, program unggulan, program prioritas, hingga program daerah yang dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang pembangunan di Kota Tomohon secara optimal. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju, serta penguatan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan.

Dokumen RPJMD ini tidak hanya menjabarkan arah pembangunan secara konseptual, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan berbasis bukti untuk memastikan setiap langkah pembangunan berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan keberpihakan kepada masyarakat. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan mampu menjembatani antara visi jangka panjang daerah dan kebutuhan pembangunan lima tahunan secara sistematis dan sinergis.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu/program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non elayanan dasar, dan urusan pilihan serta mewujudkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tomohon.
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta dokumen perencanaan sektoral lainnya yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Pelaksanaan RPJMD dilandasi oleh prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi aktif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan orientasi pada hasil. Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) diterapkan secara menyeluruh untuk memastikan keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan antarlevel pemerintahan. Kolaborasi antara Pemerintah, DPRD, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat sipil menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta Evaluasi RKPD tahunan, serta Kajian Tengah Periode dan Kajian Akhir Periode RPJMD. Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan manajemen risiko diterapkan dalam penyusunan RKPD guna mengidentifikasi potensi risiko serta menetapkan langkah mitigasi yang tepat. Hal ini bertujuan agar penyusunan RKPD mampu mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari siklus perencanaan. Melalui mekanisme pengendalian yang terstruktur dan evaluasi berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana. Selain itu, hasil evaluasi menjadi landasan penting dalam perbaikan kebijakan serta peningkatan efektifitas dan kinerja pembangunan di masa mendatang. RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dimungkinkan untuk dilakukan perubahan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025–2029, seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadikan RPJMD ini sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Daerah. RPJMD ini menjadi instrumen transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Semoga RPJMD ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Tomohon.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

PEMERINTAH KOTA TOMOHON SEKRETARIAT DAERAH

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002